

**ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA  
(DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN)**

**T E S I S**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**IDA BAGUS WIRATMAJA**  
Nim : L4D 000 192




**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Oktober 2002

  
IDA BAGUS WIRATMAJA  
NIM. L4D 000 192

**ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA  
(DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN)**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

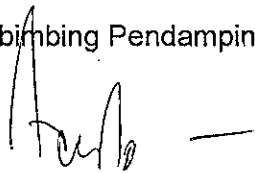
**IDA BAGUS WIRATMAJA**  
**Nim : L4D 000 192**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 03 Oktober 2002

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Oktober 2002

Pembimbing Pendamping



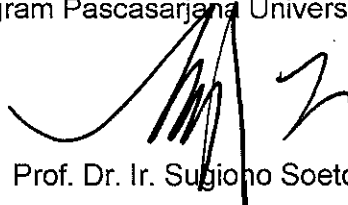
Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP.

Pembimbing Utama



Ir. Ragil Haryanto, MSP.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sujiono Soetomo, DEA.

*“ Inanavaneva purusah sanyuktah paraya dhiya,  
udayastamanajno hi na cocati na hrayati..”*

*(Sarasamuccaya, Cloka 500, Hal 339-340)*

*Artinya :*

*Jika ada orang sadar akan keadaan yang hakiki itu, orang yang demikian itu dinamai orang yang budiman; makin tinggi ilmu orang yang budiman itu, makin tidak dilekati kesenangan dan kesedihan dalam pikirannya.*

---

*Kupersembahkan Sumbangan Pikiran ini untuk:  
Aji, Ibu, Istriku “Dewiku-Bidadariku” Thamie dan Buah Hati Tercinta  
yang tengah kami tunggu kehadirannya, serta Mbok Gek dan Blitu  
Astawa, Goesade dan Cok Inten, Gek Andra dan Goes Bram*

## ABSTRAK

Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi di Kota Denpasar dihadapkan pada dualisme pertumbuhan penduduk yang pesat dengan keterbatasan lahan perkotaan. Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya akumulasi aktivitas secara terus menerus yang menuntut kebutuhan akan ruang hunian dan aktivitas fungsional kota lainnya semakin tinggi, padahal kota menghadapi kendala keterbatasan fisik dan semakin tingginya harga lahan. Akumulasi aktivitas keruangan dan ekonomi yang meningkat serta pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan kota untuk menampung aktivitas serta menanggung segala dampak dari perkembangan kotanya. Akibatnya semakin meningkatnya beban kota dan kepadatan penduduk. Perkembangan kota yang semakin pesat mengakibatkan tekanan fisik, sosial, dan ekonomi pada ruang kota yang terbatas, sehingga perkembangan kota cenderung akan terjadi secara ekstensif, yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ke wilayah-wilayah pinggiran kota, sehingga akan memunculkan pusat aktivitas baru yang berciri urban. Proses pergerakan ini disebut dengan proses suburbanisasi.

Proses suburbanisasi yang terjadi di wilayah pinggiran Kota Denpasar menjadi semakin cepat karena adanya pengaruh budaya masyarakat Bali yang memberikan batasan-batasan dalam pemanfaatan ruang kota. Sehingga akan mempercepat perluasan kawasan perkotaan dan penyatuan ruang-ruang antar kota. Penyatuan ruang-ruang antar kota ini akan membentuk kawasan perkotaan yang lebih besar, yaitu Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Beranjak dari fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA dengan aspek budaya masyarakat Bali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam kaitannya dengan perkembangan Kota Denpasar dan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA.

Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah melalui : (a) pendekatan analisis kualitatif, untuk menganalisis dan mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan serta pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Denpasar, (b) pendekatan analisis kuantitatif, untuk menganalisis dan mengidentifikasi keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA.

Berdasarkan kedua pendekatan analisis di atas, maka yang menjadi temuan studi adalah bahwa nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan yang mempengaruhi perkembangan Kota Denpasar sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan kota secara ekstensif adalah perwujudan nilai-nilai budaya tersebut dalam pola tata ruang tradisional, sistem kemasyarakatan/adat istiadat, serta sistem religi, upacara agama dan upacara adat. Sedangkan aspek budaya yang memiliki keterkaitan dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA adalah lokasi bermukim yang dekat dengan rumah asal, batasan budaya dalam pemanfaatan ruang bawah tanah, dan eksistensi penerapan konsepsi budaya.

Dari temuan studi di atas dapat disimpulkan, bahwa aspek budaya masyarakat Bali tersebut tidak memberi pengaruh langsung terhadap fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA, namun sebagai dampak dari ekstensifikasi perkembangan Kota Denpasar. Oleh karenanya, maka aspek budaya ini memiliki keterkaitan yang relatif lemah dengan fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA. Berdasarkan hal ini, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah (a) membuat deliniasi atau limitasi kawasan self conservation, (b) membangun kawasan pengembangan baru di luar Kota Denpasar, serta (c) mempertahankan peraturan pembatasan ketinggian bangunan dan larangan pembangunan jalan/jembatan layang di Kota Denpasar, sehingga akan membentuk identitas Kota Denpasar dan Kawasan SARBAGITA.

## ABSTRACT

Highly rate of urbanization to the city faced by Denpasar City is confronted in ambiguity; one side is on the density of population, and the other side is limitation of the urban area. Due to the population density in urban area, the activities accumulation that required place for dwell and its functional activity sound like never stop, increasing all the time. Unfortunately, all of the public demands above aren't matching with the readiness and the ability to accommodate all the activities rather than take the responsibility for the impact of the urban development. The development of the urban area has some impacts for physically, social, and economic pressure for room to stay alive, therefore, the development of the urban area tend to running extensively. Furthermore, it will develop through the suburban area, so new activity that characterized urban area will emerge. All of this process called suburbanization process.

The rapidly process of suburbanization in Denpasar suburban is due to the influence of Bali's culture that made some limitations in using urban space. Therefore, it will vaster the urban area and its unification among the room inter city. This unification will perform the urban area to be wider and it namely SARBAGITA Area (Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan). Based on this phenomenon, the research was held to know how the relationship of the suburbanization phenomenon in SARBAGITA Area with cultural aspect in Bali's society. In order to answer this question, the aims of this research was directed to evaluate cultural values in Bali's society in its relationship with the development of Denpasar City and the phenomenon of suburbanization in SARBAGITA Area.

The approaching process that was taken to achieve these research goals is by qualitative analyzing approach. It used to analyze and identify the cultural values of Bali's society in the scope of place for dwell and its influence through the development of Denpasar City. Meanwhile, the qualitative analyze used to analyze and identify the relationship between cultural aspect in Bali's society with the suburbanization phenomenon di SARBAGITA Area.

Based on these two analyzing approaches above, it found those cultural values in Bali's society is influencing the place for dwell in the development of Denpasar City. Therefore, the existing development was occurred, and it followed by the emergence of those values in its traditionally lay out patterns, neighborhood system or customs and traditions system, religious system, religious ceremony, and tradition ceremony. Meanwhile, cultural aspect that followed by the relationship with the suburbanization phenomenon in SARBAGITA Area is the nearby occupation location with the original location, cultural limitation in using basement room, and the existence in implementing the cultural conception.

Therefore, it can be concluded that the cultural aspects in Bali's society doesn't significantly influent to the suburbanization phenomenon in SARBAGITA Area, but as the effect of extensification of Denpasar city progress. Thus, the cultural aspect has relatively weak relationship with the sub-urbanization phenomena happened in SARBAGITA Area. Based on that, some ideas can be recommended: (a) create delineation or limitation self-conservation area, (b) build new development area out of Denpasar city, and (c) keep rule the limitation of building height and prohibition of road/viaduct building in Denpasar city, then it will shape the Denpasar city and the SARBAGITA Area identities.

## KATA PENGANTAR

Setelah cukup lama terombang-ambing dalam menentukan arah penelitian akibat keterbatasan literatur dan penguasaan metode penelitian Penulis, akhirnya tugas yang berat ini dapat dirampungkan. Terlepas dari permasalahan teknis tersebut, puji syukur Penulis panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* atau Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga segala keterbatasan tersebut dapat terakomodasi menjadi sebuah karya ilmiah yang walaupun kontribusinya hanya “sekecil debu”, semoga dapat memberikan sumbangan untuk penambahan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Perencanaan serta Pembangunan Kota dan Wilayah.

Beranjak dari segala keterbatasan tersebut pula Penulis berupaya mewujudkan sesuatu yang menjadi “obsesi” untuk memberikan pembuktian akan suatu fenomena riil yang menarik tentang keterkaitan budaya masyarakat terhadap perkembangan kota dan pembentukan suatu kawasan perkotaan. Hal tersebut menjadi semakin menarik karena budaya masyarakat, khususnya di Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya (*living culture*). Aspek budaya tersebut memberikan batasan-batasan dalam pemanfaatan ruang kota, yang berimplikasi terhadap pemekaran/perluasan fisik kawasan perkotaan. Maka, secara tidak langsung aspek budaya dalam wujud keruangan ini akan membentuk struktur ruang Kota Denpasar yang mungkin merupakan satu-satunya Kota Besar di dunia yang tidak menunjukkan “kesombongan teknologi bangunan pencakar langit”.

Sebagai suatu “obsesi”, karya ini sangat jauh dari kesempurnaan. Namun tanpa bermaksud mengecilkan niat awalnya, dengan setulus-tulusnya kami haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, dan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali, atas restunya dalam memberikan kesempatan tugas belajar.
2. Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Kepala Bagian Kepegawaian, dan Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan atas doa restu dan dukungannya sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan ini.
3. Pemimpin Proyek PPSDM P3KT BUIP-LOAN IBRD No. 4155-IND yang telah memberikan kesempatan dan bea siswa.
4. Rekan-rekan Konsultan *Urban Management Training (UMT)*, atas segala bantuan teknis dan administrasinya (Bapak Aswin, Komang Aryawan, dan Ibu Yuli).
5. Bapak Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program MTPK.
6. Ibu Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan banyak masukan dan koreksi yang sangat besar pengaruhnya terhadap hasil akhir penelitian ini.
7. Bapak Ir. Djoko Suwandono, MSP selaku Dosen Penguji yang terlihat tenang tapi menghanyutkan. Terima kasih atas segala masukan dan nasehatnya.
8. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP selaku Dosen Pembimbing/Mentor yang selalu kritis dan objektif. Terima kasih atas segalanya, karena selain bertindak sebagai guru, Bapak juga seperti orang tua, teman, sekaligus sahabat bagi kami.
9. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP. selaku Dosen Pembimbing/Co-Mentor yang tidak kalah kritis dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk mendorong dan mengarahkan pola pikir penulis ke dalam wujud laporan. Terima kasih asistensi via e-mailnya.

10. Bapak Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc. selaku dosen wali dan “orang tua asuh” yang selalu sabar dan sadar akan ketidak-mampuan anak-anak asuhnya. Terima kasih atas perjuangannya, sehingga kami bisa menempuh pendidikan di MTPK-UNDIP ini.
11. Bapak PM. Broto Sunaryo, SE, MSP selaku dosen dan “orang tua” yang tidak bosan-bosannya mendorong penulis untuk segera merampungkan penelitian ini.
12. Bapak Samsul Marif, SP, MSP atas waktunya untuk mendiskusikan penelitian ini.
13. Rekan-rekan administrator di MTPK yang selalu membantu dan mempermudah segala proses administrasi kami tanpa harus berbelit-belit.
14. Bapak Ir. Anindya Putra, MSP sebagai “guru, orang tua, sekaligus sahabat” yang selalu memberikan ide inovatif, dukungan dan dorongan dalam setiap langkah yang penulis tempuh, dan secara tidak langsung memberi warna dalam penulisan penelitian ini.
15. Bapak/Ibu nara sumber, atas segala waktu dan kesabarannya dalam memberikan informasi serta wawasan tentang budaya masyarakat Bali.
16. Keluarga besar di Cau Belayu dan Mataram atas segala dukungannya.
17. Rekan-Rekan “Tim Bali” yang selalu menjadi yang terbaik dan solid. Makasi atas semangat dan rasa kekeluargaan yang sudah tercipta. Kalian manusia ato robot sich ?
18. Bliman Laksmi dan Koming yang selalu membantu kami dalam segala hal, terutama saat-saat penulis berada di Semarang.
19. Bapak/Ibu/Saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas segala dukungan dan bantuannya dalam proses penelitian sampai pada penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga kebaikan berdatangan dari segala arah dan kita semua selalu dilimpahkan kemuliaan dan kebahagiaan. Atas segala kesalahan dan perbedaan persepsi yang mungkin terjadi dalam substansi penulisan laporan penelitian ini adalah semata-mata karena keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu mohon segala koreksi dan masukannya demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PRIBADI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR RINGKASAN ISTILAH .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Studi .....	10
1.3.1. Tujuan Studi .....	10
1.3.2. Sasaran Studi .....	11
1.3.3. Manfaat Studi .....	11
1.4. Ruang Lingkup Studi .....	12
1.4.1. Lingkup Substansial .....	12
1.4.2. Lingkup Spasial .....	13
1.5. Kerangka Pemikiran .....	14
1.6. Metodologi Penelitian .....	18
1.6.1. Pendekatan Studi .....	18
1.6.2. Metode Analisis .....	19
1.6.3. Kebutuhan Data .....	21
1.6.4. Metode Pengumpulan Data .....	21
1.6.5. Teknik Sampling .....	23
1.7. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR TENTANG SUBURBANISASI DAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT BALI .....</b>	<b>28</b>
2.1. Perkembangan Kota dan Suburbanisasi .....	28
2.1.1. Faktor-faktor Perkembangan Kota .....	28
2.1.2. Masalah Perkembangan Kota .....	32
2.1.3. Proses Suburbanisasi .....	33
2.1.4. Perluasan Kawasan Perkotaan ( <i>Extended Urban Area</i> ) .....	35
2.2. Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan .....	39
2.2.1. Perwujudan Budaya dalam Pola Tata Ruang Tradisional Bali .....	45
2.2.2. Perwujudan Budaya dalam Sistem Kemasyarakatan .....	63

2.2.3. Perwujudan Budaya dalam Sistem Religi, Upacara Agama, dan Upacara Adat .....	65
2.3. Kesimpulan Teoritis .....	67
2.3.1. Teori Suburbanisasi .....	67
2.3.2. Teori Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan .....	68
2.3.3. Kerangka Teoritis .....	71
<b>BAB III KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN SARBAGITA .....</b>	<b>73</b>
3.1. Kajian Terbentuknya Kawasan SARBAGITA .....	73
3.2. Kajian Fisik Kawasan SARBAGITA .....	80
3.3. Kajian Kependudukan Kawasan SARBAGITA .....	81
3.4. Identifikasi Karakteristik dan Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan SARBAGITA Berdasarkan Hasil Survei .....	85
3.4.1. Karakteristik Masyarakat .....	85
3.4.2. Pola Bermukim Masyarakat .....	87
<b>BAB IV ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA .....</b>	<b>93</b>
4.1. Analisis dan Identifikasi Perwujudan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Kota Denpasar .....	93
4.1.1. Perwujudan Budaya dalam Pola Tata Ruang Tradisional Bali .....	93
4.1.2. Perwujudan Budaya dalam Sistem Kemasyarakatan .....	103
4.1.3. Perwujudan Budaya dalam Sistem Religi, Upacara Agama, dan Upacara Adat .....	110
4.2. Analisis Keterkaitan antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Fenomena Suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA .....	117
4.2.1. Keterkaitan antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Preferensi Bermukim Masyarakat di Kawasan SARBAGITA .....	118
4.2.8. Keterkaitan antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Pertimbangan Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali ..	120
4.3. Temuan Studi .....	122
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>125</b>
5.1. Kesimpulan .....	125
5.2. Rekomendasi .....	126
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>127</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1 :	Distribusi Sampel pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam Lingkup Spasial Penelitian .....	25
TABEL II.1 :	Perwujudan <i>Tri Hita Karana</i> dalam Susunan Kosmos .....	41
TABEL II.2 :	Perwujudan <i>Tri Angga</i> dalam Susunan Kosmos .....	41
TABEL III.1 :	Luas Wilayah, Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kawasan SARBAGITA Tahun 1996-2000 .....	82
TABEL III.2 :	Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga di Kawasan SARBAGITA Tahun 1996-2000 .....	85
TABEL III.3 :	Ketersediaan Fasilitas dan Utilitas di Kawasan SARBAGITA menurut Persepsi Masyarakat Tahun 2002 .....	87
TABEL III.4 :	Cara memperoleh Tempat Tinggal Bagi Masyarakat di Kawasan SARBAGITA Tahun 2002 .....	88
TABEL IV.1 :	Pernyataan Pakar Terkait dengan Luas Minimal Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Hindu Bali .....	97
TABEL IV.3 :	Rangkuman Pakar yang Mendukung Pengaruh Perwujudan Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan Terhadap Perkembangan Kota Denpasar .....	116
TABEL IV.4 :	Hasil Tabulasi Silang antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Preferensi Bermukim di Kawasan SARBAGITA .....	119
TABEL IV.4 :	Hasil Tabulasi Silang antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Pertimbangan Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali .....	121

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Stadia Perkembangan Kota Denpasar .....	5
GAMBAR 1.2	: Peta Penggunaan Lahan Kota Denpasar Tahun 2000 .....	6
GAMBAR 1.3	: Peta Wilayah Administrasi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan .....	15
GAMBAR 1.4	: Peta Kawasan SARBAGITA dan Unit Analisis .....	16
GAMBAR 1.5	: Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian .....	17
GAMBAR 1.6	: Diagram Kerangka Analisis .....	20
GAMBAR 2.1	: Perwujudan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan .....	43
GAMBAR 2.2	: Arah Orientasi Ruang Pola dalam Tata Ruang Tradisional Bali ...	47
GAMBAR 2.3	: Konsep Dasar <i>Tri Hita Karana</i> .....	49
GAMBAR 2.4	: Pola Perkampungan Linier Kontinu .....	51
GAMBAR 2.5	: Pola Perkampungan <i>Nyatur Desa/Nyatur Muka/Catus Patha</i> .....	52
GAMBAR 2.6	: Pola Perkampungan Kombinasi .....	53
GAMBAR 2.7	: Keragaman Pola Desa di Bali .....	54
GAMBAR 2.8	: Tata Nilai Pola Ruang <i>Natah</i> .....	59
GAMBAR 2.9	: Pengukuran Petak Pekarangan .....	61
GAMBAR 2.10	: Pengukuran Perletakan Bangunan .....	62
GAMBAR 2.11	: Diagram Kerangka Teoritis .....	72
GAMBAR 3.1	: Peta Indikasi Kawasan Cepat Berkembang .....	76
GAMBAR 3.2	: Peta Orde Kota-kota di Propinsi Bali .....	77
GAMBAR 3.3	: Peta Sistem Kota-kota di Propinsi Bali .....	78
GAMBAR 3.4	: Peta Stadia Perkembangan Lahan Terbangun di Kawasan SARBAGITA .....	79
GAMBAR 3.5	: Proporsi Jumlah Penduduk di Kawasan SARBAGITA Tahun 2000 .....	83
GAMBAR 3.6	: Grafik Jumlah Penduduk di Kawasan SARBAGITA Tahun 1996-2000 .....	83
GAMBAR 3.7	: Peta Perkembangan Kawasan Terbangun di Kawasan SARBAGITA Tahun 1993-2000 .....	84
GAMBAR 3.8	: Proporsi Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kawasan SARBAGITA Tahun 2002 .....	86
GAMBAR 3.8	: Perbandingan Persepsi Masyarakat dalam Mempertimbangkan Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali di Kawasan SARBAGITA Tahun 2002 .....	92
GAMBAR 4.1	: Awal Perkembangan Kawasan SARBAGITA .....	102
GAMBAR 4.2	: Pengaruh Budaya dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan .....	102
GAMBAR 4.3	: Fenomena Suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA .....	103
GAMBAR 4.4	: Kurva Peningkatan Harga Lahan akibat Pengaruh Budaya .....	115

## DAFTAR RINGKASAN ISTILAH

<i>Apenimpug</i>	=	sejauh lemparan batu
<i>Apeneleng</i>	=	sejauh pandangan mata
<i>Apangabahan</i>	=	sejauh tinggi bangunan yang direbahkan
<i>Bhuwana Agung</i>	=	makro kosmos
<i>Bhuwana Alit</i>	=	mikro kosmos
<i>Banjar Adat</i>	=	lingkungan permukiman, setingkat rukun warga (RW)
<i>Butha Yadnya</i>	=	persembahan kepada lingkungan
<i>Catus Patha</i>	=	bertemuinya pengaruh yang datangnya dari empat penjuru mata angin (timur, selatan, utara, dan barat), sebagai pusat desa
<i>Campuhan</i>	=	pertemuan dua atau lebih sungai
<i>Depa</i>	=	rentangan tangan
<i>Depa Alit</i>	=	rentangan dua tangan
<i>Depa Agung</i>	=	rentangan dua tangan terbuka
<i>Depa Asta</i>	=	jarak antara ujung kaki dengan rentangan tangan dibuka
<i>Depa Asta Musti</i>	=	rentang ujung kaki kanan dengan ujung kiri dibuka
<i>Desa Adat</i>	=	desa yang terikat dengan <i>kahyangan tiga</i>
<i>Desa Pekraman</i>	=	Desa Adat yang terikat oleh <i>Kahyangan Tiga</i>
<i>Dadia</i>	=	hubungan keturunan
<i>Dewa Yadnya</i>	=	persembahan kepada Tuhan
<i>Hasta Kosala Kosali</i>	=	aturan tentang ukuran bangunan dan pengaturan ruang dalam bangunan
<i>Hasta Bumi</i>	=	aturan tentang tata cara perletakan bangunan dalam suatu lahan
<i>Kaja</i>	=	utara
<i>Kelod</i>	=	selatan
<i>Kangin</i>	=	timur
<i>Kauh</i>	=	barat
<i>Kaja Kangin</i>	=	timur laut
<i>Kelod Kangin</i>	=	tenggara
<i>Kelod Kauh</i>	=	barat daya
<i>Kaja Kauh</i>	=	barat laut
<i>Kahyangan Tiga</i>	=	tiga pura yang selalu ada di setiap <i>desa adat</i> , yaitu pura desa, pura puseh dan pura dalem
<i>Kaja-Kelod</i>	=	utara-selatan
<i>Lebuh</i>	=	ruang peralihan di depan pintu masuk
<i>Luan-Teben</i>	=	hulu-hilir
<i>Manik Ring Cucupu</i>	=	bayi dalam kandungan
<i>Manusa Yadnya</i>	=	persembahan kepada sesama manusia
<i>Melasti</i>	=	upacara ke pantai atau <i>campuhan</i> yang memiliki makna sebagai tempat pembersihan segala yang kotor
<i>Natah</i>	=	pekarangan, halaman rumah
<i>Ngaben</i>	=	upacara pembakaran mayat
<i>Nista</i>	=	profan
<i>Palemahan</i>	=	teritorial
<i>Perbekelan</i>	=	pemerintahan administrasi desa

<i>Pempatan Agung/Catus Patha</i>	=	perempatan utama, dimana dua jalan utama yang menyilang desa, sebagai pusat desa
<i>Parhyangan</i>	=	pura, tempat pemujaan
<i>Pekurenan</i>	=	kelompok kekerabatan yang terbentuk akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti
<i>Pitra Yadnya</i>	=	persembahan kepada para leluhur
<i>Purusa/Atma</i>	=	batin, jiwa, roh
<i>Prakerti</i>	=	raga, badan, lahiriah, fisik alam
<i>Panca Mahabhuta</i>	=	lima unsur alam <i>pertiwi</i> (tanah), <i>apah</i> (air), <i>teja</i> (api), <i>bayu</i> (angin), dan <i>akasa</i> (ether)
<i>Palemahan</i>	=	wilayah teritorial
<i>Paraatman/Brahman</i>	=	pusat/sumber roh (Tuhan)
<i>Panca Sradha</i>	=	lima pokok-pokok keyakinan agama hindu
<i>Panca Maha Yadnya</i>	=	lima persembahan sebagai wujud penghargaan secara tulus ikhlas
<i>Rsi Yadnya</i>	=	persembahan kepada para guru
<i>Rwa Bhineda</i>	=	duaisme
<i>Segara-Ukir</i>	=	lautan-gunung
<i>Sekala-Niskala</i>	=	nyata-nir rupa
<i>Sima Krama Desa</i>	=	Masyarakat
<i>Subak</i>	=	perkumpulan penyediaan air sawah
<i>Sekehe</i>	=	organisasi yang dibentuk berdasarkan kepentingan
<i>Soroh</i>	=	kumpulan dari <i>dadia</i>
<i>Sanggah/Merajan</i>	=	tempat suci di setiap rumah masyarakat hindu
<i>Setra</i>	=	kuburan masyarakat hindu
<i>Sanga Mandala</i>	=	sembilan ruang/zona
<i>Susila</i>	=	kerangka untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, leluhur, guru, sesama manusia dan kekuatan alam dalam bentuk persembahan
<i>Tri Sarira</i>	=	tiga badan susunan badan
<i>Tri Kaya Parisudha</i>	=	tiga tuntunan tingkah laku
<i>Tattwa</i>	=	filosofis, memberikan petunjuk filosofis yang mendalam mengenai pokok-pokok keyakinan etika, tingkah laku
<i>Tri Rna</i>	=	tiga hutang yang harus dibayar, dan dilaksanakan melalui <i>panca maha yadnya</i>
<i>Tri Hita Karana</i>	=	tiga unsur penyebab kesejahteraan yang terdiri dari unsur-unsur jiwa, tenaga, dan fisik
<i>Tri Angga</i>	=	tiga susunan badan yang terdiri dari <i>utama angga</i> (kepala), <i>madya angga</i> (badan), dan <i>nista angga</i> (kaki)
<i>Tri Mandala</i>	=	tiga bagian/zona (utama, madya, nista)
<i>Upacara</i>	=	kerangka untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, Leluhur ( <i>pitra</i> ), para guru ( <i>rsi</i> ), sesama manusia dan hubungan dengan <i>bhuta</i> (kekuatan alam) dalam bentuk persembahan yang tulus ikhlas
<i>Umah Asal/Umah Tua</i>	=	rumah asal tempat kelahiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara alami, suatu kota yang memiliki kekuatan daya tarik besar merupakan magnet yang berpengaruh besar bagi daerah-daerah lain yang memiliki kekuatan lebih kecil. Dalam hal ini fungsi magnet tersebut umumnya terdapat pada kota-kota besar (Gilbert dan Gugler, 1996 : 23). Selain itu, perkembangan suatu kota juga disebabkan oleh (1) perkembangan atau perubahan kegiatan usaha dan kehidupan penduduk yang berkembang tersebut, (2) potensi yang dimilikinya, serta (3) fungsi dan peran yang diemban oleh kota itu sendiri (Branch, 1996 : 38).

Fungsi dan peran suatu kota merupakan unsur dasar utama yang mempengaruhi setiap aspek dari berfungsi dan berkembangnya kota tersebut. Kondisi dan karakteristik masyarakat tentunya akan sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dasar kotanya. Besar kecilnya pengaruh di sini tergantung pada sifat dan banyaknya fungsi yang diemban (Branch, 1996 : 38-39). Fungsi yang diemban oleh kota-kota besar ini sebagai suatu pusat yang menjamin pemenuhan fasilitas bukan hanya untuk penghuninya, namun juga untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di wilayah-wilayah pedalaman yang berada di dalam daerah pengaruhnya (Richarson, 1969 : 157). Dengan fungsi tersebut, kota adalah magnet dengan kekuatan sangat besar untuk menarik potensi, baik sumberdaya maupun investasi dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kota-kota dapat memainkan peran sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi (Hoselitz, 1953 dalam Prabatmodjo, 2000 : 31), terutama melalui berbagai fungsi yang dimilikinya. Fungsi-fungsi tersebut mampu mendorong lebih jauh keterkaitan antar wilayah dan migrasi desa-kota. Kecenderungan ini

akan semakin menguat dengan konsentrasi investasi di kota-kota besar karena pertimbangan sarana dan prasarana/aksesibilitas (Friedmann dan Allonso, 1964 : 3).

Kekuatan suatu kota akan menyebabkan tingginya mobilitas manusia, investasi, barang dan jasa ke arah pusat kota. Secara keseluruhan, semua hal ini akan mendorong terjadinya urbanisasi. Urbanisasi merupakan wujud dari interaksi yang terjadi antar kota atau antar wilayah (Bintarto, 1989 : 75).

Urbanisasi sebagai wujud interaksi antar wilayah yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, memiliki konteks yang sangat berbeda dengan negara-negara maju. Pertumbuhan jumlah penduduk kota akibat urbanisasi tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Dorongan dari pertumbuhan hanya dapat dirasakan pada daerah-daerah terpusat dan membawa kecenderungan terjadinya perbedaan kondisi antar wilayah. Wilayah kota besar dan kota-kota sekitarnya tumbuh perekonomiannya, sedangkan wilayah lainnya tertinggal dan cenderung menurun. Sehingga, walaupun tingkat urbanisasi secara nasional masih rendah, namun pada beberapa kota memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Kota-kota dalam satu wilayah tidak dapat berfungsi dengan sebenarnya sebagai pusat pertumbuhan (*growth center*) dan pengaruhnya terhadap wilayah sekelilingnya menurun dengan tajam (Sinulingga, 1999 : 74-75).

Perkembangan urbanisasi di Indonesia memang meningkat walaupun masih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, begitu juga indeks primasinya, masih lebih kecil (Soetomo, 1995 : 12). Fenomena urbanisasi yang tinggi terutama pada kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan lain-lain cenderung akan menyebabkan terjadinya stagnasi perkembangan kota akibat adanya keterbatasan lahan dan sumberdaya, serta ketidakmampuan kota memfasilitasi kebutuhan penduduk yang meningkat dengan sangat

cepat tersebut. Konsekwensinya adalah terjadinya ekspansi perkembangan perkotaan ke wilayah-wilayah pinggiran kota dan wilayah *hinterland* di sekitarnya. Proses urbanisasi di pinggiran kota besar terjadi lebih cepat dibandingkan yang terjadi di kota besar itu sendiri, yang lambat laun akan membentuk *extended metropolitan region* atau *mega urban region* (McGee, 1991 : 9). Sebagai akibat, batas antar wilayah pedesaan dan perkotaan semakin tidak jelas, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat serta ditunjang kemajuan teknologi transportasi yang semakin memperpendek waktu tempuh antar lokasi. Kegiatan perkotaan telah merambah dan berbaur dengan kegiatan pedesaan dengan tingkat interaksi serta mobilisasi aktivitas penduduk yang tinggi (McGee, 1992 dalam Dharmapatni, 1993 : 27).

Fenomena urbanisasi yang terjadi di Indonesia tersebut menunjukkan gejala yang sama dengan Kota Denpasar. Tingkat urbanisasi yang terjadi menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Bahkan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pinggiran Kota Denpasar, namun merambah ke wilayah lain di sekitarnya. Kondisi ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain :

1. Perkembangan Kota Denpasar sampai tahun 2000 (jumlah penduduk 522.381 jiwa dan luas wilayah 12.780 ha), sudah dapat diklasifikasikan sebagai kota besar. Sebagai kota besar, Denpasar merupakan magnet yang kuat untuk menarik aktivitas, sumberdaya dan investasi dari wilayah lain di sekitarnya. Kuatnya tarikan tersebut merupakan gaya sentripetal yang dominan menyebabkan terjadinya perkembangan kota. Bukti ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase laju pertumbuhan penduduknya dalam kurun waktu 1995-2000 yang relatif tinggi dan jauh di atas laju pertumbuhan penduduk rata-rata Propinsi Bali dalam kurun waktu yang sama (0,94 %) yaitu sebesar 2,21 % per tahun (Data Bali Membangun, 2000 : XII-3). Pertumbuhan penduduk ini lebih dominan dipengaruhi oleh faktor migrasi. Hal ini terlihat dari angka perubahan penduduk tahun

2000, dimana penambahan karena faktor migrasi/datang sebesar 29.909 jiwa (75,60 %) dan karena faktor kelahiran sebesar 9.651 jiwa (24,40 %). Sedangkan pengurangan penduduk yang terjadi karena faktor migrasi/pergi sebesar 8.443 jiwa (86,40 %) dan karena faktor kematian 1.329 (13,60 %) (BPS : Tabulasi Data Potensi Desa, 2000).

2. Persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian pada tahun 2000 sebesar 63,65 %, dan prosentase luas lahan pertanian 24,62 % (Bappeda dan BPS Kota Denpasar : Denpasar Dalam Angka, 2000).
3. Dari stadia perkembangan kotanya, perkembangan lahan terbangun di Kota Denpasar dari tahun 1948 sampai tahun 1998 sangat pesat. Selanjutnya sampai tahun 2000, perkembangan tersebut relatif *stagnan* (perkembangan lahan terbangun sangat kecil). Hal ini disebabkan karena cadangan lahan perkotaan yang dapat dimanfaatkan sudah sangat sedikit yaitu dari 34,20 % (4.371 ha) termasuk sawah, tegalan, rawa, hutan bakau, lapangan olah raga/alun-alun, lahan hasil reklamasi, dan lahan konservasi dalam lingkup budaya (seperti : lahan milik adat/desa, lahan milik pura, serta radius kesucian pura dan tempat suci), hanya tersisa  $\pm$  20 % yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan atau 874 ha. Langkanya lahan tersebut akan menimbulkan persaingan dalam pemanfaatannya dan secara langsung akan mempengaruhi tingginya harga lahan, sehingga kegiatan perkotaan yang mampu memanfaatkan lahan tersebut hanya kegiatan-kegiatan komersial. Perkembangan lahan terbangun di Kota Denpasar ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.
4. Peningkatan jumlah penduduk dan langkanya lahan di Kota Denpasar, menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk atau mobilisasi permukiman ke wilayah pinggirannya atau wilayah yang terdekat di sekitarnya. Berkembangnya kawasan pinggir ini menyebabkan terjadinya perluasan fisik kawasan perkotaan (*extended urban area*).



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**TESIS**

ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA

PETA STADIA PERKEMBANGAN  
KOTA DENPASAR

LEGENDA :

-  BATAS ADMINISTRASI
-  KAWASAN TERBANGUN
-  LAHAN KOSONG

SKALA PETA

UTARA



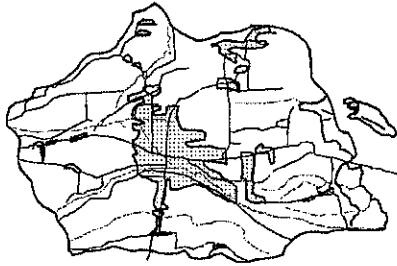
SUMBER PETA DASAR :

RTRW Kota Denpasar

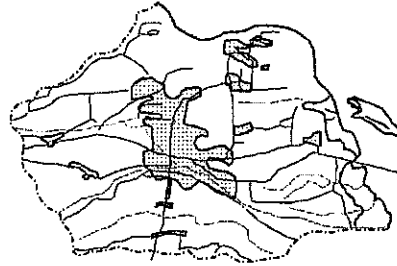
NO. PETA HAL. PETA

1.1 5

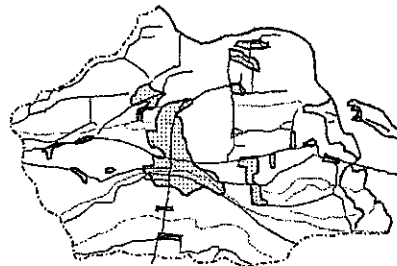
**Tahun 1965**



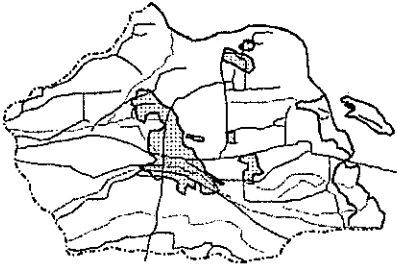
**Tahun 1960**



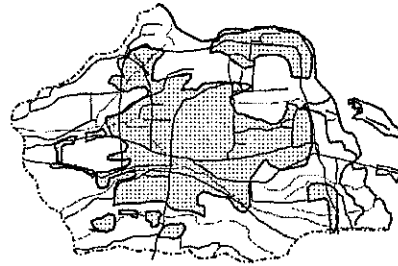
**Tahun 1954**



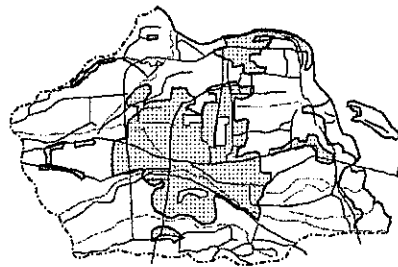
**Tahun 1948**



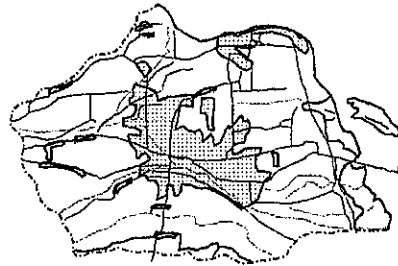
**Tahun 1993**



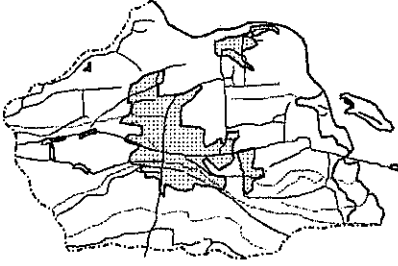
**Tahun 1989**



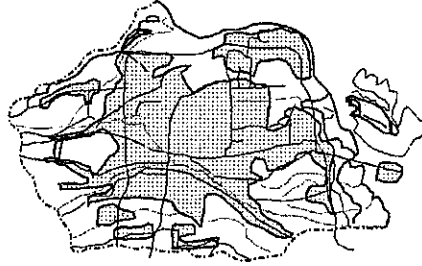
**Tahun 1981**



**Tahun 1970**



**Tahun 1998**





MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# TESIS

ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
PERENCANAAN SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA

PETA PENGGUNAAN LAHAN  
KOTA DENPASAR TAHUN 2000

## LEGENDA :

- Batas Administratif Kota
- Batas Administratif Kecamatan
- Perumahan
- Kantor Pemerintahan
- Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan TAHURA
- TPA Sampah
- Reservoir dan Dam
- Lapangan / Alun-Alun
- Sawah
- Ruang Terbuka Hijau

SWALAPETA

0m 25 50 75m  
1 : 75.000

UTAPA

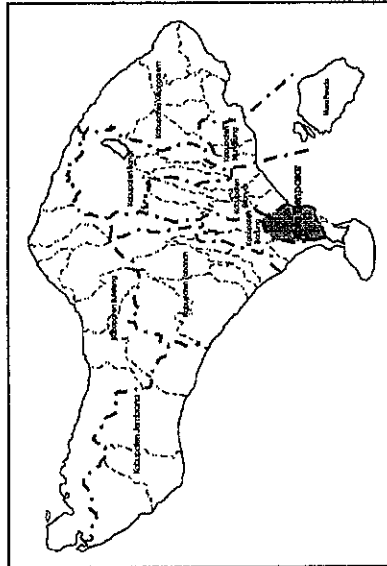
SUMBER PETA DASAR :



Dinas Tata Kota Denpasar

NO. PETA  
HALAMAN

1.2  
6



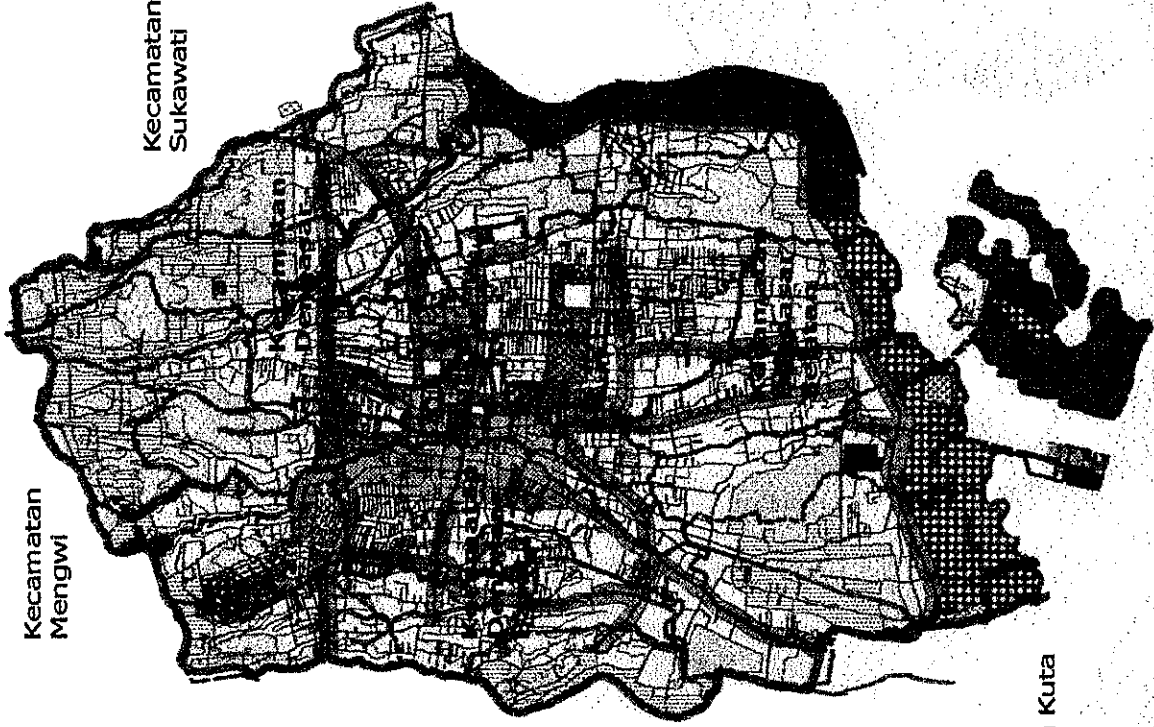
Kecamatan  
Abiansemai

Kecamatan  
Mengwi

Kecamatan  
Sukawati

Kecamatan Kuta

Kecamatan Kuta



Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, bahwa selain faktor pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitasnya, peran dan fungsi yang diemban oleh kota itu sendiri juga merupakan faktor yang cukup signifikan dalam mendorong perkembangan kotanya (Branch, 1996 : 38-39). Kota Denpasar tidak hanya berfungsi dan berperan secara internal, melainkan juga sangat berperan dalam wilayah regional Bali bahkan mencapai wilayah propinsi lain. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kota Denpasar berperan sebagai Ibukota Propinsi Bali, sehingga merupakan pusat pelayanan fasilitas dan aktivitas skala lokal maupun regional yang secara absolut menyebabkan tingginya mobilitas manusia, barang, jasa, teknologi dan investasi.
2. Kedudukan strategis Kota Denpasar dalam konstelasi regional Propinsi Bali memiliki pengaruh langsung yang kuat kepada wilayah lain di sekitarnya, sehingga berperan sebagai pusat kegiatan berbagai sektor ekonomi.
3. Tingginya aksesibilitas yang dimiliki oleh Kota Denpasar melalui perhubungan darat, laut dan udara menyebabkan tingginya interaksi antara Kota Denpasar dengan kota-kota utama di propinsi Bali dan di luar Propinsi Bali. Keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung yang membuka akses langsung internasional, Pelabuhan Laut Benoa dan jaringan arteri Gilimanuk-Denpasar-Padangbai, akan mendukung dan menempatkan Denpasar berperan sebagai pusat pertumbuhan utama di Propinsi Bali dan sebagai salah satu "world cites" yang menjadi tujuan wisatawan internasional. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Kota Denpasar pada tahun 2000, yaitu mencapai 859.428 orang (Denpasar Dalam Angka, 2000 : 344).

Dengan adanya peran Denpasar sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Propinsi Bali serta berperan sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia, bahkan

memiliki hubungan langsung dengan kawasan-kawasan internasional, maka akan membawa dampak bagi perkembangan fisik dan aktivitas sosial ekonomi di Kota Denpasar itu sendiri, termasuk kota-kota lain di sekitarnya.

Perkembangan fisik dan aktivitas sosial ekonomi di Kota Denpasar seiring dengan penambahan jumlah penduduk dengan tingkat yang cepat dan pesat tersebut menuntut peningkatan pemenuhan kebutuhan ruang/lahan untuk menampung aktivitasnya. Secara ekonomi, lahan merupakan aset yang memiliki sifat kelangkaan (*scarcity*), khususnya pada lahan perkotaan ada indikasi harga dan nilainya semakin meningkat sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya akumulasi aktivitas secara terus menerus yang menuntut kebutuhan akan ruang hunian dan aktivitas fungsional kota lainnya semakin tinggi, padahal kota menghadapi kendala keterbatasan fisik dan semakin tingginya harga lahan. Akumulasi aktivitas spasial dan ekonomi yang meningkat serta pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan kota untuk menampung aktivitas serta menanggung segala dampak dari perkembangan kotanya. Akibatnya semakin meningkatnya beban kota dan kepadatan penduduk (Gilbert, 1959 : 9). Perkembangan kota yang semakin pesat mengakibatkan tekanan fisik, sosial, dan ekonomi pada ruang kota yang terbatas, sehingga perkembangan kota cenderung akan terjadi secara ekstensif, yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ke wilayah-wilayah pinggiran kota, sehingga akan memunculkan pusat aktivitas baru yang berciri perkotaan, yang disebut dengan proses suburbanisasi.

Selain pengaruh dari fenomena umum di atas, keterbatasan lahan perkotaan dan proses suburbanisasi di Kota Denpasar dipengaruhi pula oleh nilai-nilai budaya masyarakat Bali yang menjiwai kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai budaya tersebut memegang

peranan penting terhadap kurangnya atau menurunnya kemampuan Kota Denpasar untuk menampung pertumbuhan penduduk berikut aktivitasnya, sehingga menyebabkan ekstensifikasi perkembangan kota. Nilai-nilai budaya ini berkaitan dengan pola keruangan, sistem kemasyarakatan, serta sistem religi dan *upacara*-nya.

Berkurangnya kemampuan kapasitas/daya tampung optimal Kota Denpasar, ditambah lagi dengan adanya *intervening opportunities* yang mempengaruhi alternatif pemilihan lokasi untuk melakukan aktivitas di wilayah pinggiran kota, menyebabkan kecenderungan ekstensifikasi perkembangan kota menjadi semakin cepat, terlebih dengan adanya perkembangan kota-kota pusat pelayanan aktivitas di sekitarnya yang terkena dampak langsung dari perkembangan Kota Denpasar. Ekstensifikasi perkembangan Kota Denpasar ini berakibat pada peluasan kawasan perkotaan (*extended urban area*), dan pada gilirannya akan menyatukan ruang-ruang antar kota (aglomerasi kota-kota). Aglomerasi kota-kota tersebut membentuk suatu kawasan perkotaan yang lebih besar, yaitu Kawasan SARBAGITA (RTRW Propinsi Bali, 1996 dan RTRW Kota Denpasar, 1998).

Kawasan SARBAGITA adalah kawasan yang berada dalam satu sistem kota-kota di Propinsi Bali (Sistem Kota Bali Tengah) yang terdiri dari beberapa wilayah antara lain Kota Denpasar, sebagian Kabupaten Badung, sebagian Kabupaten Gianyar, dan sebagian Kabupaten Tabanan. Dalam identifikasinya, kota-kota yang termasuk dalam Kawasan SARBAGITA adalah kota-kota yang merupakan wilayah prioritas Bali Tengah dan merupakan kawasan cepat berkembang. Kota-kota tersebut adalah Kota Denpasar, kota-kota di Kecamatan Kuta, Mengwi, dan Abiansemal (Kabupaten Badung); kota-kota di Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, dan Ubud (Kabupaten Gianyar); serta kota-kota di Kecamatan Kediri dan Tabanan (Kabupaten Tabanan).

Berdasarkan identifikasi tersebut dan hasil analisis data statistikal, maka luas Kawasan SARBAGITA ini adalah 723,99 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2000 mencapai 1.171.812 jiwa. Prosentase laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya relatif tinggi yaitu 1,83 % (1990-2000).

Dari penjelasan di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan, karena terdapat beberapa hal spesifik dan unik yang terkait dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA. Fenomena ini terjadi karena adanya pengaruh budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu, yang memiliki kecenderungan menyebabkan semakin cepatnya ekstensifikasi perkembangan kota. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa kuatnya eksistensi budaya pada suatu kota, akan memberi pengaruh yang signifikan dalam proses perkembangannya, wujud struktur internal kotanya dan akan memberi dampak eksternal pada perkembangan wilayah atau kota-kota lain di sekitarnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Beranjak dari fenomena seperti yang telah diuraikan di atas, maka arah penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan : “ **Bagaimana keterkaitan aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA ?** “

## **1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi**

### **1.3.1 Tujuan**

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam kaitannya dengan perkembangan Kota Denpasar dan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA.

### 1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam aspek keruangan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Denpasar.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA.

### 1.3.3 Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari studi ini antara lain :

1. Secara akademis, sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang perkembangan kota dan fenomena suburbanisasi, dimana pengaruh budaya masyarakat setempat merupakan bahan pertimbangan yang cukup signifikan dalam membentuk pola dan struktur kota.
2. Sebagai studi awal untuk mengetahui dampak perkembangan Kota Denpasar yang menyebabkan terjadinya fenomena suburbanisasi, *extended urban area*, dan aglomerasi kota-kota di Kawasan SARBAGITA. Hal ini penting untuk diketahui, terlebih dengan adanya pengaruh budaya dalam memberi andil percepatan proses tersebut. Apabila kecenderungan ini terjadi, maka dapat diantisipasi lebih dini agar kawasan perkotaan yang terbentuk tidak merupakan suatu kota primat yang menghisap seluruh potensi sumberdaya di wilayah belakangnya. Selanjutnya akan dapat dilakukan pengkajian secara lebih cermat dan mendalam terhadap nilai-nilai budaya, sehingga keputusan secara arif dan bijaksana dapat diambil secara tepat sebagai langkah antisipatif dalam penanganan masalah perkotaan yang terkait dengan budaya masyarakatnya.

3. Bagi para penentu kebijakan/pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya, hal tersebut dapat dipakai sebagai suatu pertimbangan untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, dengan memantapkan strategi pengembangan kawasan secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, terintegrasi, dan komprehensif, sebelum kawasan perkotaan yang terbentuk tersebut terlanjur berkembang secara tidak terkendali.
4. Pada masing-masing kota yang memiliki kecenderungan perkembangan yang tinggi sebagai bagian dari kawasan perkotaan tersebut, dapat secara lebih cepat dan cermat mengatur strategi serta memantapkan pijakan pembangunan menuju kemandirian, sehingga nantinya tidak tergantung sepenuhnya pada pusat kawasan (Kota Denpasar).

## **1.4 Ruang Lingkup Studi**

### **1.4.1 Lingkup Substansial**

Batasan substansi yang akan dibahas dalam hal ini meliputi :

1. Suburbanisasi dilihat sebagai suatu proses yang mengakibatkan terjadinya pemekaran fisik/perluasan kawasan perkotaan (*extended urban area*) dan memiliki implikasi terhadap penyatuan ruang-ruang antar kota (aglomerasi kota-kota).
2. Suburbanisasi adalah proses terbentuknya kawasan terbangun di wilayah pinggiran yang didorong oleh adanya perpindahan penduduk ke wilayah pinggiran, baik perpindahan penduduk dalam satu wilayah kota (dari pusat kota ke wilayah pinggiran), yang disebut pula dengan mobilisasi pemukiman, maupun pergerakan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Jadi suburbanisasi hanya ditinjau sebagai suatu proses pengkotaan pada wilayah pinggiran terbatas dalam hal perkembangan fisiknya.

3. Terjadinya proses suburbanisasi ditinjau sebagai akibat dari faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan penduduk berikut aktivitasnya, keterbatasan lahan perkotaan, dan pengaruh dari aspek budaya masyarakat Bali.
4. Aspek budaya masyarakat Bali adalah integrasi dari kebudayaan dan keagamaan, dalam hal ini Agama Hindu, yang sudah mengakar dan merupakan landasan bagi kehidupan masyarakatnya (*living culture*).
5. Aspek budaya masyarakat Bali dalam hal ini ditinjau dari sisi nilai-nilai budaya masyarakat yang dijiwai oleh Agama Hindu dalam aspek keruangan. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu *Tattwa*, *Susila*, dan *Upacara*. Perwujudan atau dimensi keruangan dari ketiga kerangka dasar ini adalah perwujudan budaya masyarakat Bali dalam (a) pola tata ruang tradisional (perwujudannya dalam arah orientasi ruang, lingkungan desa dan kota, pekarangan, dan dalam tata bangunan), (b) sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan dan *desa pekraman/desa adat*), serta (c) sistem religi, upacara agama, dan upacara adat. Ketiga perwujudan tersebut akan mempengaruhi pola-pola keruangan baik dalam lingkup mikro maupun makro.

#### 1.4.2 Lingkup Spasial

Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah daerah-daerah di wilayah pinggiran Kota Denpasar dalam lingkup Kawasan SARBAGITA. Daerah-daerah ini dibatasi hanya pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik : (a) kecenderungan perkembangan yang pesat, (b) terkena dampak dan pengaruh langsung *extended urban area* Kota Denpasar, (c) berbatasan langsung dengan Kota Denpasar atau berada dalam radius pengaruh Kota Denpasar, dan (d) berada pada jalur utama transportasi yang menghubungkan antar kota dalam Kawasan SARBAGITA.

Daerah-daerah tersebut adalah dalam lingkup batas administrasi wilayah desa/kelurahan (secara visual disajikan dalam gambar 1.3 dan 1.4), yaitu meliputi :

1. Kecamatan Kuta : Desa/Kelurahan Tuban, Kuta, Kerobokan, dan Dalung.
2. Kecamatan Mengwi : Desa/Kelurahan Sempidi, Lukluk, Kapal, dan Mengwitani.
3. Kecamatan Abiansemal : Desa/Kelurahan Darmasaba dan Sibanggede.
4. Kecamatan Sukawati : Desa/Kelurahan Batubulan dan Batubulan Kangin.
5. Kecamatan Kediri : Desa/Kelurahan Abian Tuwung, Kediri, dan Banjar Anyar.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini berpijak pada isu yang menyangkut tentang terjadinya fenomena urbanisasi yang tinggi di Kota Denpasar. Fenomena tersebut memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan kotanya, terutama pada aglomerasi aktivitas sosial dan ekonomi.

Selain akibat dari dikotomi antara faktor pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, suburbanisasi yang terjadi di Kota Denpasar juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat Bali. Pengaruh budaya ini menyebabkan terjadinya perkembangan Kota Denpasar secara ekstensif, karena adanya batasan-batasan budaya dalam pemanfaatan ruang kota. Perkembangan kota secara ekstensif itu sendiri memiliki konsekuensi logis pada peningkatan *extended urban area* yang berakibat pada terjadinya penyatuan ruang-ruang antar kota (aglomerasi kota-kota) membentuk kawasan perkotaan yang lebih luas (Kawasan SARBAGITA), sehingga secara tidak langsung aspek budaya tersebut memiliki pengaruh terhadap proses suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA.

Selengkapnya, kerangka pemikiran penelitian ini secara diagramatis digambarkan dalam gambar 1.5 di bawah ini.









MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

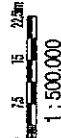
ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA

PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
KOTA DENPASAR, KAB. BADUNG,  
KAB. GIANYAR, DAN KAB. TABANAN

LEGENDA :

-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  KOTA DENPASAR
-  KAB. BADUNG
-  KAB. GIANYAR
-  KAB. TABANAN

SILAU PETA



UTARA



SUMBER PETA DASAR :

RTRW Propinsi Bali

NO. PETA  
1.3

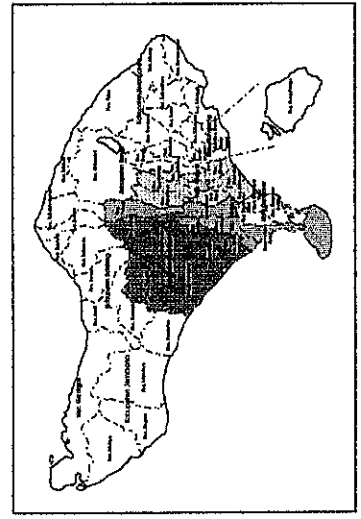
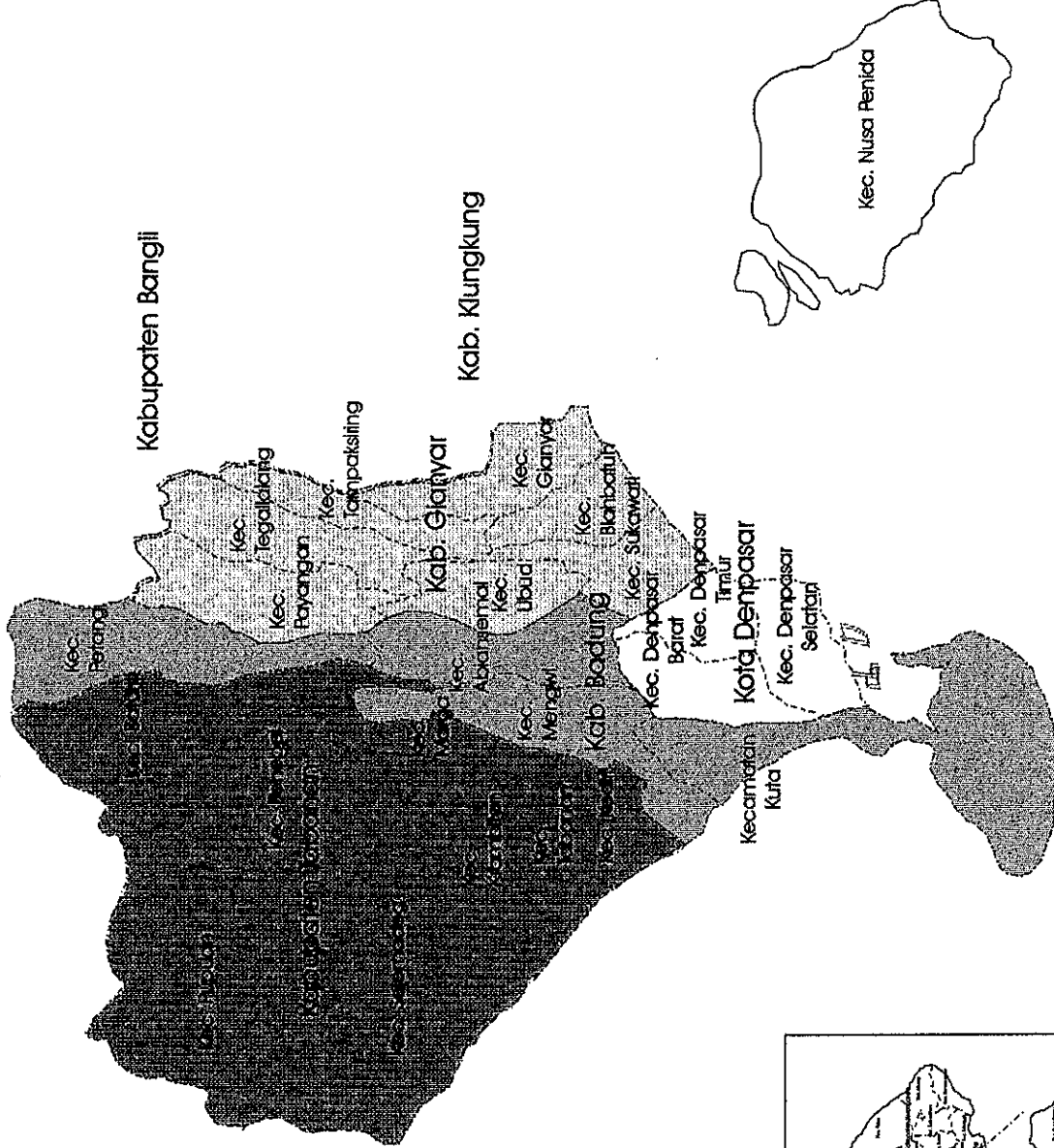
HALAMAN  
15

Kabupaten Buleleng

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Bangli

Kab. Klungkung





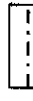
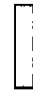


MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# TESIS

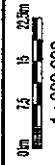
ASPEK BIDANG MASYARAKAT BALI DALAM  
PENYERAJAAN SIBERANASATI KAWASAN SARBAGITA

## PETA KAWASAN SARBAGITA DAN UNIT ANALISIS

LEGENDA :

-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  KAWASAN SARBAGITA
-  UNIT ANALISIS

SKALA PETA



UTARA

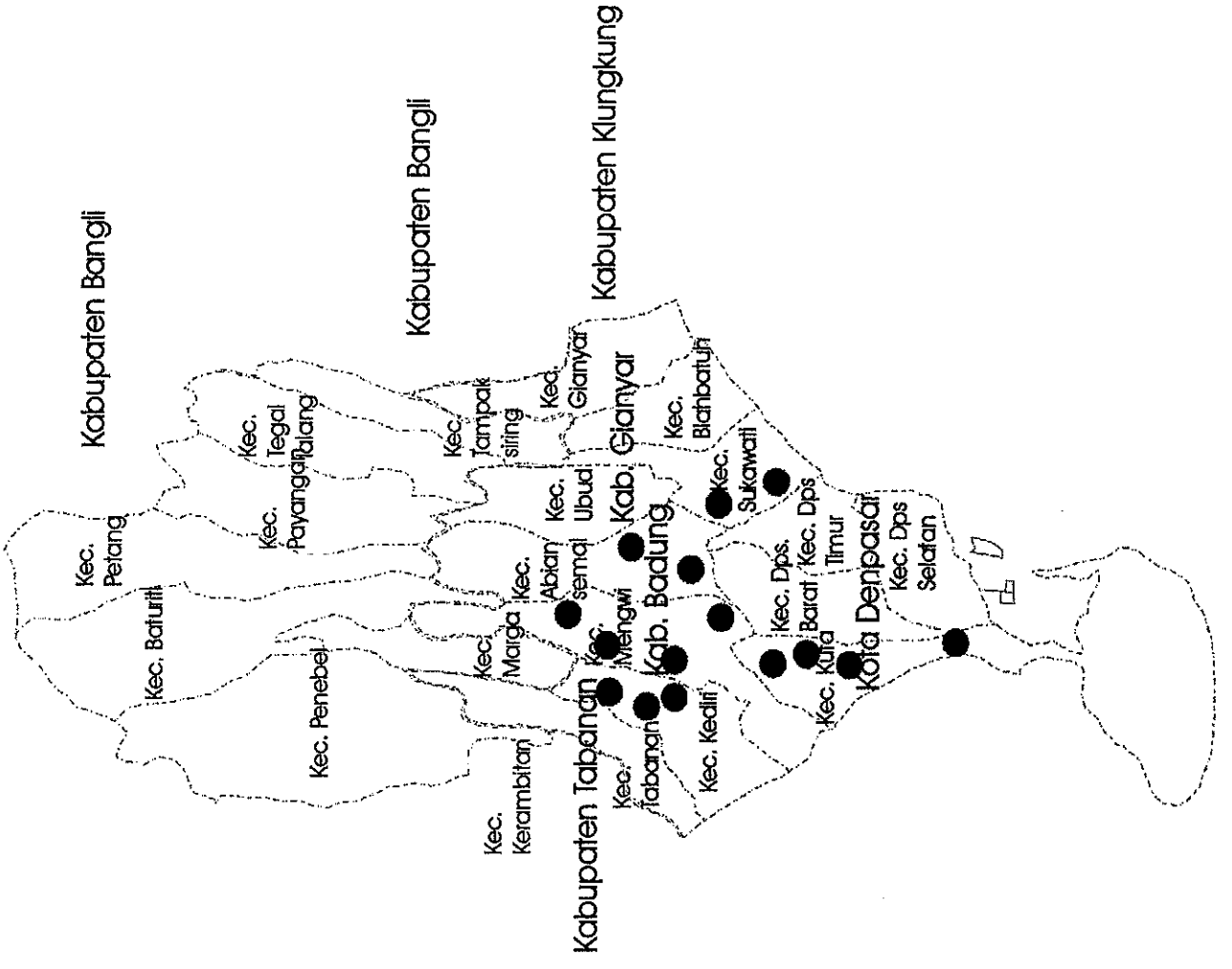
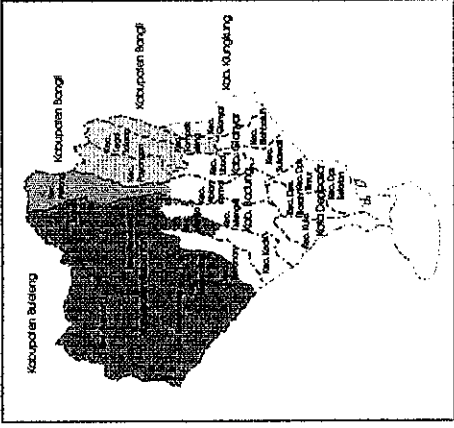


SUMBER PETA DASAR :

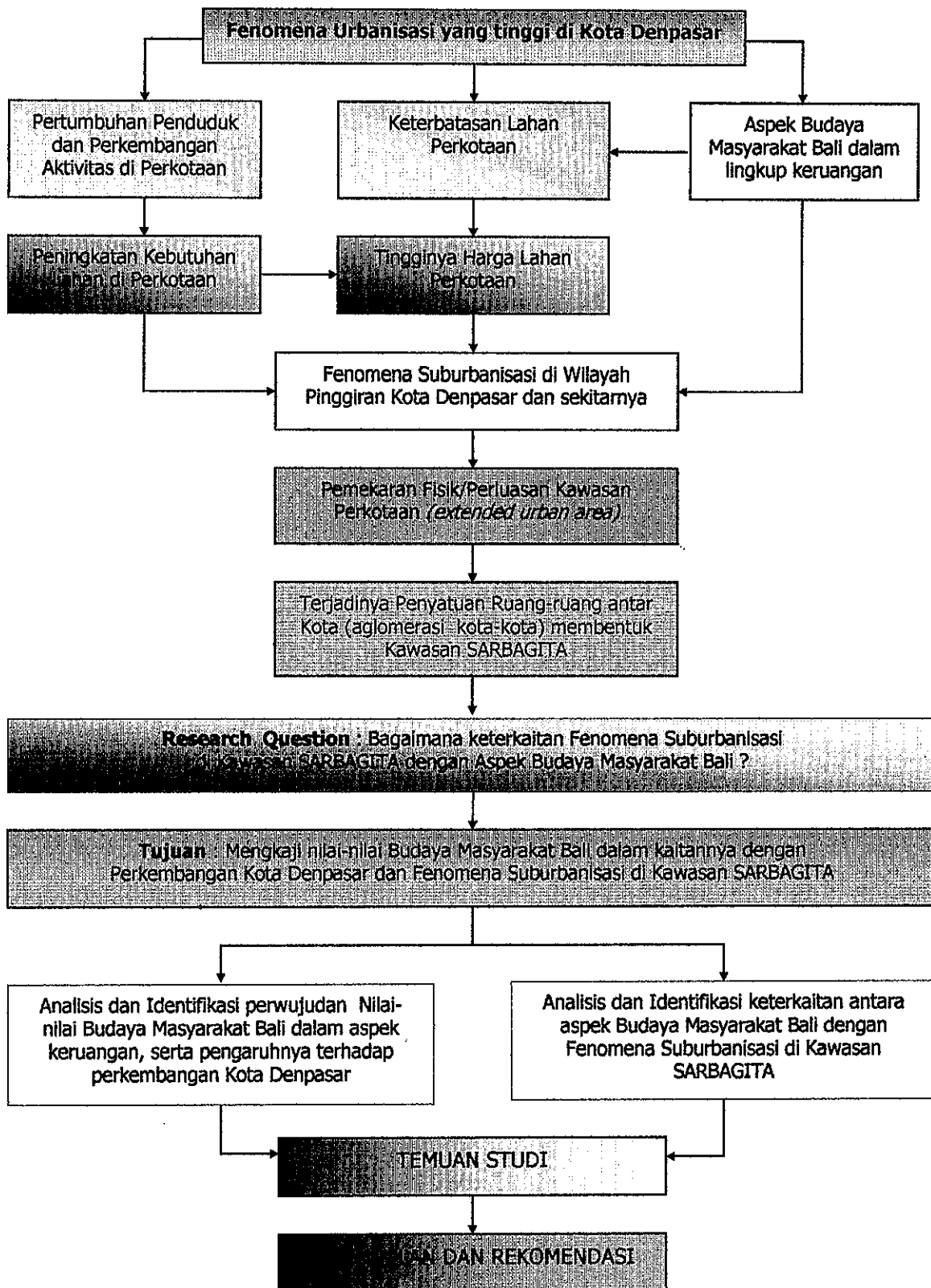
RTRW Propinsi Bali

NO. PETA HALAMAN

1.4 16



GAMBAR 1.5  
DIAGRAM KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Studi

Pendekatan studi yang dilakukan adalah dengan pendekatan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana hasil dari kedua pendekatan tersebut akan disintesakan secara deskriptif untuk mengetahui keterkaitan aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini dilakukan dengan mengeksplorasi pandangan/pendapat dari nara sumber berupa pakar/cendekiawan Hindu yang memiliki eksistensi tinggi terhadap budaya masyarakat Bali, yaitu terdiri dari unsur-unsur : (a) Lembaga/organisasi Hindu, antara lain Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Pembinaan Lembaga Adat (MPLA), (b) Tokoh Masyarakat, antara lain Pemimpin Desa Adat (*Bendesa Adat*) dan Pemuka Agama (*Sulinggih dan Pemangku*), serta (c) unsur Akademis. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam kaitannya dengan keruangan dan implikasinya terhadap perkembangan Kota Denpasar.

#### 2. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi keterkaitan antara fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA dengan aspek budaya masyarakat Bali.

### 1.6.2 Metode Analisis

Berdasarkan sasaran penelitian dan pendekatan studi di atas, metode analisis yang akan dilakukan adalah :

1. Analisis perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam aspek keruangan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Denpasar.

Analisis ini diawali dengan melakukan kajian teoritis untuk memperoleh suatu kerangka teoritis yang akan dipakai sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan para pakar/cendekiawan Hindu. Wawancara tersebut dilakukan secara terstruktur dan mendalam (*depth interview*). Proses analisisnya dilakukan dengan pendekatan Metode Analisis Kualitatif. Penggunaan metode analisis ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Moleong (2000), bahwa pada penelitian kualitatif teori dibatasi pada pengertian sebagai suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji kembali secara empiris. Hasil yang diharapkan dari keseluruhan proses analisis ini adalah untuk mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam kaitannya dengan keruangan dan implikasinya terhadap perkembangan Kota Denpasar.

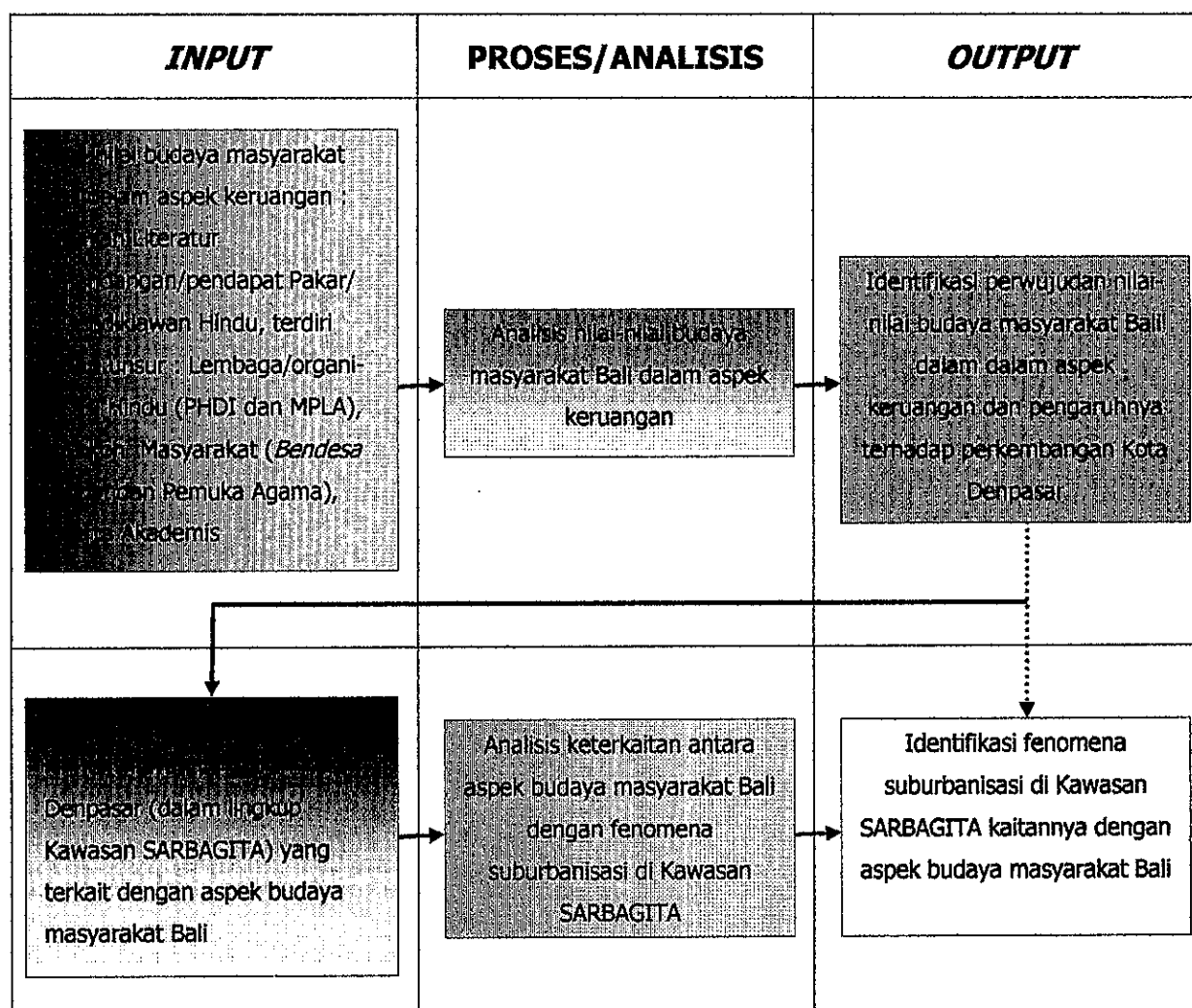
2. Analisis keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA.

Hasil analisis kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya, akan dipergunakan sebagai dasar atau *input* data yang diterjemahkan dalam bentuk kuisioner tentang preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar dalam kaitannya dengan aspek budaya masyarakat Bali. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi keterkaitan antara aspek budaya tersebut dengan fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA.

Pendekatan analisis yang dilakukan adalah pendekatan Analisis Kuantitatif melalui Metode Analisis *Crosstabulation*. Data-data yang akan dikaji dan dianalisis dengan metode ini adalah data tentang keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar (sebagai perwujudan dari fenomena suburbanisasi), yang diperoleh dari kuisioner.

Secara diagramatis, metode analisis tersebut digambarkan dalam bentuk kerangka analisis seperti pada gambar berikut ini :

GAMBAR 1.6  
DIAGRAM KERANGKA ANALISIS



Sumber : Hasil Identifikasi, 2002

### 1.6.3 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Data primer berupa pandangan/pendapat nara sumber berupa pakar/cendekiawan Hindu, yaitu terdiri dari unsur : (a) Lembaga/organisasi Hindu (PHDI dan MPLA), (b) Tokoh-tokoh masyarakat (*Bendesa Adat* dan Pemuka Agama), serta (c) unsur Akademis. Selain itu, data primer yang dibutuhkan adalah data tentang preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar kaitannya dengan aspek budaya masyarakat Bali dalam aspek keruangan.
2. Data sekunder berupa data karakteristik Kawasan SARBAGITA. Data ini bersifat series dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 2000.

### 1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan survai data primer dan survai data sekunder. Penjelasannya sebagai berikut :

#### A. Survai Data Primer

Survai ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak didapatkan dari data sekunder, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dan mendalam (*depth interview*), sebagai upaya memperjelas dan mengkaji secara lebih mendalam kerangka teoritis yang telah dirumuskan berdasarkan kajian literatur. Selain itu, wawancara bermanfaat untuk memperkaya dan mendukung analisis yang akan dilakukan, serta sebagai dasar dalam penyusunan kuisisioner. Wawancara juga bermanfaat untuk mengantisipasi kesalahan pemahaman dan penafsiran (interpretasi) atas rancangan data

yang ada, serta memperoleh data/masukan lainnya yang terkait dengan tujuan dan sasaran penelitian. Dalam kaitan ini, wawancara dilakukan kepada para pakar/cendekiawan Hindu.

## 2. Kuisisioner

Digunakan untuk memperoleh informasi/pendapat langsung dari masyarakat Hindu Bali yang bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar (di luar rumah asal/*umah tua*-nya), mengenai preferensi dan pertimbangan mereka bermukim di wilayah tersebut terkait dengan aspek budaya masyarakat Bali. Hasil kuisisioner ini akan dirumuskan untuk mengidentifikasi kaitan antara aspek budaya tersebut dengan fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA.

## B. Survei Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan :

1. Survei pengumpulan data yang terkait dengan karakteristik Kawasan SARBAGITA. Data ini bersifat series dalam kurun waktu tahun 1993 sampai tahun 2000. Penggunaan data dari tahun 1993, karena Kota Denpasar baru terbentuk tahun 1992 (UU. Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar), dan penetapan Kawasan SARBAGITA (menurut RTRW Propinsi Bali) adalah tahun 1995, walaupun Peraturan Daerahnya baru ditetapkan tahun 1996 (Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang RTRW Propinsi Bali). Sedangkan alasan penggunaan data sampai tahun 2000, karena data tahun terakhir yang tersedia adalah tahun 2000. Data ini dipergunakan untuk mendeskripsikan karakteristik wilayah studi sehingga diperoleh suatu gambaran wilayah yang diteliti. Selain itu, data ini juga digunakan untuk menentukan *area* sampling berdasarkan karakteristik/kriteria yang telah ditentukan.

2. Studi literatur dari sejumlah dokumen dan laporan terkait (berkaitan dengan perkembangan kota-kota dalam Kawasan SARBAGITA, fenomena suburbanisasi, serta nilai-nilai budaya masyarakat Bali) yang telah disusun oleh instansi terkait.

### 1.6.5 Teknik Sampling

Metode sampling diperlukan untuk penyebaran kuisioner yang ditujukan pada masyarakat di wilayah pinggiran kota dalam konteks Kawasan SARBAGITA. Sampling ini dilakukan mengingat luasnya wilayah penelitian (59.621 ha dengan 9 kecamatan dan 82 desa/kelurahan), besarnya populasi (649.431 jiwa), serta keterbatasan waktu, tenaga dan dana yang dimiliki dalam penelitian ini.

Teknik sampling yang akan digunakan dan dianggap cocok dalam melakukan penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik ini mengasumsikan bahwa tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel (Nawawi, 2001 : 156-157; Narbuko dan Achmadi, 2001 : 114). Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan responden hanya anggota masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Hindu Bali yang tinggal di luar rumah asal/*umah tua*-nya.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan disurvei pada keseluruhan unit analisis tersebut dipergunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan metode Slovin (Singaribuan, 1986 : 106) dan Metode Nawawi (Nawawi, 2001 : 149-151). Hasil dari kedua pendekatan ini akan dipilih hasil perhitungan ukuran/jumlah sampel yang tertinggi untuk mengeliminir tingkat kesalahan. Kedua metode tersebut adalah :

#### 1. Metode Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(a)^2} \quad (1)$$

Dimana :

- n = Jumlah sampel  
 N = Jumlah populasi (penduduk di unit analisis = 126.387 jiwa)  
 a = *Cross estimate*/persentase kesalahan (10 % atau 0,1)

Berdasarkan metode ini jumlah sampel adalah 100 responden

## 2. Metode Nawawi

$$n \geq p q \left( \frac{z_{1/2\alpha}}{b} \right)^2 \quad (2)$$

Dimana :

- n = Jumlah sampel minimum  
 p = Proporsi populasi persentase kelompok pertama  
 q = Proporsi sisa di dalam populasi (1,00 - p)  
 $z_{1/2\alpha}$  = Derajat koefisien konfidensi pada 99 % atau 95 %  
 b = Persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan ukuran sampel

Dalam konteks penelitian ini, maka :

Jumlah penduduk di wilayah pinggiran Kota Denpasar = 649.431 jiwa

Jumlah penduduk unit analisis = 126.387 jiwa

$$p = \frac{126.387}{649.431} \times 100 \% = 19,46 \% \text{ atau } 0,195$$

$$q = 1,00 - p = 0,805$$

$$z_{1/2\alpha} = 1,96 \text{ (pada derajat konfidensi } 95 \% \text{ atau } 0,05)$$

$$b = 10 \% \text{ atau } 0,1$$

Berdasarkan metode ini jumlah sampel adalah 60 responden.

Dari perhitungan jumlah sampel dengan kedua metode tersebut di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sampel tertinggi, yaitu 100 responden. Distribusi sampel pada masing-masing desa/kelurahan dalam unit analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1  
DISTRIBUSI SAMPEL PADA MASING-MASING DESA/KELURAHAN  
DALAM LINGKUP SPASIAL PENELITIAN

NO	DESA/KELURAHAN	PROSES PERHITUNGAN (Jml Pdd/Jml Populasi) x Jml Sampel	JUMLAH RESPONDEN
1.	Tuban	$(15.060/126.387) \times 100$	12
2.	Kuta	$(18.499/126.387) \times 100$	15
3.	Kerobokan	$(17.052/126.387) \times 100$	13
4.	Dalung	$(8.048/126.387) \times 100$	6
5.	Sempidi	$(4.712/126.387) \times 100$	4
6.	Lukluk	$(4.956/126.387) \times 100$	4
7.	Kapal	$(9.637/126.387) \times 100$	8
8.	Mengwitani	$(1.513/126.387) \times 100$	1 atau 2
9.	Darmasaba	$(4.850/126.387) \times 100$	4
10.	Sibang Gede	$(4.232/126.387) \times 100$	3
11.	Batubulan	$(10.921/126.387) \times 100$	9
12.	Batubulan Kangin	$(4.933/126.387) \times 100$	4
13.	Abian Tuwung	$(7.879/126.387) \times 100$	6
14.	Kediri	$(6.586/126.387) \times 100$	5
15.	Banjar Anyar	$(7.509/126.387) \times 100$	6
<b>Jumlah</b>			<b>101</b>

Sumber : Hasil Identifikasi, 2002

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk bab. Setiap bab memegang peranan tersendiri sebagai bagian dari satu kesatuan materi penelitian yang diharapkan tersusun secara sistematis. Bab-bab tersebut adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengungkapkan tentang latar belakang pemilihan tema penelitian berikut rumusan permasalahannya, tujuan, sasaran dan manfaat studi yang ingin dicapai, ruang lingkup substansial dan spasial penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN LITERATUR TENTANG SUBURBANISASI DAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM LINGKUP KERUANGAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang studi literatur/pustaka dengan melakukan kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui kajian ini akan dirumuskan kerangka teoritis yang dipakai sebagai suatu *guideline* dan acuan dalam seluruh pelaksanaan penelitian.

### **BAB III KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN SARBAGITA**

Kajian umum Kawasan SARBAGITA ini adalah suatu kajian terhadap kondisi dan karakteristik yang mendukung fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA. Kajian ini bersifat deskriptif, dengan menguraikan hasil kajian dalam bentuk tabel, gambar, grafik, dan peta.

#### **BAB IV ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA**

Bab ini menyangkut tentang proses analisis yang dilakukan. Proses analisis tersebut berkaitan dengan analisis dan identifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Denpasar, serta analisis dan identifikasi keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA. Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang temuan-temuan studi yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bagian ini memuat suatu kesimpulan yang menguraikan tentang temuan studi, serta untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Dari keseluruhan proses tersebut, selanjutnya akan disusun suatu rekomendasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR TENTANG SUBURBANISASI DAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM LINGKUP KERUANGAN**

#### **2.1 Perkembangan Kota dan Suburbanisasi**

##### **2.1.1 Faktor-faktor Perkembangan Kota**

Pada umumnya, perkembangan suatu kota tidak hanya ditandai oleh peningkatan jumlah dan aktivitas penduduknya, tetapi juga dapat dilihat dari perubahan fisiknya. Perkembangan kota merupakan fungsi dari keadaan penduduk dengan berbagai aktivitas di daerah sekitarnya (Balchin dan Kieve, 1982 : 54). Kota adalah pusat perkembangan dalam suatu wilayah, dimana pusat tersebut tumbuh dan berkembang lebih pesat dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya. Perkembangan kota itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa aspek yang dapat menunjukkan atau menentukan perkembangan perkotaan (Friedmann dan Alonso, 1964 : 4-5), yaitu :

1. Perkembangan penduduk kota menunjukkan pertumbuhan dan intensitas kegiatan kota.
2. Kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh kota dapat menunjukkan adanya tingkat pelayanan pada masyarakatnya.
3. Tingkat investasi kota dimana hal ini dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan kota yang dapat dicapai dengan adanya tingkat ekonomi yang tinggi.

Perkembangan kota tersebut terjadi dimulai dengan adanya perkembangan pada kawasan pusat kota dengan proses perkembangannya adalah (Gilbert, 1959 : 9-10) :

1. Proses aglomerasi penduduk yang terjadi karena adanya migrasi penduduk dari desa ke kota yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan akses yang lebih mudah ke pusat kota. Perkembangan tersebut lebih cepat daripada kesiapan

kota untuk mengakomodasikannya, sehingga cenderung menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

2. Proses perkembangan fisik kawasan ke arah suatu kawasan kota merupakan konsekuensi dari perkembangan yang pesat di pusat kota, sehingga perubahan lokasi yang dekat dengan pusat kota dinilai menguntungkan serta tuntutan kriteria lahan yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan kota tidak sama dan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan pula.
3. Pemanfaatan lahan dengan kepadatan tinggi, yaitu adanya kecenderungan global perkotaan dimana penduduk kota yang semakin meningkat yang menyebabkan terjadinya perluasan dan pemekaran kawasan kota ke pinggiran kota karena sesaknya kawasan pusat kota, menyebabkan terjadinya konversi guna lahan di kawasan pinggiran. Konversi tersebut bukan hanya dalam bentuk perumahan, namun juga fasilitas pendukung dan infrastruktur kegiatan penduduk tersebut seperti sarana sosial, ekonomi, jalan, utilitas, dan kelengkapan kawasan/lingkungan lainnya.

Tingkat perkembangan pada setiap kota berbeda, tergantung pada faktor-faktor perkembangannya. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai potensi internal dan eksternal (Sujarto, 1989 : 10). Kondisi dan potensi internal meliputi aktivitas sosial-ekonomi, kependudukan dan perkembangannya, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur, serta perubahan-perubahan yang ada didalamnya. Sedangkan kondisi dan potensi eksternal berkaitan dengan perkembangan ekonomi daerah *hinterland*-nya dan interaksi antara kota dengan kota-kota atau wilayah-wilayah disekitarnya (Mawardi, 1998 : 25).

Lebih lanjut Branch (1996) menjelaskan, bahwa kriteria untuk mengetahui kemampuan perkembangan kota adalah dari potensi yang dimilikinya. Potensi yang sangat berperan adalah kedudukan kota dalam konstelasi regional. Kota yang memiliki lokasi

geografis yang strategis dan mempunyai daerah *hinterland* yang kuat dalam arti ekonomi, cenderung lebih cepat tumbuh dan berkembang daripada kota yang terisolir. Selain itu juga tergantung dari kemampuannya untuk menciptakan dan menarik sumberdaya produktif dari luar yang dibutuhkan untuk perkembangan kotanya, serta kemampuan kota untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar regional, nasional dan internasional.

Hal tersebut ditegaskan oleh Richardson (1971), bahwa perkembangan kota di suatu wilayah ditentukan oleh tingkat pertumbuhan populasi, investasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Perkembangan kegiatan ekonomi makro dan aglomerasi ekonomi menyebabkan kota memiliki tingkat produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Lynch (1987) menyebutkan, terbentuknya kota-kota banyak ditentukan oleh munculnya penghuni, instansi yang menangani kota, pengembang, investor, peraturan, perusahaan utilitas, dan sebagainya. Beberapa aspek di atas kadang-kadang sedemikian dominannya, sehingga mempengaruhi kecepatan perkembangan kota. Sedangkan Karyoedi (1987) mengemukakan bahwa perkembangan kota di suatu wilayah ditentukan oleh kondisi dan potensi kota yang dikelompokkan ke dalam tiga faktor, yaitu :

1. Faktor yang merupakan modal dasar : lahan, penduduk, dan sumber dana kota
2. Faktor penunjang yang merupakan fungsi primer : kegiatan industri dan jasa komersial yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dan mendukung pemanfaatan sumberdaya alam wilayah sekitarnya.
3. Faktor penunjang yang merupakan fungsi sekunder atau faktor pembentuk struktur internal kota : prasarana kota, perumahan dan permukiman, fasilitas pelayanan umum, dan tenaga kerja.

Perkembangan ekonomi yang ditunjang oleh teknologi transportasi telah memperpendek jarak dan waktu tempuh antar lokasi, dan pada gilirannya akan mendorong perkembangan kota. Firman (1996) mengemukakan, bahwa walaupun banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, namun faktor utamanya adalah fungsi ekonomi, sedangkan ekonomi itu sendiri akan berubah atas waktu. Sehingga perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan ekonomi, atau dengan kata lain perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi.

Dalam tulisannya tentang Manajemen Perkotaan Indonesia, Kusbiantoro (1993) menyebutkan bahwa kepesatan perkembangan wilayah perkotaan, selain ditandai dengan perluasan wilayah terbangun yang meluber ke luar batas administrasi suatu kota, juga akan dicirikan oleh pertumbuhan sektor sekunder dan tersier yang pesat dan memiliki nilai tambah relatif tinggi dibanding sektor primer. Pada gilirannya, perkembangan sektor perkotaan tersebut akan memberikan sumbangan besar terhadap PDRB serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun perlu diwaspadai, bahwa proses pertumbuhan yang pesat tersebut akan membawa konsekwensi dalam hal kemampuan kota dalam mengakomodasi dan menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dari pertumbuhan tersebut. Paling tidak setiap tahun harus terciptakan kegiatan yang dapat menampung pertambahan angkatan kerja sekitar 1,5 juta jiwa, penyediaan sekitar 600.000 bangunan rumah, serta pengadaan fasilitas dan pelayanan bagi penduduk sejumlah 3 juta jiwa. Padahal seperti yang kita sadari ketersediaan maupun kapasitas berbagai sumberdaya perkotaan jelas semakin terbatas.

### 2.1.2 Masalah Perkembangan Kota

Menurut Hanafie (1996), pertumbuhan penduduk kota dan perkembangan aktivitasnya dapat membawa akibat negatif terhadap lingkungan perkotaan. Lingkungan tersebut bukan saja lingkungan fisik atau permukiman, namun juga kondisi fasilitas dan utilitas perkotaan, seperti perumahan, penyediaan air bersih, pembuangan limbah (industri maupun rumah tangga), pelayanan kesehatan, serta pendidikan dan ruang terbuka. Sujarto (1990) menambahkan, masalah fisik kota tersebut adalah terutama dalam hal penggunaan ruang, sedangkan masalah non fisiknya berkaitan dengan lemahnya pengelolaan, pelaksanaan peraturan dan ketertiban hukum, dampak sosial budaya, dan kondisi sosial psikologis bagi penduduknya. Firman (1991) melengkapi dengan mengemukakan bahwa masalah perkotaan adalah terutama menyangkut masalah perekonomiannya. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kota meliputi kelangkaan infrastruktur, peraturan-peraturan yang kurang menunjang efisiensi penanaman modal, lemahnya kelembagaan pemerintah kota, dan lemahnya *financial service* untuk pengembangan kota. Sedangkan Marbun (1988) menyoroti masalah perkotaan yang dapat menyebabkan pergerakan penduduk ke arah pinggiran kota, antara lain adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi, masalah perumahan, masalah transportasi, serta masalah lingkungan hidup dan pencemaran di kota.

Pertambahan penduduk kota yang cepat disamping memberikan tekanan terhadap berbagai fasilitas kota, juga mempunyai pengaruh terhadap perimbangan antara penawaran tenaga kerja dan kesempatan kerja, serta perkembangan sektor informal perkotaan yang merupakan masalah tipikal Indonesia. Pembangunan kota di masa mendatang bukan hanya menyangkut *urban development*, namun juga harus meliputi *municipal development* (Firman, 1991 : 9). Secara spesifik Mawardi (1998) mengemukakan, untuk kota-kota di

Indonesia, beberapa isu yang sangat relevan dalam konteks tersebut antara lain : pengelolaan pertanahan, penggalian sumber dana pembangunan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kontrol perkembangan fisik kota, pengelolaan dan pengadaan prasarana kota, peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat, peraturan-peraturan yang menunjang pembangunan kota, dan peningkatan kemampuan teknis aparaturnya.

Pada dasarnya kota dapat berkembang secara alami, namun jika kurang mendapat perhatian pemerintah, kota-kota tersebut akan tumbuh dan berkembang secara semrawut karena tidak adanya keserasian dengan fungsinya. Di negara-negara dunia ketiga, pemerintah kota gagal mengelola kota-kota mereka secara baik, dan pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan dan infrastruktur kepada penduduknya. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa perkembangan kota yang pesat menuntut adanya pengelolaan yang perlu melibatkan berbagai pihak (Gilbert, 1959 : 11).

### 2.1.3 Proses Suburbanisasi

Suburbanisasi merupakan salah satu proses perkembangan kota. Menurut definisinya, suburbanisasi adalah proses terbentuknya kawasan terbangun di wilayah pinggiran sebagai akibat dari ekstensifikasi perkembangan kota. Perkembangan wilayah pinggiran ini didorong oleh adanya perpindahan penduduk ke wilayah pinggiran, yang disebut migrasi *intraurban* yaitu perpindahan penduduk dalam satu wilayah kota dan disebut pula dengan mobilisasi pemukiman. Hal ini berkaitan erat pula dengan pergerakan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan (Bourne, 1982 : 53).

Umumnya proses ini terjadi karena adanya *urban crisis* akibat dari masalah perkembangan kota, serta kemunduran lingkungan dan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Gilbert (1959), terjadinya proses suburbanisasi adalah :

*As in the cause of time, living in town loses its attraction, the urban climate beginning to deteriorate because of the quality of housing and environment declines while incomes grow through increasing productivity especially in the industrial sector, making commuting less prohibitive many townspeople, will come to prefer a residence a bit further from the town center that is the beginning of suburbanization*

Dengan tumbuh dan berkembangnya wilayah pinggiran akibat suburbanisasi, maka akan diikuti oleh proses redistribusi kegiatan ekonomi dari kota induk ke wilayah pinggiran kota, sehingga terjadinya fenomena pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah tersebut (Aurihan Dj, 2000 : 2). Yates dan Garners (1979) mengemukakan, bahwa pada umumnya pertumbuhan wilayah pinggiran kota mempunyai dua ciri utama, yaitu :

1. Terbentuknya suatu pola tata ruang wilayah *suburban sprawl*, yang disebabkan oleh lemahnya kontrol pemerintah dalam kebijaksanaan tata ruang, sehingga perkembangan pembangunannya cenderung tidak terarah dan sesuai dengan keinginan investor/swasta.
2. Ketergantungan wilayah pinggiran yang baru tumbuh tersebut kepada pusat kota.

Sedangkan menurut Whyne-Hammond (1979), tumbuhnya wilayah pinggiran kota disebabkan oleh :

1. Meningkatnya pelayanan transportasi kota memudahkan orang untuk bertempat tinggal jauh dari tempat kerjanya. Kemudahan di bidang transportasi ini juga mendorong kegiatan-kegiatan perkotaan seperti industri untuk menempati wilayah pinggiran.
2. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah pinggiran kota dengan pesat, disebabkan arus migrasi penduduk yang berasal dari pusat kota ke bagian pinggirannya dan masuknya penduduk baru dari daerah *hinterland* atau pedesaan.

3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, dimana dengan peningkatan tiap individu tersebut memungkinkan orang mendapatkan perumahan yang lebih baik, dan mengecilnya jumlah anggota keluarga juga membantu memencarkannya dengan mudah.
4. Dorongan untuk mendapatkan lingkungan baru yang lebih nyaman, sejuk, dan jauh dari kebisingan serta polusi yang kerap terjadi di perkotaan, menyebabkan masyarakat terutama golongan menengah ke atas memilih bertempat tinggal di wilayah pinggiran.
5. Gerakan pendirian bangunan pada masyarakat yang dibantu oleh pemerintah, sehingga lebih memudahkan pemilikan rumah di luar kota.

#### 2.1.4 Perluasan Kawasan Perkotaan (*Extended Urban Area*)

Pemekaran fisik/perluasan kawasan perkotaan merupakan ekspansi konsentrasi kota yang meliputi konversi lahan di wilayah pinggiran dari penggunaan lahan bukan perkotaan menjadi penggunaan lahan perkotaan. Pemekaran perkotaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu (Yunus, 2001 : 127) :

1. Pemekaran fisik, merupakan perluasan dari pembangunan fisik kota yang terjadi karena pembangunan jalan utama yang kemudian membentuk penggunaan lahan yang berbeda di sepanjang jalan tersebut, ataupun pengadaan aktivitas yang bersifat *perkotaan* di wilayah pinggiran seperti : komersial, perumahan, pendidikan, industri, dan sebagainya.
2. Pemekaran teknologi, merupakan pemekaran yang terjadi karena pengadaan berbagai sarana yang modern seperti pipa saluran gas, telepon, dan sebagainya.

Pemekaran kawasan perkotaan pada umumnya disebabkan karena adanya *urban crisis* serta kemunduran lingkungan dan sosial. Proses ini dimulai dengan adanya faktor pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan adanya keterbatasan lahan perkotaan untuk

menampung aktivitas penduduk tersebut. Tingginya akumulasi aktivitas masyarakat yang cenderung terfokus di pusat kota, dalam beberapa dekade ini secara langsung dipengaruhi pula oleh arus mobilitas penduduk yang terus meningkat ke kota induk. Fenomena tersebut berdampak pada semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk di pusat kota. Tingginya mobilitas penduduk ini di sisi lain tidak diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan manajemen pemerintah kota secara cepat untuk memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat. Indikasi tersebut ditandai oleh tingginya permintaan lahan yang keberadaannya cenderung terbatas, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan untuk permukiman melalui penggunaan lahan yang sembarangan. Perkembangan yang tidak diimbangi oleh kesiapan kota untuk menampung aktivitas dan menanggung segala dampak dari perkembangan kota (Gilbert, 1959 : 9), akan mendorong terjadinya perluasan fisik kawasan perkotaan keluar dari pusat kota (*extended urban area*), yang pada akhirnya menyebabkan berkembangnya wilayah-wilayah pinggiran kota. Fenomena *extended urban area* ini merupakan pemicu terjadinya penyatuan ruang-ruang antar kota pusat dengan kota-kota lain disekitarnya, dan mengaburkan batas administrasi kota-kota tersebut.

Daldjoeni (1998) kembali menegaskan, bahwa proses berekspansinya kota ke arah pinggiran sebagian besar disebabkan oleh adanya daya sentrifugal pada kota. Daya ini mendorong gerak perpindahan penduduk dan aktivitasnya ke wilayah pinggiran kota ataupun wilayah luar kota lain yang terdekat di sekitarnya. Daya sentrifugal tersebut antara lain disebabkan oleh faktor-faktor :

1. Adanya gangguan yang berulang seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara dan suara, menyebabkan penduduk merasa tidak nyaman bertempat tinggal dan bekerja di kota.

2. Industri modern di kota yang memerlukan lahan-lahan yang relatif kosong di pinggiran kota, dimana dimungkinkan permukiman yang tidak padat penghuninya, kelancaran lalu lintas kendaraan, dan kemudahan parkir mobil.
3. Sewa tanah yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan di tengah kota.
4. Gedung-gedung bertingkat di tengah kota tidak mungkin lagi diperluas. Hal ini berlaku juga untuk perindustrian, kecuali dengan biaya yang sangat tinggi.
5. Perumahan di dalam kota umumnya serba sempit, kuno, dan tidak sehat. Sebaliknya rumah yang dapat dibangun di luar kota dapat lebih luas, sehat dan bermodel mutakhir.
6. Sebagian penduduk kota berkeinginan secara naluri menghuni wilayah di luar kota yang serba alami.

Yunus (2001) mengemukakan, bahwa pemekaran fisik kota mempunyai ekspresi yang bervariasi, yang terjadi melalui proses-proses tertentu yang dipengaruhi oleh : (1) faktor fisik, berkaitan dengan keadaan topografi, struktur geologi, geografi, perairan dan tanah, serta (2) faktor non fisik, yang meliputi kegiatan penduduk (politik, sosial, budaya, dan teknologi), urbanisasi, peningkatan kebutuhan ruang, peningkatan jumlah penduduk, perencanaan tata ruang, peraturan pemerintah tentang bangunan, dan lain sebagainya. Peranan aksesibilitas, sarana dan prasarana transportasi, serta pendirian fungsi-fungsi besar (seperti industri dan perumahan) sangat besar pula dalam membentuk variasi ekspresi keruangan fisik kota.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tuntutan kebutuhan kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi telah mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk perkotaan yang menuntut kebutuhan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan

kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota. Gejala pengambil-alihan lahan non *urban* oleh penggunaan lahan *urban* di daerah pinggiran kota disebut sebagai *invasion*, sedangkan proses perembetan kenampakan fisik perkotaan ke arah luar yang mengakibatkan perluasan fisik perkotaan disebut *urban sprawl* atau *extended urban area*. Pengertian tentang *urban sprawl* itu sendiri antara lain dirangkum dari beberapa ahli, yaitu :

1. Menurut Harvey dan Clark (1971)

*"Urban sprawl refers to the continuous expansion around large cities, where by there is always a zone of land that is in the process of being converted from rural to urban uses."*

2. Menurut Northam (1975)

*"Urban sprawl refers to the areal expansion of urban concentrations beyond what they have been. Urban sprawl involve the conversion of land peripheral to urban centers that has previously been used for non urban uses to one or more urban uses."*

3. Menurut Domouchel (1976)

*"Urban sprawl can be defined of the growth of metropolitan area throught the process of development of miscellaneous type of land use in the urban fringe areas."*

Setiap kota mempunyai ciri maupun kondisi yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut suatu kota mempunyai pendorong perkembangan yang berbeda-beda pula. Pertumbuhan suatu kota dapat dicirikan oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan tingkat ekonominya, akan tetapi biasanya pertumbuhan ini juga didukung oleh keuntungan kondisi alam tertentu. Kondisi alam ini berpengaruh baik untuk kedudukan suatu kota pada awal mula perkembangan dan pada proses perkembangan selanjutnya, sehingga posisi kota itu menjadi semakin luas dan kuat.

## 2.2 Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan

Nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan ini merupakan perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali yang bersumber dari filosofi religi kosmos yang dijiwai oleh Agama Hindu. Dalam filosofi religi kosmos, manusia dan alam dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur yang sama, sehingga dalam upaya mencapai tujuan hidupnya dilakukan melalui upaya menyelaraskan diri dengan lingkungan kehidupannya. Filosofi religi kosmos ini menjelaskan hubungan antara alam kejiwaan dengan alam dunia fana melalui simbol-simbol, sebagai bentuk hubungan antara alam makro dengan mikro kosmos. Kedua unsur tersebut dipandang sebagai sesuatu yang berbeda, selalu ada, dan saling mempengaruhi membentuk satu kesatuan (*Rwa Bhinedal* dualistis). Badan manusia secara keseluruhan digambarkan sebagai alam mikro kosmos yang dibedakan dari alam semesta sebagai alam makro kosmos (Pudja, 1978 : 32).

Ardana (1982) mengungkapkan, bahwa manusia sebagai mikro kosmos disebut juga *Bhuwana Alit* yang dibedakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk *purusa/atma* (batin, jiwa), dan bentuk *prakerti* (raga, badan, lahiriah). Demikian pula halnya dengan makro kosmos yang disebut juga *Bhuwana Agung*, dibedakan pula dalam dua bentuk, yaitu *paraatma* (jiwa), dan *prakerti* (fisik alam). Kedua bentuk dari makro kosmos dan mikro kosmos ini dinyatakan mengandung unsur-unsur yang sama, yaitu unsur-unsur *Panca Mahabhuta* (lima unsur alam), yaitu : *pertiwi* (tanah), *apah* (air), *teja* (api), *bayu* (angin), dan *akasa* (ether).

Kosmos sendiri terdiri dari tiga lapis yang disebut dengan *Tri Sarira*, yaitu (1) *Sthula Sarira* (badan kasar/fisik) atau *Bhur Loka* (tingkatan alam yang terendah/terluar), (2) *Suksma Sarira* atau *Linggha Sarira* (badan halus) atau *Bhuah Loka* (tingkatan alam kedua), dan (3) *Antakarana Sarira* (badan yang paling halus) atau *Swah Loka*

(tingkatan alam ketiga). *Antakarana Sarira* adalah bentuk *purusa*, sedangkan *Sthula Sarira* dan *Suksma Sarira* merupakan bentuk *prakerti* (Punyatmadja, 1984 : 53-54). Dalam kaitan ini, tindakan manusia dalam usaha menyelaraskan diri dengan kosmosnya dilakukan melalui tiga sarana (*Tri Kaya Parisudha*), yaitu : (1) *Kayika* (gerak anggota badan atau tingkah laku), (2) *Wacika* (perkataan), dan (3) *Manacika* (gerak pikiran) (Sura, 1985 : 94).

Melalui pemahaman keselarasan hubungan antara makro dan mikro kosmos ini, maka *purusa/atma* (batin, jiwa) dalam pola keruangan sebagai bentuk Konsepsi *Tri Hita Karana* (tiga unsur yang menyebabkan terjadinya kesejahteraan) yang terdiri dari unsur-unsur jiwa, tenaga, dan fisik. Selain itu, dalam pola keruangan juga mengandung unsur *prakerti* (raga, badan, lahiriah) yang diwujudkan dalam bentuk konsepsi *Tri Angga* (tiga susunan badan), yang terdiri dari *utama angga* (kepala), *madya angga* (badan), dan *nista angga* (kaki). Dalam makro kosmos, Konsepsi *Tri Hita Karana* dapat dijelaskan sebagai jiwa adalah *paraatma* (Tuhan), sebagai tenaga adalah yang menggerakkan alam (seperti pergerakan matahari, bulan, bintang, dan planet), dan sebagai fisik adalah unsur-unsur *Panca Mahabhuta* (lima unsur alam). Sedangkan dalam mikro kosmos, sebagai jiwa adalah *atman* (roh), sebagai tenaga adalah *perana* (tenaga), dan sebagai fisik adalah *sarira* (badan). Demikian pula halnya dengan Konsepsi *Tri Angga*, dalam makro kosmos dapat dijelaskan, *utama angga* adalah gunung, *madya angga* adalah daratan, dan *nista angga* adalah laut. Dalam mikro kosmos, *utama angga* adalah kepala, *madya angga* adalah badan, dan *nista angga* adalah kaki (Sularto, tanpa tahun dalam Putra, 1991 : 216).

Perwujudan *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga* seperti yang dijelaskan di atas, dalam susunan kosmos dapat dijelaskan dengan tabel II.1 dan II.2 di bawah ini:

TABEL II.1  
PERWUJUDAN *TRI HITA KARANA* DALAM SUSUNAN KOSMOS

SUSUNAN/UNSUR	JIWA	TENAGA	FISIK
ALAM SEMESTA	<i>Paraatman</i> (pusat roh, Tuhan)	Tenaga yang menggerakkan alam	Lima unsur alam ( <i>Panca Mahabhuta</i> )
DESA/LINGKUNGAN	<i>Kahyangan Tiga</i> (Pura Puseh, Desa, dan Dalem)	<i>Sima Krama Desa</i> (Warga Desa)	<i>Palemahan</i> (Teritorial Desa)
TEMPAT TINGGAL	<i>Sanggah/merajan</i> (Tempat Suci)	Manusia penghuni	<i>Pekarangan</i> (Halaman)
MANUSIA	<i>Atman</i> (roh)	<i>Perana</i> (tenaga)	<i>Sarira</i> (Badan)

Sumber : Meganada, 1990 : 72

TABEL II.2  
PERWUJUDAN *TRI ANGGA* DALAM SUSUNAN KOSMOS

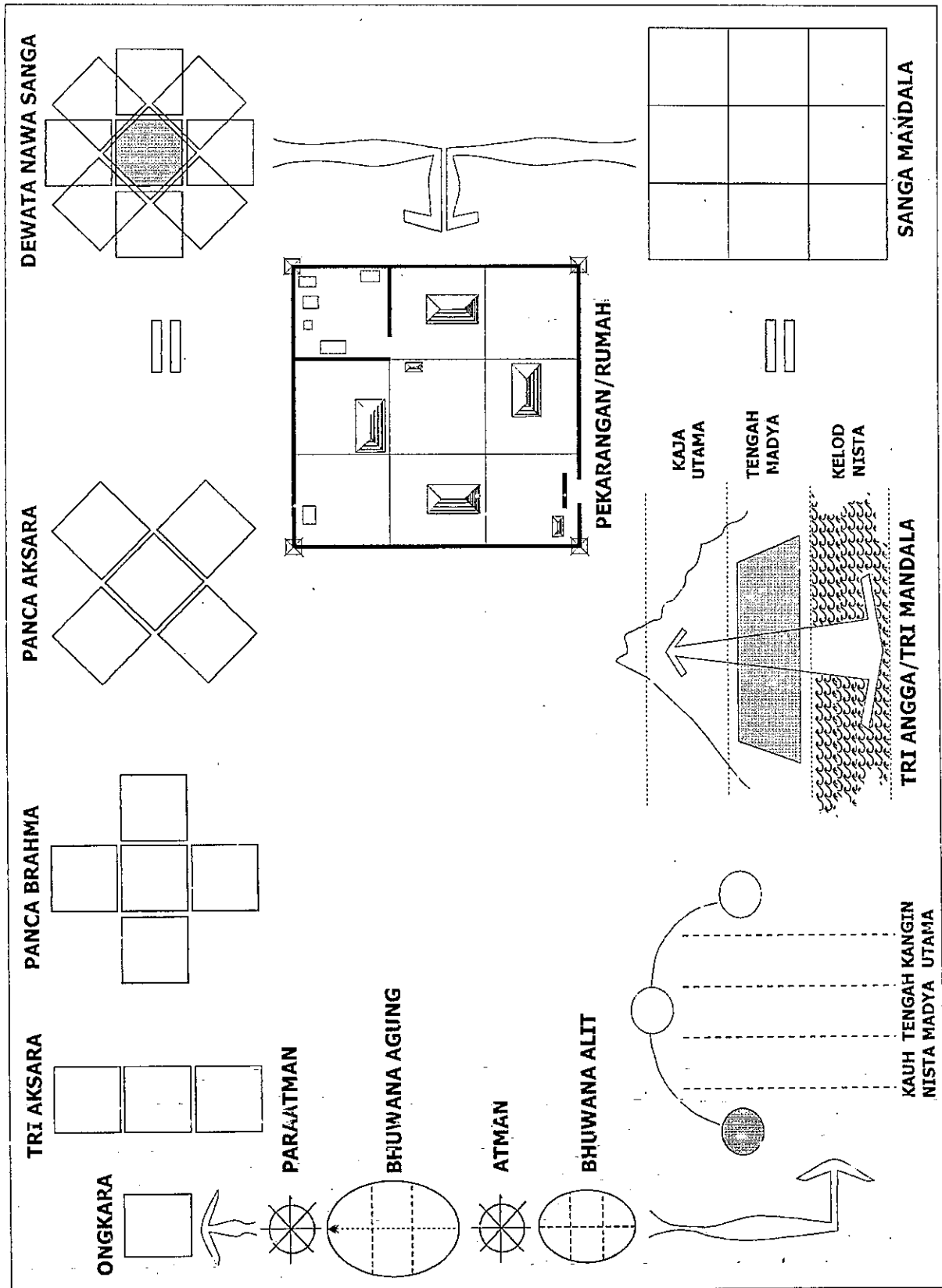
SUSUNAN/UNSUR	UTAMA/SAKRAL	MADYA/NETRAL	NISTA/KOTOR
ALAM SEMESTA	<i>Swah Loka</i> (Alam atas)	<i>Bhuah Loka</i> (Alam tengah)	<i>Bhur Loka</i> (Alam bawah)
WILAYAH	Gunung	Daratan	Laut
DESA/LINGKUNGAN	<i>Kahyangan Tiga</i> (Pura Puseh, Desa, dan Dalem)	<i>Banjar</i> /Permukiman	<i>Setra</i> /Kuburan
TEMPAT TINGGAL	<i>Sanggah/merajan</i> (Tempat Suci)	Bangunan rumah dan <i>Natah</i> /halaman	<i>Lebuh</i> /Pintu Masuk
PURA/TEMPAT SUCI	<i>Jeroan</i> (pusat kegiatan)	<i>Jaba Tengah</i> (halaman tengah)	<i>Jaba Sisi</i> (halaman luar)
BANGUNAN	Atap	Kolom/dinding	<i>Batur</i> (pondasi, lantai)
MANUSIA	<i>Atman</i> (roh)	<i>Perana</i> (tenaga)	<i>Sarira</i> (Badan)
MASA/WAKTU	<i>Warthamana</i> (Masa depan)	<i>Nagata</i> (Masa kini)	<i>Atita</i> (Masa lalu)

Sumber : Budihardjo (1985), Meganada (1990), Sularto tanpa tahun dalam Putra (1991)

Secara simbolis, sifat kosmos tersebut disimbolkan dengan tiga huruf suci (*Tri Aksara*) yang menjiwai proses keseimbangan, dan juga disimbolkan dengan lima huruf suci (*Panca Brahma*). Filosofi ini melahirkan Konsep *Catus Patha* yang memberikan pengertian bertemunya pengaruh yang datangnya dari empat penjuru mata angin (timur, selatan, utara, dan barat), dan bersama-sama *Panca Aksara* melahirkan konsepsi *Dasa Aksara*, dimana huruf-huruf suci *Bang, Tang, Ang, Nang, Shing, dan Wang* menjiwai terbentuknya konsep *Asta Dala* (delapan penjuru mata angin), sedangkan huruf suci *Ing* dan *Yang* menjadi satu dalam inti, sehingga terbentuklah Konsep *Dewata Nawa Sanga* (sembilan Dewata sebagai pengendali alam semesta). Konsepsi ini merupakan kristalisasi dari filosofi yang disimbolkan dalam bentuk huruf-huruf suci, menggambarkan pengendalian ketertiban proses keseimbangan alam yang mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, dan sebagai jiwa dalam perwujudan keruangannya yang melahirkan Konsep *Nawa Sanga* (sembilan pengendali) (Meganada, 1990 : 59-60).

Sifat kosmos yang mengandung *utpati* (kelahiran), *sthiti* (kehidupan), dan *pralina* (kematian), dalam konteks proses alam juga memberikan arti simbolis sebagai terbitnya matahari (arah timur/*utpati*), teriknya matahari (tengah/*sthiti*), dan terbenamnya matahari (arah barat/*pralina*). Kemudian bersama-sama dengan filosofi Konsepsi *Tri Angga* melahirkan konsepsi ruang *Sanga Mandala* (sembilan ruang). Hal ini selanjutnya menjadi landasan terbentuknya pola-pola tata ruang yang merupakan aspek fisik dalam filosofi kosmos (Sularto, tanpa tahun dalam Putra, 1991 : 218). Perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan tersebut, secara diagramatis digambarkan dalam gambar 2.1 di bawah ini.

GAMBAR 2.1  
 PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM LINGKUP KERUANGAN



Sumber : Putra, 1991 : 218

Pelaksanaan penyelarasan diri dengan kosmos seperti penjelasan di atas, pada dasarnya berpangkal pada Kitab Suci Weda dan Kerangka Dasar Agama Hindu. Kerangka dasar tersebut dapat dijelaskan (Darsana, 1982 : 5; Mantra, 1983 : 18; Sabha Arsitektur Tradisional Bali, 1984 : 118-129; Punyatmadja, 1984 : 5; Putra, 1991 : 215) :

1. *Tattwa* (filsafat) : memberikan petunjuk filosofis yang mendalam mengenai pokok-pokok keyakinan (*Panca Sradha*), antara lain : *Widhi Sradha* (keyakinan dengan adanya Tuhan), *Atman Sradha* (keyakinan dengan adanya *atman*/roh yang bersumber dari *paraatman*/Tuhan), *Punarbhawa Sradha* (keyakinan terhadap adanya rangkaian kehidupan ke dalam bentuk kehidupan lain/kelahiran kembali), *Karmapala Sradha* (keyakinan terhadap adanya hukum sebab akibat), dan *Moksa Sradha* (keyakinan terhadap bersatunya *atman* dengan *paraatman*). Ajaran *Tattwa* dalam wujud *Panca Sradha* ini akan mewujudkan pola-pola/konsepsi keruangan dan mempengaruhi pola permukiman desa/kota, pengaturan pekarangan dan perwujudan tata bangunan.
2. *Susila* (etika) : merupakan aturan dan kerangka tingkah laku yang baik sesuai dengan *dharma*, menguraikan pemahaman benar-salah, baik-buruk, dan sebagainya.. *Susila* ini mengatur pola berfikir serta tingkah laku yang meliputi pikiran, perkataan, dan perbuatan (*Tri Kaya Parisudha*). Dari ajaran susila ini timbul norma-norma dan aturan-aturan, baik tata cara berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama, maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Ketiga hubungan yang harmonis ini akan mewujudkan tata nilai dan tata letak dalam konsep keruangan, serta sistem kemasyarakatan.
3. *Upacara* : merupakan kerangka untuk menghubungkan diri dengan *Dewa* (Tuhan), *pitra* (Leluhur), para *rsi* (guru), sesama manusia dan hubungan dengan *bhuta* (kekuatan alam) dalam bentuk persembahan. Esensi dari *upacara* pada dasarnya adalah *yadnya* (korban

suci dengan tulus ikhlas). Dasar hukum dari *yadnya* adalah *Tri Rna* (tiga hutang yang harus dibayar, dan dilaksanakan melalui *Panca Maha Yadnya*), antara lain :

- a. *Dewa Rna* adalah hutang kepada Tuhan dan lingkungan, yang dilaksanakan melalui *Dewa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*.
- b. *Rsi Rna* adalah hutang kepada *rsi* (guru), pelaksanaannya melalui *Rsi Yadnya*.
- c. *Pitra Rna* adalah hutang kepada roh leluhur dan kepada sesama manusia sehingga menimbulkan *Pitra Yadnya* dan *Manusa Yadnya*.

Ketiga kerangka dasar di atas sangat mempengaruhi sikap hidup dan struktur kemasyarakatan, aktivitas, dan pengaturan lingkungan hidupnya. Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi yang digambarkan sebagai *Manik Ring Cucupu* (bayi dalam kandungan), membentuk konsep-konsep ruang secara runtut dari skala makro (alam), lingkungan hunian (desa), pekarangan, bangunan, peralatan, sampai pada komponen-komponen terkecil (Putra, 1991 : 214).

## **2.2.1 Perwujudan Budaya dalam Pola Tata Ruang Tradisional Bali**

### **A. Perwujudannya dalam Arah Orientasi Ruang**

Seperti halnya bentuk keseimbangan kosmos, perwujudan pola tata ruang tradisional Bali dalam arah orientasi ruang pun berlandaskan pada konsep dualistis (*Rwa Bhineda*) tersebut. Konsepsi ini terwujud dalam tata arah yaitu utara-selatan (*kaja-kelod*) yang berkaitan dengan lautan-gunung (*segara-ukir*), hulu-hilir (*luan teben*), nyata-nir rupa (*sekala-niskala*), suci-tidak suci, hitam-putih, dan sebagainya.

Dalam pandangan masyarakat Bali pada umumnya, arah orientasi utara-selatan, suci-tidak suci, hulu-hilir, berpedoman pada posisi gunung dan lautan. Arah gunung

disebut *kaja*, suci, *luan*, *utama*, dan arah laut disebut *kelod*, tidak suci, *teben*, *nista*. Karena Pulau Bali tersebut dibelah oleh pegunungan dari timur ke barat yang membaginya menjadi dua bagian yaitu Bali Selatan (terdiri dari 8 kabupaten/kota) dan Bali Utara (terdiri dari 1 kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng), maka pedoman gunung-lautan sebagai arah orientasi tersebut menimbulkan perbedaan arah orientasi antara masyarakat Bali Utara dan Masyarakat Bali Selatan.

Segala sesuatu yang dikategorikan bersifat suci dan bernilai sakral akan menempati letak di bagian utara dan mengarah ke gunung seperti : letak pura, arah sembahyang, arah kepala saat tidur, dan sebagainya. Sebaliknya segala sesuatu yang dikategorikan tidak suci dan bernilai profan akan menempati letak di bagian selatan dan mengarah ke laut seperti : letak kuburan (*setra*), letak kandang, tempat pembuangan sampah/kotoran, dan sebagainya (Parimin, 1986; Meganada, 1990; Putra, 1991; RTRW Kota Denpasar, 1998; dan Kaler, tanpa tahun). Untuk lebih jelasnya, seluruh uraian tentang arah orientasi ruang ini diilustrasikan dalam gambar 2.2 di bawah ini.

## **B. Perwujudannya dalam Lingkungan Desa dan Kota**

Perwujudan pola tata ruang tradisional Bali dalam lingkungan desa dan kota, mengandung adanya unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yaitu : *Kahyangan Tiga* sebagai *Utpati*, *Sima Krama Desa* (masyarakat) sebagai *Sthiti*, dan *Palemahan* (teritorial) sebagai *Prakerti*. Sedangkan perletakan dari unsur-unsur tersebut didasarkan pada Konsep *Tri Angga dan Tri Mandala*, yaitu susunan sakral/utama, madya/tengah, dan profan/*teben*.



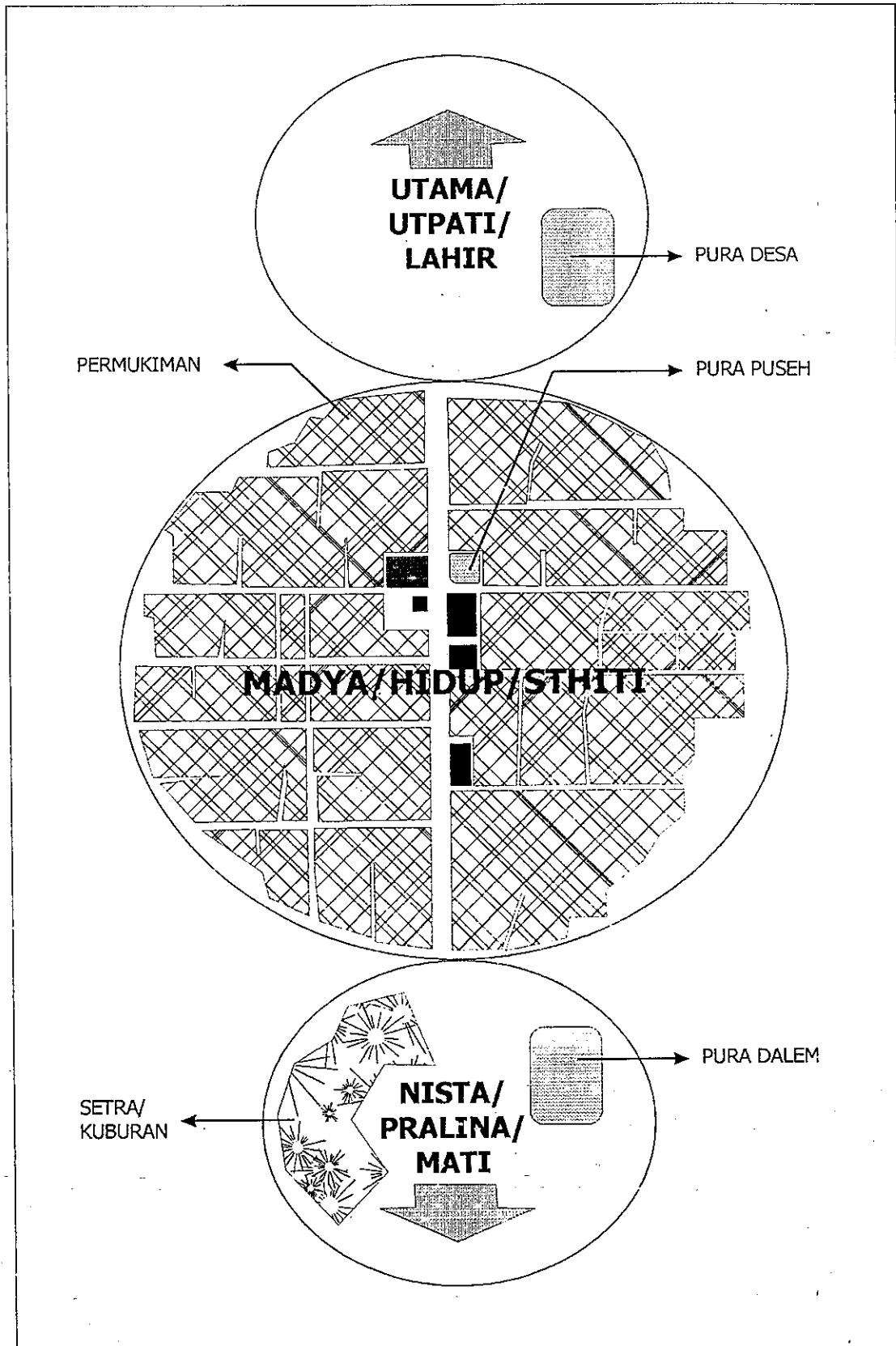
Pada lingkungan desa diwujudkan dengan *parhyangan* pada zona utama/*kaja/luan* (merupakan hubungan dengan Tuhan/*Dewa Brahma* sebagai pencipta dengan wujud *Pura Desa* yang memiliki makna kelahiran/*utpati*), wujud permukiman pada zona madya/tengah (merupakan unsur kehidupan/*sthiti* dengan menempatkan *Pura Puseh* sebagai tempat bersthana *Dewa Wisnu* sebagai simbol pemelihara), dan pada zona profan/*kelod/teben* diwujudkan dengan penempatan kuburan (mengandung makna kematian/*pralina*). Pada zona profan ini ditempatkan *Pura Dalem* sebagai tempat bersthana *Dewa Siwa* dan *Dewi Durga* (*pemralina/pelebur/Dewa Kematian*) (Kaler tanpa tahun : 7). Secara lebih jelas hal tersebut digambarkan dalam gambar 2.3 di bawah ini.

Unsur-unsur *Kahyangan Tiga* merupakan perwujudan *utpati*, *sthiti*, dan *pralina*. *Palemahan Desa* sebagai perwujudan makro kosmos yang membentuk pola-pola ruang sesuai dengan landasan Konsep *Sanga Mandala*. *Pawongan Desa* atau warga desa sebagai perwujudan *Catur Purusaartha* melalui *Panca Yadnya* membentuk struktur masyarakat berdasarkan *Catur Asrama* dan *Catur Warna*, sehingga terbentuk organisasi masyarakat sebagai pengelola kesatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat (Putra, 1991 : 28-37). Dengan demikian dapat terlihat keterpautan antara pola keruangan dengan tata kehidupan masyarakatnya. Perwujudan lingkungan desa merupakan pemenuhan landasan konsep keruangannya. Pengertian lingkungan desa dijelaskan dalam bentuk terpenuhinya atribut-atribut (Parimin, 1986 : 204-205) :

#### 1. Kemasyarakatan

Terdiri dari institusi atau lembaga yang mengorganisir masyarakat ke dalam suatu bentuk lembaga yang disesuaikan dengan tingkat kepentingannya, seperti .

GAMBAR 2.3  
KONSEP DASAR TRI HITA KARANA



Sumber : Kaler, tanpa tahun : 7

- a. Desa Adat, adalah desa yang terikat dengan *Kahyangan Tiga*
- b. *Banjar Adat*, adalah lingkungan permukiman
- c. *Subak*, adalah perkumpulan penyediaan air sawah
- d. *Dadia*, adalah hubungan keturunan
- e. *Sekehe*, adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kepentingan
- f. *Perbekelan*, adalah pemerintahan administrasi desa

## 2. Morfologi

Terdiri dari pembagian lokasional penggunaan ruang yang perletakkannya didasarkan pada tingkat kepentingan masyarakat, seperti : tata letak permukiman dan daerah terbangunnya, ruang terbuka untuk umum di tengah desa, kelompok rumah tinggal.

## 3. Fungsional

Meliputi bangunan religius untuk persembahyangan dan fungsi kemasyarakatan lainnya.

- a. Pura Umum, disebut juga *Kahyangan Jagat* yang bersifat umum yaitu pemujanya dari berbagai golongan atau klen keluarga, seperti *Pura Sad Kahyangan*, *Dhang Kahyangan*, dan lain-lain.
- b. Pura Teritorial, berfungsi sebagai pengikat solidaritas warga masyarakat dan merupakan ciri khas dari suatu desa adat (*Pura Kahyangan Tiga*).
- c. Pura Fungsional/*Swagina*, adalah pura yang terkait dengan profesi atau pekerjaan seseorang dalam masyarakat. Misalnya petani, ikatan pemujaannya adalah *Pura Subak (Ulu Suwi, Bedugul, Masceti)*, pedagang (*Pura Melanting*), dan lain-lain.
- d. Pura *Kawitan*, adalah Pura yang mempunyai hubungan dengan pemujaan leluhur seseorang dalam masyarakat, mulai dari ikatan keluarga yang terkecil sampai yang terbesar (*sanggah/merajan, Pura Dadia, dan Pura Panti/Paibon*).

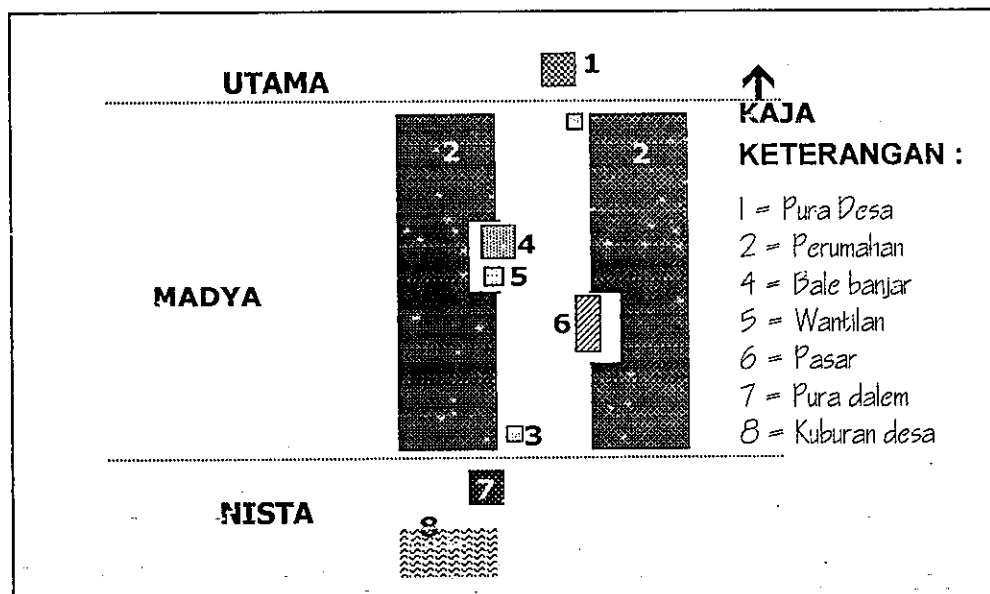
#### 4. Simbolis

Meliputi tanda atau orientasi pengelompokan permukiman atau tempat tinggal berdasarkan letaknya secara simbolis. Hal ini meliputi : orientasi permukiman pada *pempatan. agung* dan jalan umum, orientasi kelompok tempat tinggal, dan orientasi dalam tempat tinggal.

Dalam kaitannya dengan pola lingkungan desa, Bagus (1970) mengungkapkan bahwa pola-pola desa/perkampungan di Bali pada umumnya membentuk tipologi-tipologi lingkungan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Linier kontinu, yaitu pola memanjang dimana pada bagian tengahnya merupakan area bersama yang berfungsi sebagai fasilitas sosial (lihat gambar 2.4.).

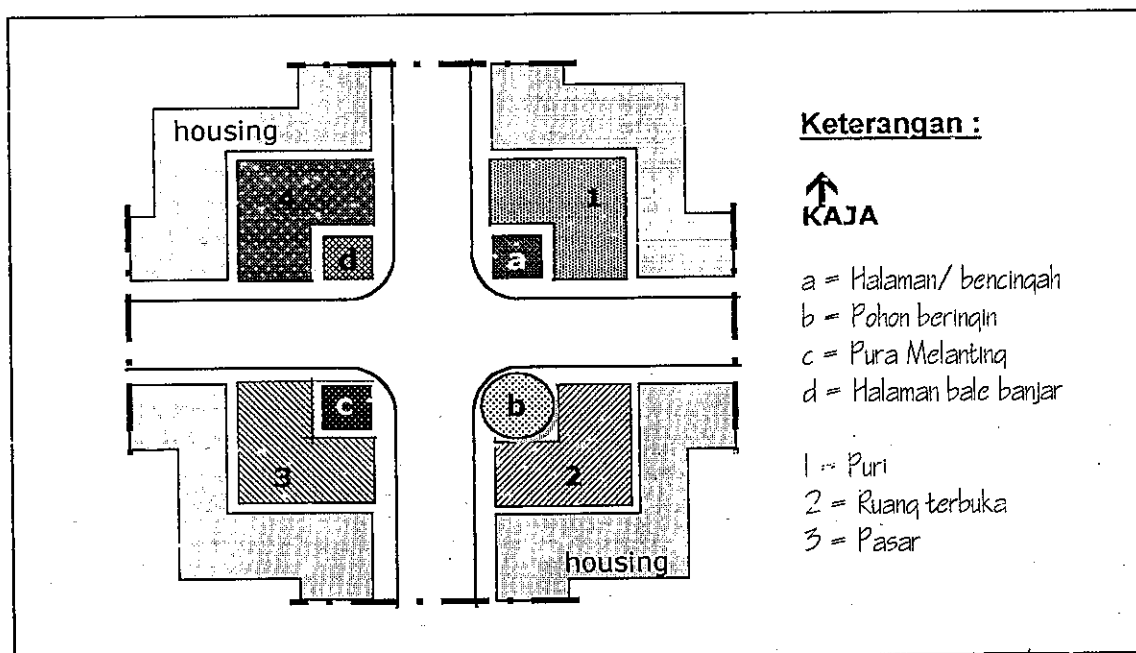
GAMBAR 2.4  
POLA PERKAMPUNGAN LINIER KONTINU



Sumber : Bagus, 1970; Budihardjo, 1985

2. *Pempatan Agung* yang disebut *Nyatur Desa (Nyatur Muka/Catus Patha)*, dimana dua jalan utama yang menyilang desa, timur-barat dan utara-selatan membentuk silang pempatan sebagai pusat desa. Balai Banjar sebagai pusat pelayanan sub lingkungan menempati lokasi disekitarnya dengan jalan-jalan sub lingkungan sebagai cabang-cabang jalan utamanya. Pada *Perempatan Agung* ini, Pura Desa dan Pura Puseh atau Puri menempati zone *kaja kangin* (timur laut), Balai Banjar menempati zone *kaja kauh* (barat laut), lapangan desa menempati zone *kelod kangin* (tenggara) dan zone *kelod kauh* (barat daya) dialokasikan sebagai pusat desa. Kuburan desa ditempatkan di luar desa pada arah *kelod* atau arah *kauh* yang merupakan zone dengan nilai rendah (*nista*). Tata letak perumahan dan bangunan-bangunan pelayanan disesuaikan dengan keadaan alam dan adat setempat. Areal sekeliling perempatan tersebut merupakan area bersama yang berfungsi sebagai fasilitas sosial (lihat gambar 2.5.).

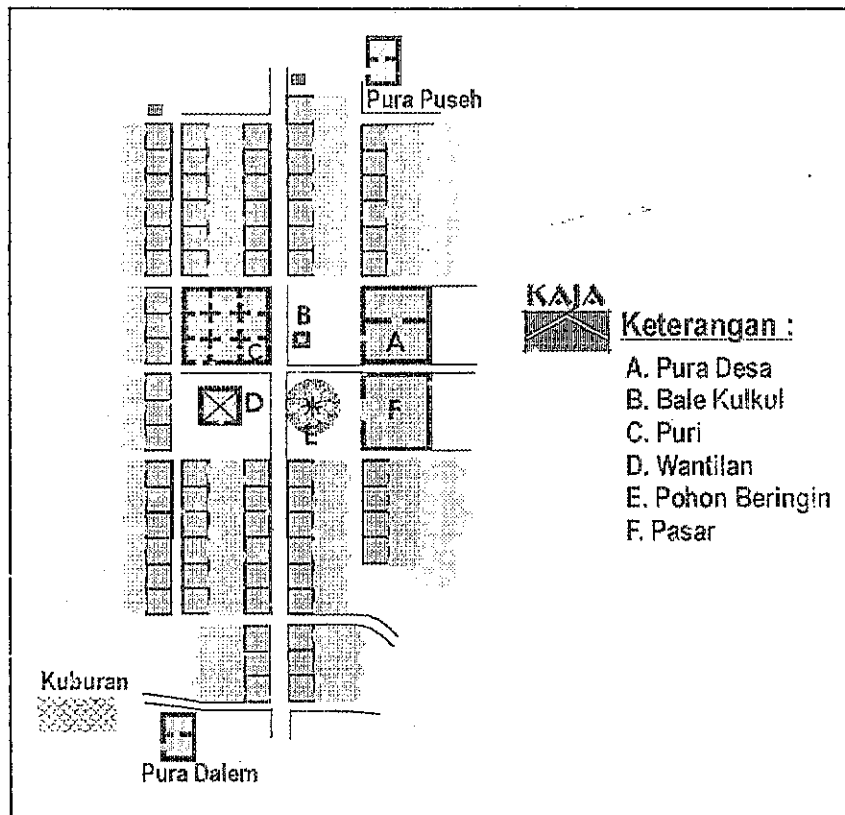
GAMBAR 2.5  
POLA PERKAMPUNGAN NYATUR DESA/NYATUR MUKA/CATUS PATHA



Sumber : Bagus, 1970; Budihardjo, 1985

3. Kombinasi antara kedua tipologi tersebut melahirkan berbagai keragaman pola-pola lingkungan perkampungan (lihat gambar 2.6.).

GAMBAR 2.6  
POLA PERKAMPUNGAN KOMBINASI



Sumber : Bagus, 1970; Budihardjo, 1985

Tipologi lingkungan lain yang menunjukkan adanya keragaman pola lingkungan desa-desa di Bali, terjadi karena situasi/tempat, waktu, dan kondisi pada masing-masing daerah yang dijelaskan dalam *Tri Pramana* yaitu *Desa, Kala, Patra* atau *Desa, Mawa, Cara*. Kondisi yang beragam tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada konsep dasar filosofinya. Keragaman pola lingkungan desa-desa tersebut terdiri dari : Desa Bali Kuno (gambar 2.7A), Desa Bali Pegunungan (gambar 2.7B), Desa Bali Daratan (gambar 2.7C), Desa Bali Pantai (gambar 2.7D), dan Desa Pusat Kerajaan (gambar 2.7E) (Kaler, 1983 : 92; Putra, 1991 : 30-32).



TESIS

ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SAREAGITA

KERAGAMAN  
POLA DESA DI BALI

LEGENDA :

- 1 PURA DESA
- 2 PURA PUSEH
- 3 PURA DALEM
- 4 PURI / JERO
- 5 WANTILAN / BALAI SERBAGUNA
- 6 LAPANGAN
- 7 PASAR

SKALA

UTARA

SUMBER :

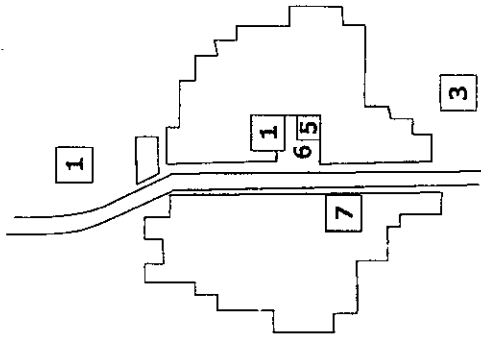


Putra, 1991 : 92

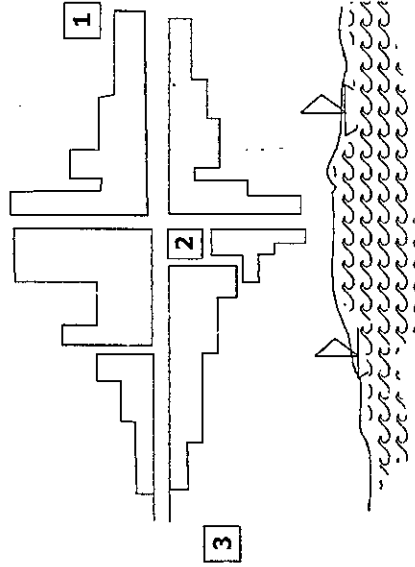
NO. GAMBAR  
HILJAWAN

2.7  
54

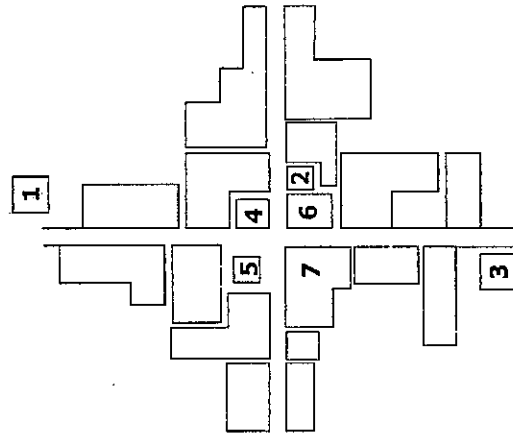
Gambar 2.7 B



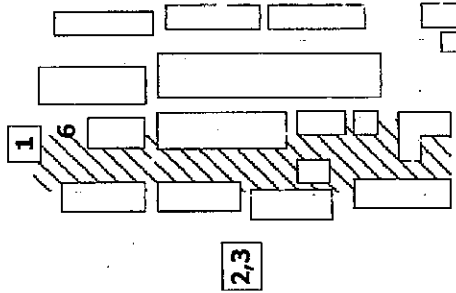
Gambar 2.7 D



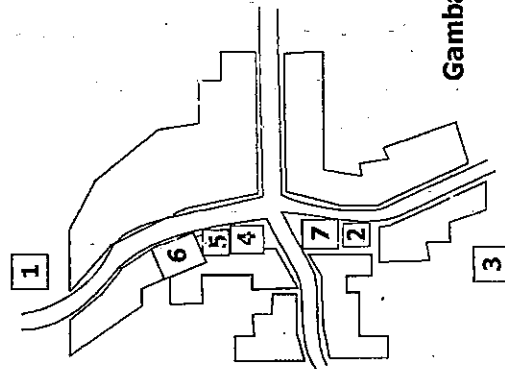
Gambar 2.7 E



Gambar 2.7 A



Gambar 2.7 C



Dari keseluruhan pola perkampungan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, tipologi lingkungannya memiliki konsep yang terkristalisasi ke dalam apa yang disebut tiga penyebab utama kebahagiaan atau kesejahteraan (*Tri Hita Karana*). Manifestasi dari konsep *Tri Hita Karana* dalam pola keruangan biasanya terjadi dalam tiga bagian ruangan yang ada, yaitu : ruang utama yang disebut *parhyangan*, ruang madya sebagai wadah interaksi dan kegiatan yang disebut *palemahan*, dan manusianya disebut *pawongan*. *Palemahan* (wilayah) sebagai wadah bagi seluruh aktivitas manusia, baik *palemahan* rumah maupun desa terbagi menjadi tiga wilayah/zona yang disebut dengan Konsep *Tri Mandala* atas dasar tata nilai *Tri Hita Karana* (Kaler, 1983 : 89), yaitu :

1. Zona/ruang utama (*Utama Mandala*), adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sakral, selalu berada di tempat yang lebih tinggi dari area di sekelilingnya dan letaknya berada di arah *kaja* (utara) dan *kangin* (timur), yang berfungsi sebagai tempat pemujaan (*Parhyangan/Pura*).
2. Zona/ruang madya (*Madya Mandala*), adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat keduniawian (kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya), dan letaknya di tengah-tengah ke arah *kauh* (barat) dan *kelod* (selatan), yang berfungsi sebagai wadah/tempat warga desa melakukan interaksi seperti perumahan penduduk (*griya, puri, jero, umah*), wantilan, pasar, lapangan, pusat pemerintahan, *pempatan agung* dan lain-lain.
3. Zona/ruang Nista (*Nista Mandala*) adalah ruang di luar aktivitas manusia dari *madya mandala* seperti : kuburan (*setra*), persawahan, tegalan, hutan dan sebagainya yang mengandung limbah, dan letaknya di bagian *kelod kauh* (barat daya).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dimana landasan filosofi budaya/kultur masyarakat Bali dalam pola tata ruang tradisional Bali tersirat bahwa unsur-unsur

keselarasan berlaku dari unsur-unsur terkecil sampai terbesar. Hal ini memberi pengertian, bahwa lingkungan kota terbentuk dari lingkungan desa dan *banjar*. Dengan kata lain, kota adalah bentuk keselarasan kosmos dalam skala makro, sedangkan dalam skala mikronya adalah desa dan *banjar*. Sehingga kota terdiri dari beberapa lingkungan desa dan *banjar* (Putra, 1991 : 25). Maka dalam konteks kota, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya berkembang sejalan dengan pertumbuhan desa dan *banjar* tersebut. Oleh karena itu, elemen-elemen kota yang terbentuk menjadi lebih spesifik. Hal ini disebabkan oleh kontribusi pola ruang tradisional Bali yang diterapkan pada lingkup mikro tersebut (desa dan *banjar*), khususnya dalam hal kegiatan tempat tinggal, kelembagaan, pelayanan kesejahteraan, pelayanan ekonomi dan rekreasi. Sedangkan pola perletakan fungsi ini secara runtut diwujudkan melalui tata letak lahan peruntukkan (*pekarangan*), keselarasan antara bentuk dan fungsi peruntukkan, dan jarak antar fungsi peruntukkan, yaitu sebagai berikut (disarikan dari Salija, 1975; Tonjaya, 1982; Putra, 1991; dan Kaler, tanpa tahun) :

1. Perletakan lahan peruntukkan disamping ditetapkan sesuai dengan zonasi ruang (*Nawa Sanga*) dan pola ruang (*Catus Patha*) juga dinyatakan melalui pantangan-pantangan yang harus ditaati, antara lain :
  - a. *Numbak Rurung* : pekarangan yang ditombak oleh jalan, gang, dan sungai.
  - b. *Ngeluanin/Karang Grah* : pekarangan yang berada di arah utama dan berbatasan langsung dengan *banjar* dan atau pura.
  - c. *Teledu Nginyah* : pekarangan yang terletak diantara dua jalan dan di samping pekarangan tersebut terdapat tanah kosong yang berbatasan langsung dengan jalan melintang, memotong kedua jalan tadi.
  - d. *Ngapit* : pekarangan yang berada diantara dua pekarangan yang pemiliknya sama dan atau bersaudara.

- e. *Karang Kelingkuhan* : pekarangan yang dikelilingi oleh pekarangan keluarga lain.
  - f. Pekarangan yang *kori*/pintu keluar masuknya berhadapan, segaris (beradu muka).
  - g. Pekarangan yang dikelilingi oleh sungai.
  - h. Pekarangan yang memiliki dua pintu keluar yang letaknya segaris.
  - i. Pekarangan yang letaknya berhadap-hadapan dibatasi oleh jalan, gang, dan sungai yang pemiliknya bersaudara kandung.
2. Keselarasan antara bentuk dan fungsi peruntukkan, ditunjukkan melalui dimensi dasar bangunan (bentuk bangunan, ketinggian, bahan, dan ornamen) yang memakai ukuran anggota badan pemakainya sebagai perwujudan fisiknya, sedangkan makna fungsi ditegaskan dengan simbol yang disebut *pedagingan* (peletakkan lima unsur alam/*Panca Mahabhuta*) sesuai dengan fungsinya melalui suatu proses upacara yang disebut *pemelaspas* sebagai simbol jiwa.
3. Jarak antara dua fungsi bangunan, dimana dalam skala lingkungan desa dan kota dinyatakan melalui :
- a. Dimensi tak terukur, seperti : *apenimpug* (sejauh lemparan batu), *apeneleng* (sejauh pandangan mata), *apangabahan* (sejauh tinggi bangunan yang direbahkan), dan sebagainya.
  - b. Dimensi terukur, adalah ukuran dengan memakai standar anggota badan, seperti : *depa* (rentangan dua tangan), telapak kaki, tangan, telapak tangan, dan sebagainya.

Ketiga bentuk perwujudan di atas mengungkapkan adanya urutan-urutan kosmologis yang membentuk orientasi dan tata nilai fungsi sebagai simbol seleksi terhadap alam, yang memberikan kontribusi terhadap :

- Tata letak yang membentuk proporsi sebagai simbol keselarasan tatanan dan komposisi penjajaran sekelompok fungsi serta fleksibilitas dimensi (*pengurip*).
- Sistem jaringan yang membentuk ketertiban susunan (kronologi) dalam suatu urutan kegiatan (prosesi).

Secara lebih luas lagi apabila konsep-konsep nilai di atas ditarik ke dalam suatu rencana tata ruang, maka perwujudannya terletak di dalam penempatan wilayah/kawasan/zonasinya. Pola penempatan tersebut antara lain :

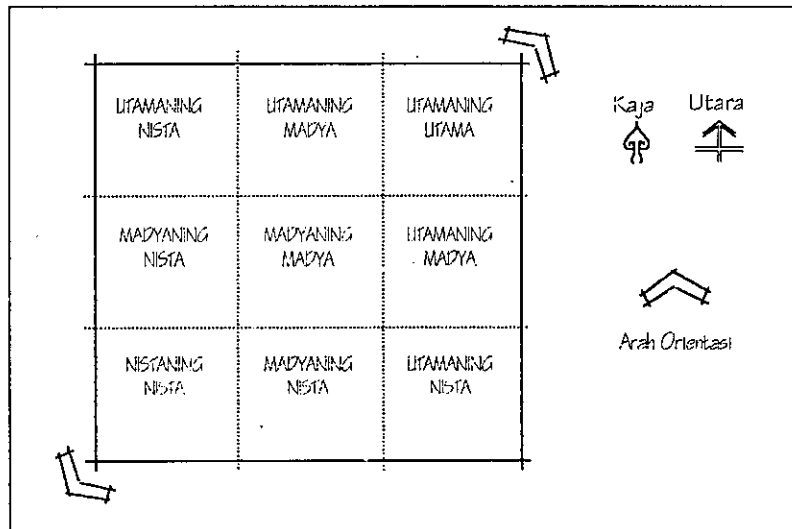
1. Wilayah/kawasan/zona hulu (utara) sebagai kawasan yang harus dilindungi dari kegiatan produksi, karena disamping sebagai kriteria teknis yang merupakan kawasan sumber air dan hutan, juga jika ditinjau dari konsep nilai yang berlaku maka daerah hulu adalah daerah orientasi yang *utama* dari kehidupan masyarakat.
2. Wilayah/kawasan/zona tengah/madya adalah merupakan konsentrasi kegiatan penduduk dengan segala fasilitas dan infrastrukturnya.
3. Wilayah/kawasan/zona hilir/*teben* (selatan) merupakan kawasan konsentrasi kegiatan ekonomi secara sektoral dengan titikberat pengembangan industri sebagai sektor utama, dan sebagai kawasan tempat pembuangan akhir limbah, baik limbah padat maupun cair.

### **C. Perwujudannya dalam Pekarangan**

Perwujudan pola tata ruang tradisional Bali dalam lingkup pekarangan diturunkan dari konsep *Nawa Sanga* atau *Sanga Mandala* yang kemudian menjadi suatu pola ruang *Natah*. Pola ini membagi petak pekarangan menjadi sembilan bagian sebagai perwujudan mikro kosmos. Pola natah ini selanjutnya menjadi dasar pembangunan unit fungsi dalam area pekarangan. Tata nilai fungsi akan membedakan besaran dan perwujudan bangunan. Sedangkan sebagai alat untuk menjelaskan dimensi ruang, akan dilakukan melalui

pekarangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, dimana peranannya sangat dominan dalam pola ruang tradisional Bali (Meganada, 1990 : 72). Hal tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :

GAMBAR 2.8  
TATA NILAI POLA RUANG *NATAH*



Sumber : Budihardjo, 1985; Meganada, 1990; Putra, 1991

Dimensi dasar yang dipakai adalah anggota badan dari pemilik rumah atau kepala keluarga (Ginarsa, 1967 : 3-6; Tonjaya, 1982 : 15-16). Penjelasannya sebagai berikut :

#### 1. Pengukuran petak pekarangan

Pengukurannya dengan menggunakan *Depa* (rentangan dua tangan), ukuran *Depa* ini dibagi empat, yakni *Depa Alit* (rentangan tangan) dan *Depa Agung* (rentangan dua tangan terbuka), *Depa Asta* (jarak antara ujung kaki dengan rentangan tangan dibuka) dan *Depa Asta Musti* (rentang ujung kaki kanan dengan ujung kiri dibuka  $\pm 2,4$  m). Ukuran-ukuran ini dalam penggunaannya selalu diikuti dengan *Pengurip*, sebagai tambahan dengan memakai dasar ukuran tangan/lengan (*gegulak*). Ukuran pekarangan

ini akan berpengaruh terhadap pintu masuk. Dimensi dasar peletakannya dengan membagi lebar/panjang pekarangan menjadi sembilan, sesuai dengan filosofi *Dewata Nawa Sanga*. Pada setiap pertemuan pagar pekarangan diikat dengan *Paduraksa* (*padu* artinya pertemuan, dan *raksa* artinya memegang/menjaga), dari arah *kaja-kangin* (timur laut) berturut-turut disebut *Sri, Aji, Rudra, Kala*. Kemudian antara jalan dengan pagar pekarangan terdapat area kosong yang disebut *Telajakan* (lebarnya 0,5 depa), dan ruang peralihan di depan pintu masuk yang disebut *Lebuh* dengan lebar 1 depa dari tepi jalan. Hal ini diperjelas dalam gambar 2.9.

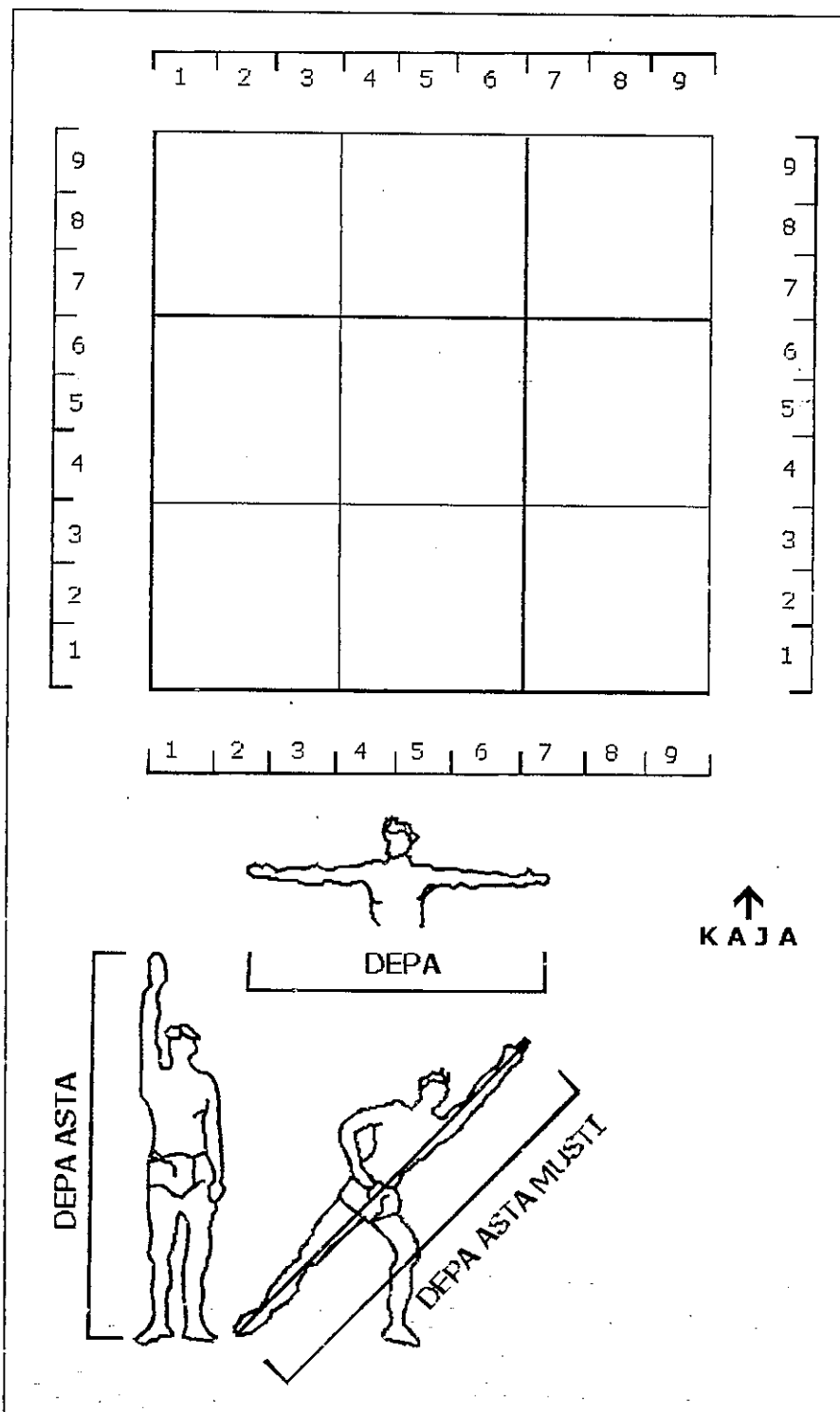
## 2. Pengukuran perletakan bangunan

Ketentuan ini adalah dengan memakai telapak kaki atau disebut juga dengan *Asta Wara*. Jarak antar bangunan ditentukan dengan kelipatan ukuran dasar yang diberi urutan nama (simbol), dimulai dengan *Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma, dan Urip* (*tampak ngandang/telapak kaki melintang*). Besarnya kelipatan ukuran menunjukkan status sosial, profesi penghuninya dan perwujudan dalam mencapai keselarasan, ketetapan dasar jarak antar bangunan tersebut ditentukan dengan jatuhnya kelipatan ukuran, seperti yang dijelaskan dalam gambar 2.10.

### D. Perwujudannya dalam Tata Bangunan

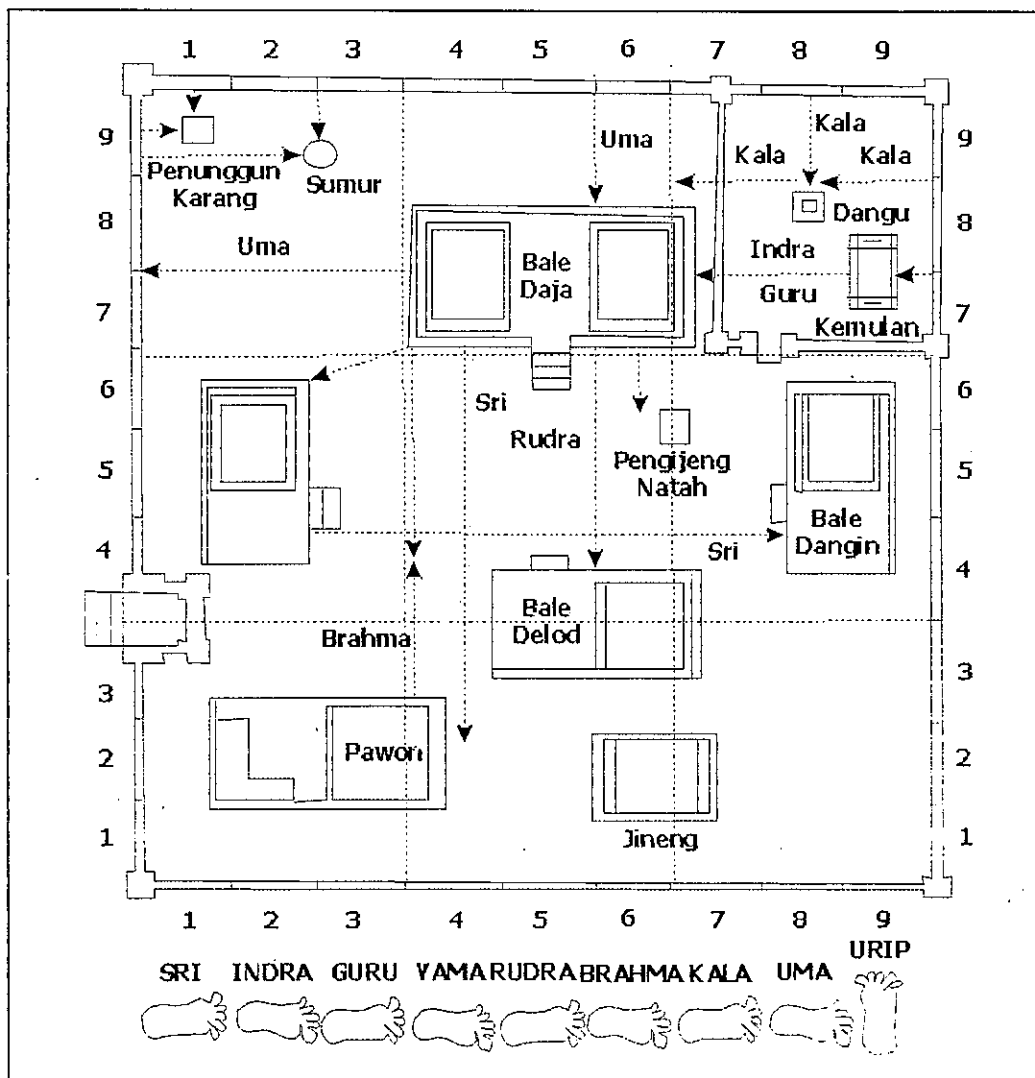
Perwujudan pola tata ruang tradisional Bali dalam tata bangunan diturunkan dari pola-pola sebelumnya yang secara konsepsi diterjemahkan dalam Konsep *Tri Angga*. Konsep ini mengandung pengertian, dimana pada dasarnya tiap bangunan dibedakan ke dalam tiga bagian, yakni aiap (menyimbulkan *utama angga*), kerangka tiang dan dinding (menyimbulkan *madya angga*) dan bataran atau lantai (menyimbulkan *nista angga*).

GAMBAR 2.9  
PENGUKURAN PETAK PEKARANGAN



Sumber : Ginarsa, 1967; Tonjaya, 1982; Putra, 1991

GAMBAR 2.10  
PENGUKURAN PERLETAKAN BANGUNAN



Sumber : Ginarsa, 1967; Tenjaya, 1982; Putra, 1991

Dasar ukuran yang dipakai untuk menjaga keserasian antara ketiga bagian-bagian di atas adalah lengan dan tangan atau disebut *Gegulak*, sedangkan standar ukuran yang dipakai disebut *Rai* (lebar tiang). Satu *Rai* sama dengan jarak antara ujung telunjuk sampai pangkal ruas ketiga atau disebut juga *Tri Adnyana* sampai dengan *Sangga*. Keserasian ukuran antara panjang, lebar, dan tinggi disesuaikan dengan fungsi dan status pemakainya (Ginarsa, 1967 : 11-16; Sularto, tanpa tahun dalam Putra, 1991 : 42-46).

### 2.2.2. Perwujudan Budaya dalam Sistem Kemasyarakatan

Kekerabatan merupakan pendekatan sistem kemasyarakatan. Masyarakat Bali terikat dalam bentuk-bentuk kekerabatan (*nyama, braya, soroh, warga*) dan bentuk-bentuk ikatan kekeluargaan lainnya yang membentuk unit kesatuan kemasyarakatan sebagai ikatan keturunan. Ikatan-ikatan upacara adat dalam satuan keturunan sebagai bentuk sistem kemasyarakatan terutama adalah kehadiran bersama dalam upacara-upacara *Manusa Yadnya, Pitra Yadnya* dan *Dewa Yadnya* dalam batas-batas tertentu (Sudarma, 1995 : 15).

Secara umum sistem ini digolongkan menjadi dua yaitu (Bagus, 1970 : 10) :

1. Sistem kemasyarakatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku dan dipengaruhi oleh adanya klen-klen keluarga, seperti : kelompok kekerabatan yang disebut *Dadia* (keturunan), dan *Pekurenan* atau kelompok kekerabatan yang terbentuk akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti.
2. Sistem kemasyarakatan merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah, wilayah administrasi dan atau kesatuan wilayah adat. Contohnya adalah desa/kelurahan, dan yang secara tradisional adalah wilayah desa adat. Wilayah ini terbagi lagi menjadi satu kesatuan sosial yang lebih kecil yaitu *banjar* yang berfungsi dan berperan dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan, adat dan kegiatan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut Bagus (1970) menjelaskan, bahwa sistem kekerabatan di Bali juga mengenal anggota keluarga batih atau *Pekurenan* yang terbentuk sebagai akibat dari adanya perkawinan dan merupakan unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan di Bali. Sebagai unit kesatuan masyarakat yang terkecil, *Pekurenan* ini akan membangun atau mendirikan tempat pemujaan di rumahnya yang disebut *Kemulan Taksu (turus' lumbung)*.

Kemudian apabila *Pekurenan* ini sudah bertambah banyak jumlahnya, maka anggota kerabatnya akan membentuk keluarga yang lebih besar yang disebut *Tunggal Dadia* (klen kecil) dan akan mendirikan *Pura Dadia*. Selanjutnya, apabila kelompok kerabat *Tunggal Dadia* yang jumlahnya lebih dari satu atau merupakan kumpulan dari sejumlah *Tunggal Dadia*, memuja leluhur yang sama, akan membentuk *Soroh* (klen besar) dan akan mendirikan *Pura Panti/Paibon*. *Soroh* ini cukup banyak jumlahnya, seperti *Klen Pande*, *Klen Pasek*, *Klen Bujangga*, dan sebagainya. Jumlah anggota kerabatnya sudah banyak yang memencar, sehingga sulit untuk saling mengenal antara sesama anggota kerabatnya.

Dalam sistem kemasyarakatan dengan pola menetap, tempat tinggal yang menentukan hak dan kewajiban anggota keluarga, baik di *banjar* maupun di desa adat ada sekurang-kurangnya tugas status keanggotaan dalam persekutuan *banjar* ataupun desa adat (Bagus, 1970 : 11), diantaranya :

1. Status *Pengayah Pengarep* (warga wajib utama), mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga inti senior garis laki-laki yang menetap dan menempati rumah atau pekarangan leluhur keluarga tersebut dengan hak dan kewajiban penuh.
2. Status *Pengayah Penyade* (warga wajib pendamping), adalah saudara atau adik laki-laki dari keluarga inti senior, warga ini bisa mewakili *Pengayah Pengarep* dan bisa tetap tinggal di keluarga inti senior dan berstatus sebagai pewaris sah secara patrilineal.
3. Status *Pengayah Pengele* (warga pendatang), adalah mereka yang berstatus anggota persekutuan *banjar* karena secara teritorial berada di sekitar atau di wilayah *banjar*.

Status keanggotaan *Krama* atau warga di atas dengan desakan kehidupan ekonomi dan orientasi lapangan kerja, maka terlihat kecenderungan dari status *Pengayah Penyade* dan *Pengayah Pengele* akan mempengaruhi perluasan pemanfaatan di wilayah perkotaan.

Dalam sistem kemasyarakatan ini, beberapa hal yang dapat diidentifikasi kemungkinannya sebagai potensi yang mendorong dan memberikan kontribusi dalam pembangunan (Sudarma, 1995 : 27) antara lain :

1. *Sangkep*, adalah merupakan rembug banjar yang melibatkan seluruh warga *banjar*, membahas masalah-masalah yang terjadi dan program-program kerja. *Sangkep* ini sendiri dilaksanakan secara periodik dengan pokok bahasan yang berbeda.
2. *Ngayah*, adalah merupakan kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di *Bale Banjar*, Pura, *Setra* ataupun di lingkungan *banjar*. Kegiatan ini juga dilakukan secara periodik, biasanya dilakukan pada minggu pertama setiap bulan.
3. Kegiatan-kegiatan yang spesifik yang dilaksanakan melalui wadah *sekeha-sekeha*.

### 2.2.3. Perwujudan Budaya dalam Sistem Religi, Upacara Agama dan Upacara Adat

Perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali dalam sistem religi, upacara agama, dan upacara adat ini pada dasarnya merupakan perwujudan operasionalisasi dari kerangka dasar Agama Hindu. Dimana agama, adat dan kepercayaan melatarbelakangi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan melandasi agama apabila agama dianut untuk stabilitas kepercayaan yang ilmiah. Antara agama dan ilmu pengetahuan merupakan perimbangan dalam sistem-sistem religi dan pengetahuan yang harmonis. Dalam pengetahuan ada empat macam kebenaran, yaitu : kebenaran indria, kebenaran ilmu, kebenaran filsafat dan kebenaran agama (Ardana, 1982 : 50).

Sistem religi (dalam kerangka dasar Agama Hindu adalah *Tattwa*) berpedoman pada *Panca Sradha* (lima pokok kepercayaan dalam Agama Hindu) sebagai pokok-pokok kepercayaan, dan *Panca Yadnya* (lima pokok persembahan secara tulus ikhlas Agama Hindu) sebagai pokok-pokok pelaksanaan upacara keagamaan. Dari *Panca Sradha* timbul

sistem religi yang memupuk stabilitas kepercayaan dan sistem pengetahuan yang mengilmiahkan kepercayaan, adat dan ajaran agama. Sedangkan dalam *Panca Yadnya*, timbul sistem religi yang menganut tata cara, tata nilai dan simbol-simbol religi yang menuju sasaran. Sistem pengetahuan yang mengajarkan proses, elemen dan sarana sebagai sistem komunikasi ritual yang diilmiahkan (Wiana, 1995 : 48).

Pelaksanaan sistem religi tersebut, selain berlandaskan pada ajaran Agama Hindu juga berdasarkan pada *dresta* (tradisi) yang telah ada dan dianggap benar. Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan upacara agama dan upacara adat *Panca Maha Yadnya* (*Dewa Yadnya*, *Resi Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusia Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya*), sudah barang tentu akan menemukan permasalahan dari pemanfaatan ruangnya, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk pembangunan, perbaikan dan penataan sarana dan prasarana upacara tersebut dengan tetap mempertahankan daerah-daerah peruntukan kegiatan upacara dimaksud, baik dari nilai estetika maupun radius kesuciannya. Upacara *Panca Maha Yadnya* yang membutuhkan ruang sesuai dengan pelaksanaannya, antara lain (RTRW Kota Denpasar, 1998 : III – 69) :

1. Kebutuhan ruang dalam pelaksanaan *Dewa Yadnya* (persembahan kepada Tuhan) antara lain terhadap peruntukkan tempat suci dan radius kesuciannya; peruntukan sarana-sarana upacara, disamping pula sarana pendukung seperti jalan-jalan yang dipergunakan sebagai prosesi upacara.
2. Kebutuhan ruang dalam pelaksanaan *Rsi Yadnya* (persembahan kepada para guru), biasanya kebutuhan ruangnya sama dengan upacara *Manusa Yadnya* (persembahan kepada sesama manusia), yaitu terbatas pada ruang-ruang permukiman dan atau perumahan. Namun ada pula yang menggunakan ruas jalan sebagai prosesi upacara.

3. Kebutuhan ruang dalam pelaksanaan *Pitra Yadnya* (persembahan kepada para leluhur), selain pada perumahan dan permukiman, juga memanfaatkan ruas jalan dan *Pempatan Agung*/perempatan utama sebagai tempat memutar *wadah/bade* (tempat mayat), *setra* (kuburan) yang terdapat pada setiap desa adat, serta *campuhan* dan pantai yang dimanfaatkan sebagai tempat membuang abu jenasah dalam rangkaian prosesi Upacara *Ngaben* (pembakaran mayat).
4. Upacara *Butha Yadnya* (persembahan kepada lingkungan), yang paling utama dan secara mutlak membutuhkan ruang adalah Upacara *Butha Yadnya* yang dilaksanakan secara berkala, yaitu *Tawur Nangluk Merana* yang biasanya dilakukan pada *Tilem Sasih Kelima* dan atau *Tilem Sasih Keenem* (pada bulan mati antara bulan Nopember-Desember), yang mengambil lokasi di setiap *pempatan agung* dari desa adat yang bersangkutan. Upacara *Butha Yadnya Tawur Kesanga* (menjelang Hari Raya Nyepi) dilaksanakan di alun-alun, *pempatan agung* di setiap wilayah di desa adat, dan di *Pura Desa*. Upacara tersebut dilanjutkan dengan *Ngerupuk* (kegiatan mengelilingi desa disertai dengan bunyi-bunyian dan mengusung *Ogoh-ogoh*). Sebelum upacara puncak *Tawur Kesanga*, terlebih dahulu dilakukan Upacara *Melasti* ke pantai atau *campuhan* yang memiliki makna sebagai tempat pembersihan segala yang kotor.

## 2.3 Kesimpulan Teoritis

### 2.3.1 Teori Suburbanisasi

Terkait dengan kajian teoritis tentang suburbanisasi yang telah diuraikan, beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Suburbanisasi merupakan salah satu konsekwensi dari perkembangan kota, dimana perkembangan kota tersebut terjadi karena kondisi dan potensi yang dimilikinya, baik

kondisi fisik, fungsi dan peran kota, sosial budaya, ekonomi, fasilitas, utilitas, maupun aksesibilitasnya (Friedmann dan Alonso, 1964; Richardson, 1971; Lynch, 1987; Karyoedi, 1987; Sujarto, 1989; Branch, 1996; Firman, 1996; dan Mawardi, 1998).

2. Dilihat dari pengertiannya, suburbanisasi adalah proses pergerakan/perpindahan penduduk berikut aktivitas dan sarana prasarananya dari pusat kota ke wilayah pinggiran, dan terkait pula dengan pergerakan/perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke wilayah pinggiran (Bourne, 1982; Marbun, 1988; dan Aurihan Dj, 2000).
3. Berdasarkan pengertian ini, faktor-faktor penyebab suburbanisasi yang diklasifikasikan oleh beberapa ahli, pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan/perpindahan penduduk berikut aktivitas dan sarana prasarananya dari pusat kota ke wilayah pinggiran, dan terkait pula dengan pergerakan/perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke wilayah pinggiran. Faktor-faktor tersebut pada prinsipnya dapat digolongkan ke dalam empat faktor utama, yaitu : (a) faktor ekonomis, (b) kelengkapan fasilitas dan utilitas, (c) keamanan dan kenyamanan, serta (d) faktor budaya.
4. Proses suburbanisasi itu sendiri akan mengakibatkan terjadinya pemekaran fisik/ perluasan kawasan perkotaan/*extended urban area* (Gilbert, 1959; Daldjoeni, 1998; Yunus, 2001) yang pada gilirannya akan menyatukan ruang-ruang antar kota/aglomerasi kota-kota, serta akan membentuk kawasan perkotaan yang lebih luas dan lebih besar.

### **2.3.2 Teori Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan**

Sedangkan berdasarkan penjelasan teoritis tentang nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan, kesimpulan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan ini merupakan perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali yang bersumber dari filosofi religi kosmos yang dijiwai oleh Agama Hindu melalui tiga kerangka dasarnya, yaitu *tattwa*, *susila*, dan *upacara* (Darsana, 1982; Mantra, 1983; Punyatmadja, 1984; Sabha Arsitektur Tradisional Bali, 1984; Putra, 1991).
2. Perwujudan budaya yang bersumber dari filosofi religi kosmos tersebut membentuk konsep-konsep ruang secara runtut dari skala makro sampai pada komponen-komponen terkecil. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam hal :

- a. Perwujudan budaya dalam pola tata ruang tradisional Bali (perwujudannya dalam arah orientasi ruang, lingkungan desa dan kota, pekarangan, serta tata bangunan).

Dalam kaitannya dengan pola keruangan, perwujudan budaya masyarakat Bali ini menimbulkan : pertama, adanya pola-pola permukiman dalam masyarakat Bali (seperti adanya *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya berikut radius kesuciannya, adanya bangunan-bangunan umum seperti *Bale Banjar*, adanya ruang-ruang terbuka seperti *jaba pura*, *pempatan agung*, *setra/kuburan*, serta atribut kemasyarakatan, morfologi, fungsional, dan simbolis). Kedua, adanya aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang bersifat *niskala/nir-rupa* dalam hal perletakan lahan peruntukan, dimensi dasar bangunan, dan jarak antara dua fungsi, sehingga penempatan dan penataan suatu fungsi kegiatan tidak dapat dilakukan hanya dengan pertimbangan ekonomis. Ketiga, adanya konsepsi-konsepsi yang mengatur zonasi dan fungsi peruntukannya (seperti *Tri Hita Karana*, *Tri Mandala*, *Sanga Mandala*, *Luun-Teben*, dan sebagainya) sehingga penempatan serta penataan zonasi dan fungsi peruntukan harus mengikuti konsepsi-konsepsi tersebut, baik dalam lingkup mikro (pekarangan), sampai pada lingkup makro (desa dan kota). Keempat, adanya aturan-aturan dalam

pengukuran petak pekarangan dan pengukuran perletakan bangunan, secara tidak langsung akan menuntut kebutuhan lahan yang relatif luas untuk bangunan rumah tinggalnya (Ginarsa, 1967; Bagus, 1970; Saliya, 1975; Tonjaya, 1982; Kaler, 1983; Sabha Arsitektur Tradisional Bali, 1984; Budihardjo, 1985; Parimin, 1986; Meganada, 1990; Sularto, tanpa tahun dalam Putra, 1991; RTRW Kota Denpasar, 1998; dan Kaler, tanpa tahun).

b. Perwujudan budaya dalam sistem kemasyarakatan.

Dalam sistem kemasyarakatan, masyarakat Bali terikat dalam bentuk-bentuk kekerabatan dan bentuk-bentuk ikatan kekeluargaan lainnya yang membentuk unit kesatuan kemasyarakatan yang merupakan ikatan keturunan. Ikatan-ikatan upacara adat dalam satuan keturunan sebagai bentuk sistem kemasyarakatan terutama adalah kehadiran bersama dalam upacara-upacara *Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya* dan *Dewa Yadnya* dalam batas-batas tertentu. Dalam lingkup keruangan, sistem kekerabatan tersebut akan menimbulkan pembentukan tempat suci-tempat suci baru sebagai ikatan kekeluargaannya (*Sanggah Kemulan*, *Pura Dadia* dan *Pura Panti*). Selain itu, sistem kemasyarakat tersebut cenderung membentuk suatu ikatan yang kuat dengan rumah asalnya, dimana frekwensi kegiatan yang terkait dengan budaya dan agama di rumah asal tersebut relatif tinggi, sehingga frekwensi mereka untuk pulang ke tempat asal tersebut juga tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada alternatif pemilihan lokasi tempat tinggalnya, yang cenderung untuk memilih lokasi selalu berorientasi pada rumah asalnya, selain juga karena pertimbangan ekonomis (Bagus, 1970; dan Sudarma, 1995).

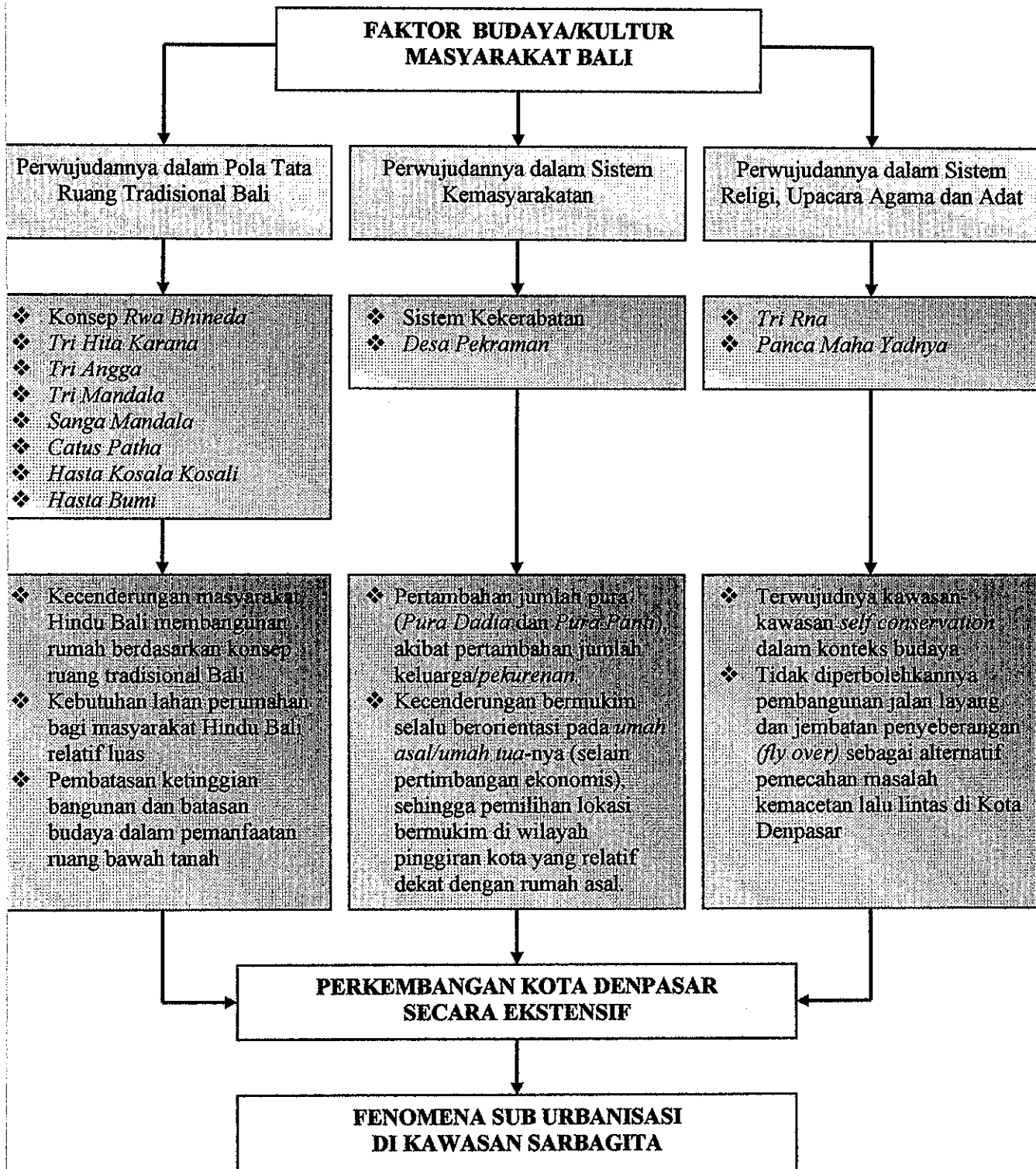
c. Perwujudan budaya dalam sistem religi, upacara agama, dan upacara adat.

Sistem religi yang diwujudkan dalam upacara agama dan upacara adat adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan upacara agama dan upacara adat *Panca Maha Yadnya* (*Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia Yadnya, dan Bhuta Yadnya*). Dalam lingkup keruangan, hal tersebut sudah barang tentu akan membutuhkan ruang untuk pelaksanaan kegiatan upacara dimaksud, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk membangun, memperbaiki dan menata sarana dan prasarana upacara tersebut dengan tetap mempertahankan daerah-daerah peruntukan kegiatan upacara, baik dari nilai estetika maupun radius kesuciannya. Ruang-ruang dimaksud antara lain : alun-alun/lapangan, sumber-sumber air (sungai, waduk, danau, pancoran, mata air, dan sebagainya), *campuhan* (pertemuan antara dua atau lebih sungai), *pempatan agung*, pesisir pantai, pura dan radius kesuciannya serta tanah *pelaba*-nya, dan lain-lain (Ardana, 1982; Wiana, 1995; dan RTRW Kota Denpasar, 1998).

### 2.3.3 Kerangka Teoritis

Berdasarkan kesimpulan dari kedua kajian teoritis di atas, maka faktor-faktor suburbanisasi dan faktor-faktor budaya masyarakat Bali tersebut dapat disintesis dan diinterpretasikan ke dalam suatu kerangka teoritis. Secara lebih rinci dijelaskan dalam diagram berikut.

GAMBAR 2.11  
DIAGRAM KERANGKA TEORITIS



Sumber : Rangkuman dari Kajian Teoritis dan Hasil Interpretasi, 2002

### **BAB III**

## **KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN SARBAGITA (DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, TABANAN)**

### **3.1 Kajian Terbentuknya Kawasan SARBAGITA**

Awal mula terbentuknya Kawasan SARBAGITA dimulai dengan adanya pengembangan sistem kota-kota di Propinsi Bali, yang disahkan dalam Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang RTRW Propinsi Bali, Bagian Ketiga, Pasal 23. Pengembangan sistem kota-kota di Propinsi Bali ini diklasifikasikan menurut :

1. Hirarki/orde pusat-pusat permukiman.
2. Sistem kota-kota berdasarkan sistem wilayah pelayanan dan fungsi kota-kota.

Hirarki/orde pusat-pusat permukiman di Propinsi Bali diklasifikasikan dalam :

1. Pusat permukiman Denpasar mencakup Kuta diarahkan pengembangannya sebagai Kota orde I.
2. Pusat permukiman Tabanan, Singaraja, Negara dan Semarapura diarahkan pengembangannya sebagai Kota orde II.
3. Pusat permukiman Gianyar, Bangli, Amlapura, Ubud, Baturiti, Gerokgak, Gilimanuk, Bajra, dan Sukawati diarahkan sebagai Kota orde III.
4. Pusat permukiman Seririt, Manggis, Kintamani, Mengwi, Blahbatuh, Pupuan, Sampalan, Tampaksiring, Blahkiuh, Pekutatan, Penebel, Kubutambahan, Sawan, Pancasari, Tegallalang, Bebandem, Tejakula, dan Ibukota Kecamatan lainnya diarahkan pengembangannya sebagai Kota orde IV.

Pengembangan sistem kota-kota Propinsi Bali diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sistem Kota Bali Utara dengan pusat pelayanan Singaraja mencakup kota-kota Singaraja yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Sistem Kota Bali Timur dengan pusat pelayanan Semarapura mencakup kota-kota Semarapura yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
3. Sistem Kota Bali Tengah dengan pusat pelayanan Denpasar mencakup Kuta yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kota-kota Tabanan, Gianyar berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal-A (PKL-A), serta kota-kota Ubud, Mengwi, Marga, Sukawati, Petang, Tampaksiring, Blahbatuh, Tegallalang, Blahkiuh, Penebel, Sembunggede, Bajra, Baturiti, Payangan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal-B (PKL-B).
4. Sistem Kota Bali Barat dengan pusat pelayanan Negara mencakup Negara yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal-A (PKL-A).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan terbentuknya Kawasan SARBAGITA (lihat peta) adalah :

1. Dengan adanya pengembangan sistem kota-kota di Propinsi Bali menurut sistem dan fungsi kota yang terbagi dalam 4 sistem kota, maka dalam sistem Kota Bali Tengah akan melingkupi wilayah Denpasar mencakup Kuta sebagai pusat pelayanan; kota-kota Mengwi, Blahkiuh, dan Petang (Kabupaten Badung); kota-kota Sukawati, Blahbatuh, Tegallalang, Gianyar, Ubud, Payangan, Tampaksiring (Kabupaten Gianyar); kota-kota Baturiti, Marga, Penebel, Sembunggede, Bajra, Tabanan, dan Kediri (Kabupaten Tabanan). Dari lingkup wilayah inilah kemudian dikenal istilah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan).

2. Dilihat dari hirarki/orde kotanya, maka sistem kota Bali tengah ini merupakan pemusatan aktivitas penduduk, dimana Denpasar mencakup Kuta adalah merupakan Kota dengan hirarki/orde I sebagai pusatnya. Penentuan hirarki/orde kota ini digambarkan dengan jumlah penduduk pendukung, aktivitas permukiman perkotaan dan kelengkapan fasilitas yang menyertainya, sedangkan sistem kota-kota ditentukan berdasarkan sistem wilayah pelayanan dan fungsi kota-kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi semakin tinggi hirarki kotanya, maka semakin besar pula jumlah penduduk, aktivitas permukiman perkotaan dan kelengkapan fasilitas yang menyertainya, sehingga akan lebih pesat pula perkembangan kotanya.
3. Pesatnya perkembangan Kota Denpasar termasuk Kuta sebagai pusat sistem kota Bali Tengah menyebabkan semakin tingginya interaksi yang terjadi antara Kota Denpasar dengan wilayah pinggiran dan pusat-pusat pelayanan aktivitas disekitarnya. Tingginya interaksi ini memiliki kecenderungan *extended urban area* yang mengekspansi lahan ke luar pusat, sehingga kawasan dalam sistem kota Bali Tengah ini (yang selanjutnya disebut dengan Kawasan SARBAGITA) mengalami penyatuan fisik yang semakin mengaburkan batas-batas antar kotanya (aglomerasi kota-kota). Kota-kota yang terindikasi mengalami dampak perkembangan spasial secara langsung dan pesat antara lain adalah Kuta, Mengwi, dan Abiansemal (Kabupaten Badung); Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, dan Ubud (Kabupaten Gianyar); serta Kediri dan Tabanan (Kabupaten Tabanan). Lihat peta stadia perkembangan lahan terbangun di Kawasan SARBAGITA.
4. Tingginya tingkat perkembangan Kawasan SARBAGITA ditunjukkan dengan adanya penyatuan fisik perkotaan (*extended urban area*) serta peningkatan persentase laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (1,83 % per tahun), diperkirakan cenderung akan membentuk kawasan perkotaan yang lebih luas.







MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# TESIS

ASPEK BIDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAH SARBAGITA

## PETA SISTEM KOTA-KOTA DI PROPINSI BALI

### LEGENDA :

- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- PUSAT PELAYANAN UTAMA
- PUSAT PELAYANAN KEDUA
- PUSAT PELAYANAN KETIGA
- KETERKAITAN ANTAR PUSAT-PUSAT PELAYANAN

SKALA PETA  
1 : 750.000

0km 75 15 225m

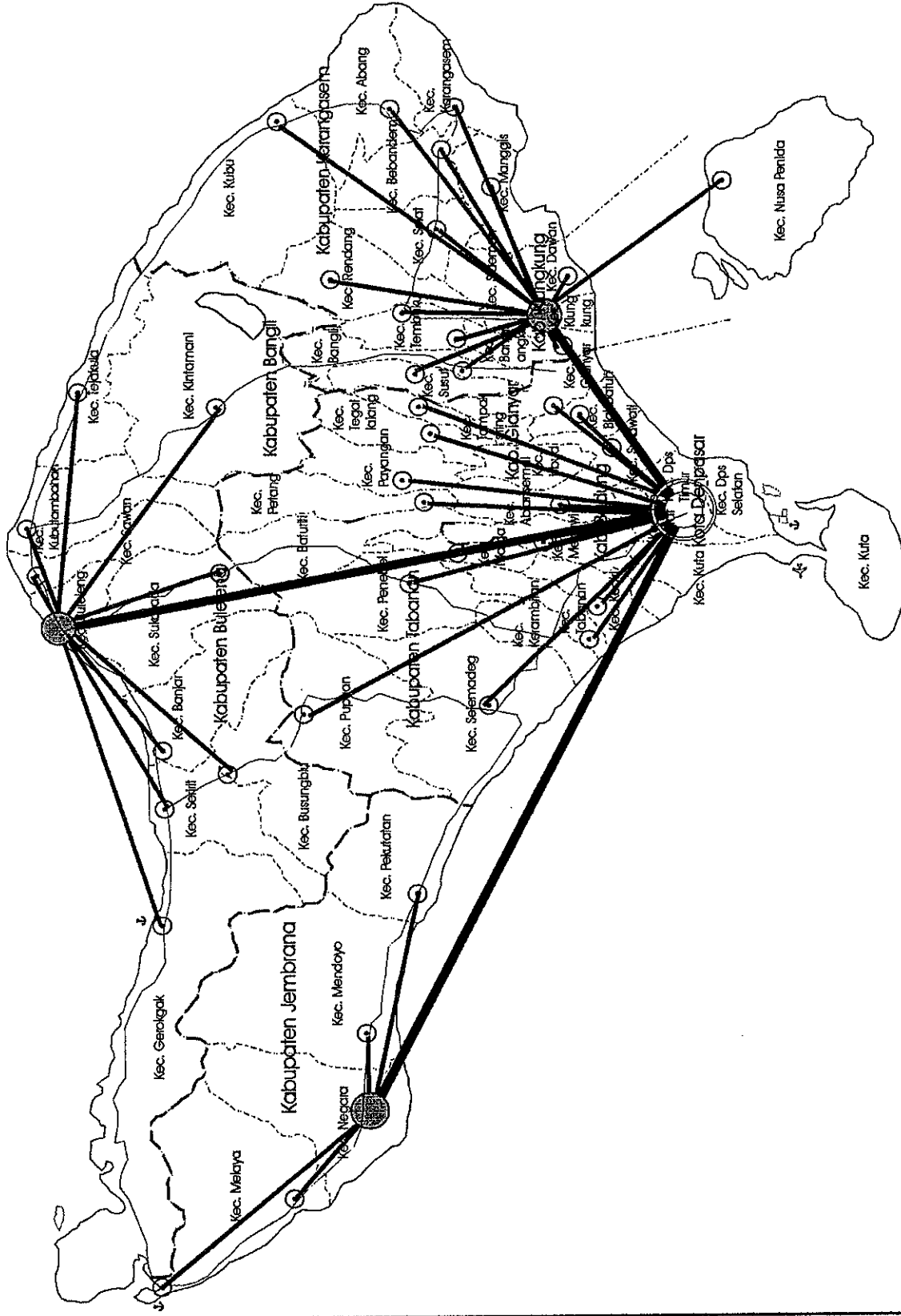
SUMBER PETA DASAR :



RTRW Propinsi Bali

NO. PETA 3.3

HAL. PETA 78











MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# TESIS

ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA

PETA STADIA PERKEMBANGAN LAHAN  
TERBANGUN DI KAWASAN SARBAGITA

## LEGENDA :

-  BATAS ADMINISTRASI
-  JARINGAN JALAN
-  LAHAN TERBANGUN  
TAHUN 1993
-  LAHAN TERBANGUN  
TAHUN 1998
-  LAHAN TERBANGUN  
TAHUN 2000
-  LAHAN KOSONG

Skala Peta

UTARA



SUMBER PETA DASAR :

BPN Propinsi Bali

NO. PETA

HAL. PETA

3.4

79

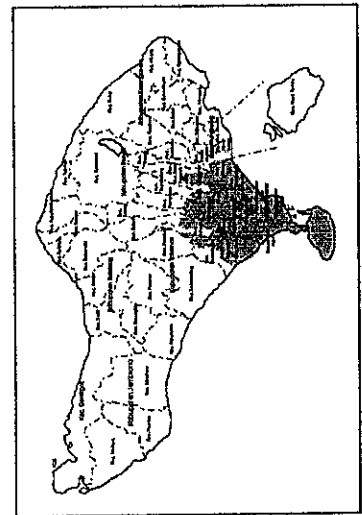
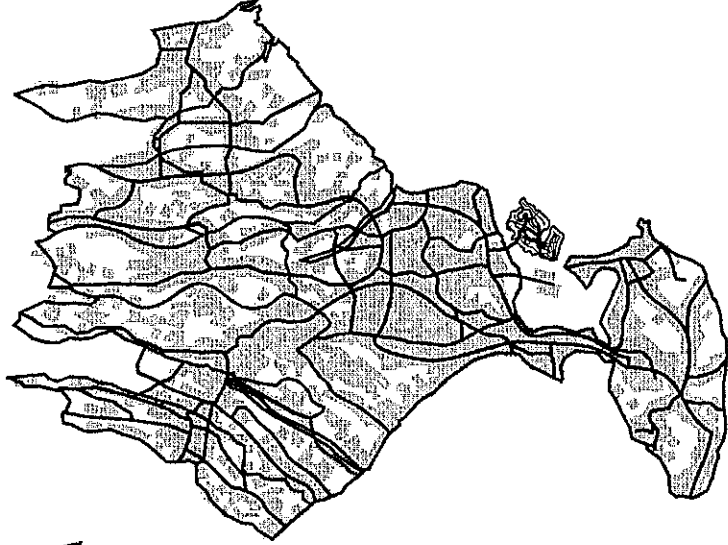
**TAHUN 1993**



**TAHUN 1998**



**TAHUN 2000**



### 3.2 Kajian Fisik Kawasan SARBAGITA

Kawasan SARBAGITA memiliki *comparative advantage* yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu kota dibandingkan dengan kota-kota lainnya, seperti :

1. Lokasinya yang sangat strategis baik secara fisik maupun ekonomi yang merupakan wilayah dengan skala pelayanan nasional/Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Wilayah (PKW), serta Lokal (PKL).
2. Kondisi topografi yang relatif datar (antara 0 – 500 m di atas permukaan laut), sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pengembangan berbagai macam kegiatan.
3. Merupakan kota pantai dengan kondisi alamiah pantai yang indah (Pantai Sanur, Pantai Matahari Terbit, Pantai Kuta, Pantai Nusa Dua, Tanjung Bena, Pantai Lebih-Gianyar, Pantai Yeh Gangga, Pura Tanah Lot, Pura Sakenan-Serangan, dan Pura Uluwatu).
4. Memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi (rata-rata setiap wilayah kotanya memiliki historis sebagai pusat kerajaan, seperti Kerajaan/Puri Denpasar, Puri Jero Kuta, Puri Mengwi-Badung, Puri Pemecutan Badung, Puri Agung Gianyar, Puri Ubud, Puri Peliatan, dan Puri Agung Tabanan).
5. Sebagai pusat kegiatan pariwisata yang merupakan sektor tertinggi pembentuk PDRB Bali (segitiga centra pariwisata : Sanur-Kuta-Nusa Dua dan pusat kegiatan seni Ubud, Peliatan, Batuan, Gianyar).
6. Memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, karena dapat terjangkau oleh transportasi darat dengan kondisi infrastruktur jalan lokal maupun regional yang relatif baik : jalan *sunset road* (Kuta – Tanah Lot – Soka), *western ring road*, *sunrise road* (Tohpati – Kusamba), *by pass* Ngurah Rai, rencana jalan Bringkit – Sakah; laut (Pelabuhan Bena); dan udara (Bandara Internasional Ngurah Rai).

### 3.3 Kajian Kependudukan Kawasan SARBAGITA

Dari kesimpulan tentang terbentuknya Kawasan SARBAGITA, dimana kota-kota yang diindikasikan mengalami dampak perkembangan spasial secara langsung dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat antara lain adalah : Kota-kota Kuta, Mengwi, dan Abiansemal (Kabupaten Badung), Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, dan Ubud (Kabupaten Gianyar), serta Kediri dan Tabanan (Kabupaten Tabanan). Dari indikasi tersebut dan berdasarkan hasil analisis data statistik (Denpasar Dalam Angka, Kecamatan Kuta, Mengwi, Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Ubud, Kediri, dan Tabanan Dalam Angka), maka luas Kawasan SARBAGITA ini adalah 723,99 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2000 mencapai 1.171.812 jiwa. Prosentase laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahunnya relatif tinggi yaitu 1,83 % (tahun 1990 – 2000). Jumlah penduduk yang tertinggi adalah Kota Denpasar yaitu 522.381 jiwa pada tahun 2000, kemudian disusul oleh Badung (282.373 jiwa), Gianyar (252.236 jiwa), dan yang terendah adalah Tabanan (114.822 jiwa). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel III.1 serta gambar 3.5 dan gambar 3.6.

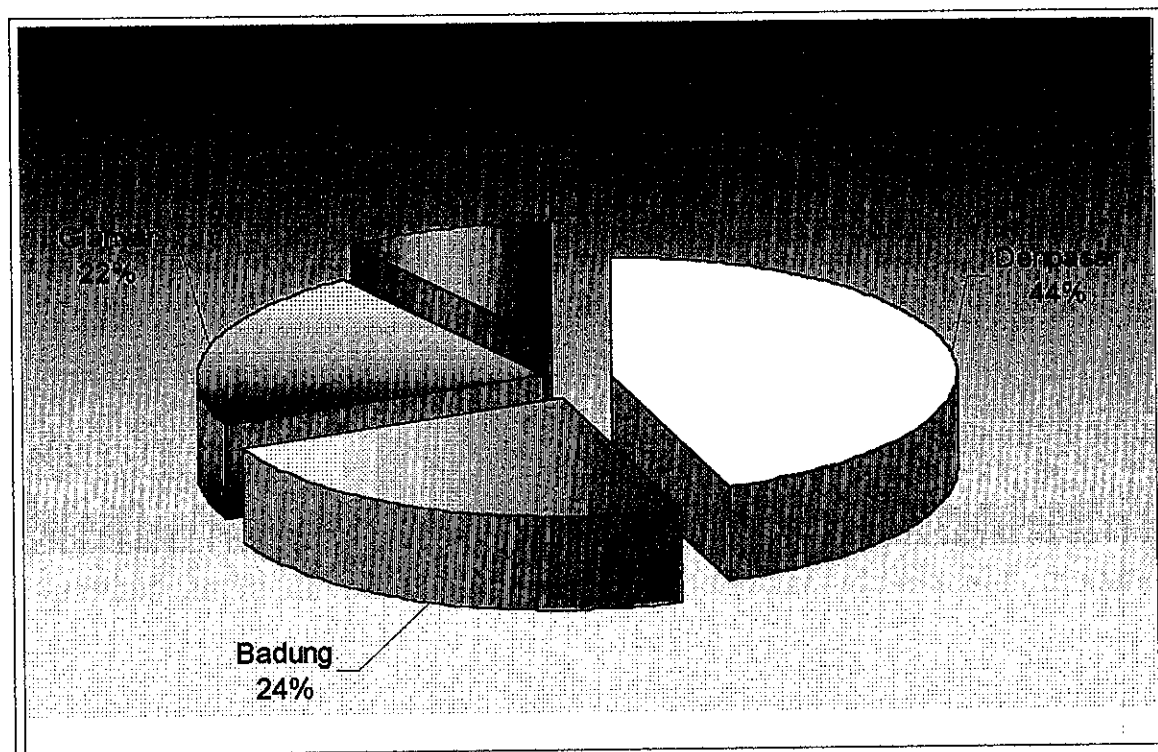
Tingginya prosentase laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun di Kawasan SARBAGITA ini di satu pihak secara langsung akan mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan dan perkembangan kawasan, karena akan semakin banyak penduduk yang harus diakomodasi dan dilayani oleh Kawasan SARBAGITA tersebut, sedangkan di lain pihak ketersediaan lahan yang statis dan terbatas, sehingga pertumbuhan dan perkembangan penduduk tidak dapat diakomodasi secara maksimal. Selain itu, fenomena ini juga akan semakin mempertinggi tingkat interaksi antar kota-kota di dalam kawasan dan mempercepat proses *extended urban area* pada masing-masing kota. Kedua fenomena tersebut akan mempercepat proses penyatuan spasial kota-kota (aglomerasi kota-kota) di dalam Kawasan SARBAGITA akibat proses suburbanisasi (lihat gambar 3.7).

TABEL III.1  
 LUAS WILAYAH, JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN RATA-RATA PENDUDUK  
 DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 1996-2000

NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				LAJU PERTUMBUHAN RATA-RATA (% PER TH)	
			1996	1997	1998	1999		2000
<b>1</b>	<b>Denpasar :</b>	<b>127,78</b>	<b>371,424</b>	<b>373,272</b>	<b>382,555</b>	<b>390,230</b>	<b>522,381</b>	<b>9.72</b>
	a. Denpasar Selatan	49.99	91,911	92,891	100,941	101,967	149,653	14.5
	b. Denpasar Timur	27.73	112,280	112,370	113,290	114,562	140,549	6.18
	c. Denpasar Barat	50.06	167,233	168,011	168,324	173,701	232,179	9.38
<b>2</b>	<b>Badung :</b>	<b>303.52</b>	<b>258,021</b>	<b>261,852</b>	<b>267,082</b>	<b>277,012</b>	<b>282,373</b>	<b>2.60</b>
	a. Kuta	152.51	101,356	103,424	105,504	112,230	115,597	3.46
	b. Mengwi	82.00	88,723	90,267	91,291	93,715	94,961	1.72
	c. Abiansemal	69.01	67,942	68,161	70,287	71,067	71,815	1.05
<b>3</b>	<b>Gianyar :</b>	<b>187.69</b>	<b>236,725</b>	<b>238,992</b>	<b>241,463</b>	<b>243,601</b>	<b>252,236</b>	<b>1.61</b>
	a. Sukawati	55.02	68,200	68,799	69,564	70,172	75,168	2.49
	b. Blahbatuh	39.70	46,452	47,016	47,604	48,112	48,786	0.98
	c. Gianyar	50.59	68,810	69,365	69,939	70,408	71,093	0.82
	d. Ubud	42.38	53,263	53,812	54,356	54,909	57,189	1.80
<b>4</b>	<b>Tabanan :</b>	<b>105.00</b>	<b>110,782</b>	<b>111,572</b>	<b>112,369</b>	<b>113,279</b>	<b>114,822</b>	<b>0.90</b>
	a. Kediri	53.60	57,819	58,295	59,049	59,846	61,005	1.35
	b. Tabanan	51.40	52,963	53,277	53,320	53,433	53,817	0.40
	<b>Jumlah SARBAGITA</b>	<b>723.99</b>	<b>976,952</b>	<b>985,688</b>	<b>1,003,469</b>	<b>1,024,122</b>	<b>1,171,812</b>	<b>5.05</b>

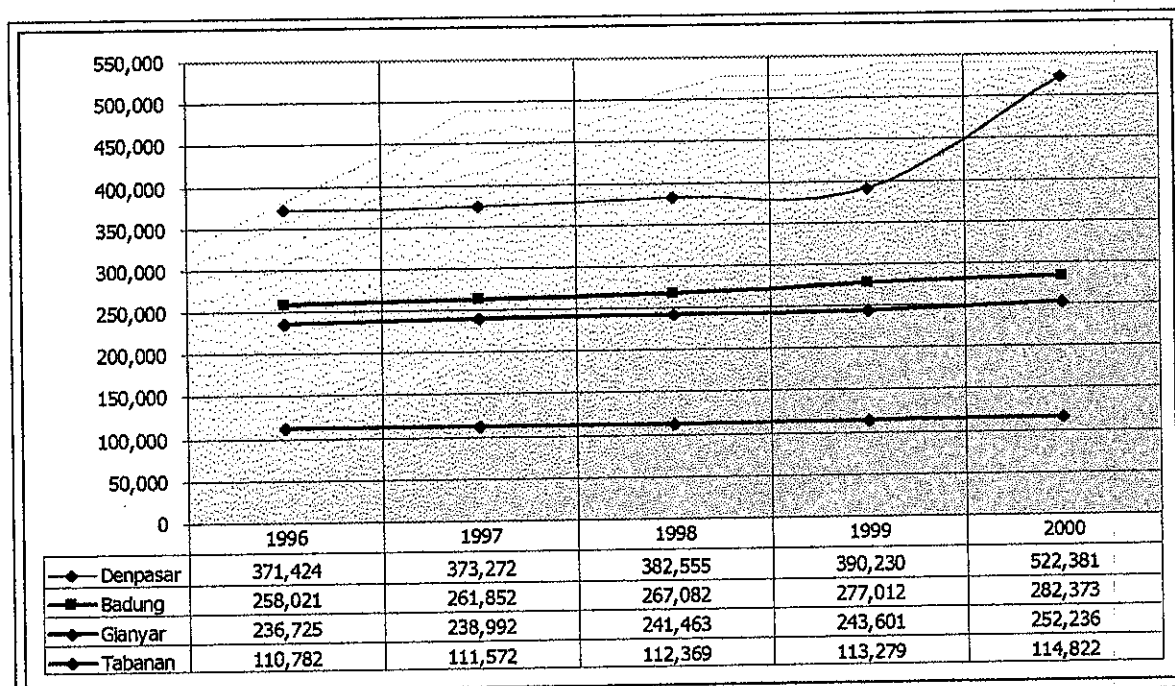
Sumber : Rangkuman Kecamatan Dalam Angka Kawasan SARBAGITA, 1996-2000

GAMBAR 3.5  
PROPORSI JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 2000



Sumber : Rangkuman Kecamatan Dalam Angka Kawasan SARBAGITA, 1996-2000

GAMBAR 3.6  
GRAFIK JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 1996-2000



Sumber : Rangkuman Kecamatan Dalam Angka Kawasan SARBAGITA, 1996-2000








MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

# TESIS

ASPEK BIDANG MASYARAKAT BALI DAUN  
PERUBAHAN SUBBANSASDI KAWASAN SARBAGITA

PETA PERKEMBANGAN KAWASAN  
TERBANGUN DI KAWASAN SARBAGITA  
TAHUN 1993 - 2000

## LEGENDA :

-  BATAS ADMINISTRASI
-  JARINGAN JALAN
-  KAWASAN TERBANGUN TAHUN 1993
-  PERUBAHAN KAWASAN TERBANGUN SAMPAI TAHUN 2000
-  LAHAN KOSONG

SKALA PETA



UTARA

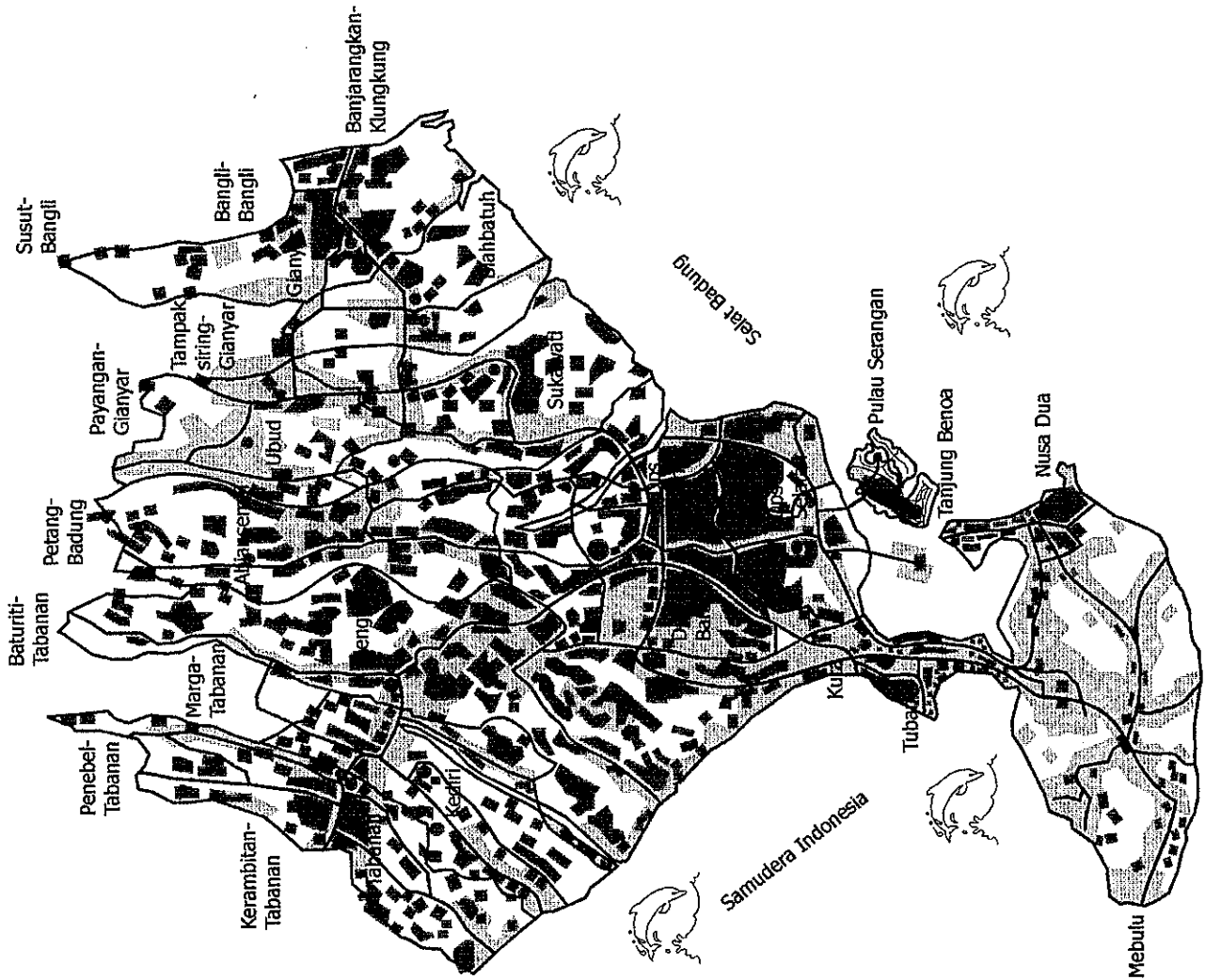
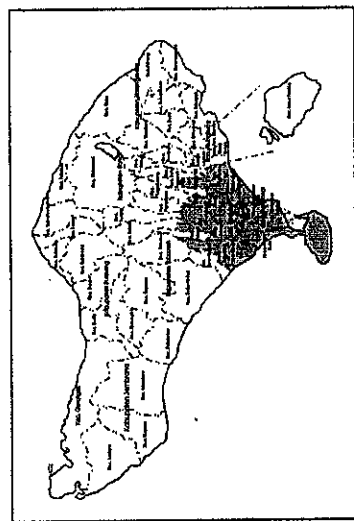
SUMBER PETA DASAR :



BNP Propinsi Bali

NO. PETA HAL. PETA

3.7 84



### 3.4 Identifikasi Karakteristik dan Pola Bermukim Masyarakat di Kawasan SARBAGITA Berdasarkan Hasil Survei

#### 3.4.1 Karakteristik Masyarakat

Berdasarkan hasil survei terhadap 101 responden di Kawasan SARBAGITA, karakteristik masyarakatnya sebagian besar kepala keluarga berstatus keluarga bukan sulung dan bukan bungsu (55,4 %). Anak sulung sebesar 29,7 % dan anak bungsu sebesar 14,9 %. Hal ini perlu diketahui, sebab dalam budaya masyarakat Bali, status kepala keluarga ini memegang peranan penting dalam hal ikatan dengan desa adat. Di mana anak sulung ataupun bungsu umumnya akan mempunyai tanggung jawab atau kewajiban "ber-desa adat" (*status pengayah pengarep*), menggantikan tugas dan kewajiban orang tuanya apabila mereka sudah berumah tangga (Bagus, 1970 : 10-11; Sudarma, 1995 : 27).

Dilihat dari tingkat pendidikan kepala keluarga, rata-rata tingkat pendidikannya adalah Diploma dan Sarjana (46,5 %). Dari hasil survei, tidak satu pun responden yang berpendidikan SD ataupun tidak sekolah. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel III.2.

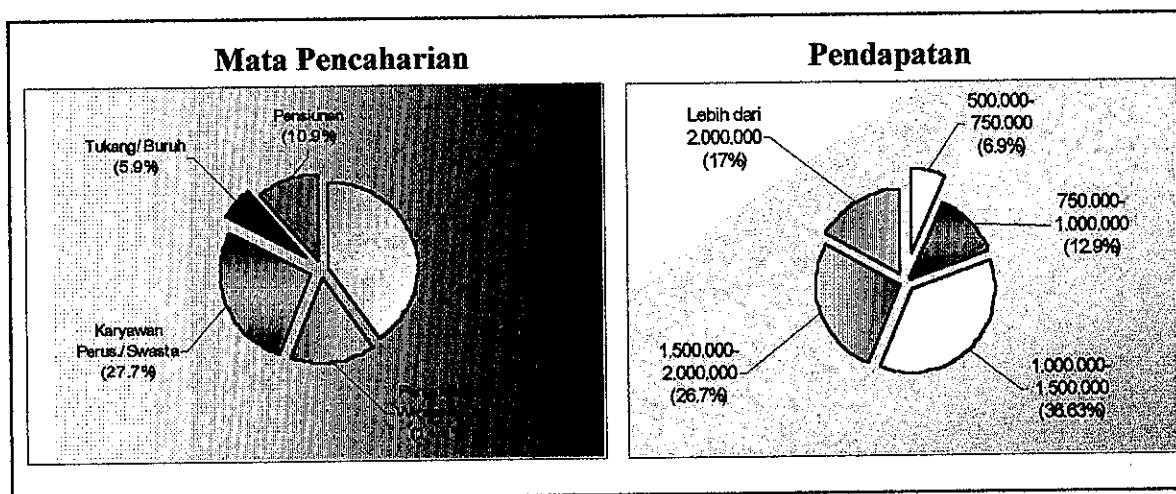
TABEL III.2  
PENDIDIKAN TERAKHIR KEPALA KELUARGA  
DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 2002

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKWENSI	PERSENTASE (%)
1.	Tidak Sekolah	0	0
2.	SD atau yang setingkat	0	0
3.	SLTP atau yang setingkat	11	10,9
4.	SLTA atau yang setingkat	34	33,7
5.	Diploma dan Sarjana	47	46,5
6.	Pasca Sarjana	9	8,9
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Survei, 2002

Tingkat pendapatan keluarga pun relatif tinggi, yaitu antara Rp. 1.000.000,00 – 1.500.000,00 (36,6 %). Tingkat pendapatan yang kurang dari Rp. 500.000,00 ataupun antara Rp. 500.000,00 – Rp. 750.000,00 relatif kecil, yaitu hanya 6,9 %. Hal ini terkait dengan mata pencaharian mereka yang rata-rata PNS/ABRI (40,6 %) dan karyawan perusahaan/swasta (27,7 %). Proporsi mata pencaharian/pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat dilihat pada gambar 3.8 di bawah ini.

**GAMBAR 3.8**  
**PROPORSI MATA PENCAHARIAN DAN TINGKAT PENDAPATAN**  
**MASYARAKAT DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 2002**



Sumber : Hasil Survei, 2002

Sedangkan karakteristik masyarakat dilihat dari jumlah anggota keluarga yang menempati rumah saat ini proporsinya adalah rata-rata 3-4 orang (47,5 %). 7,9 % adalah antara 1-2 orang, antara 5-6 orang adalah 32,7 %, dan lebih dari 6 orang adalah 11,9 %.

### 3.4.2 Pola Bermukim Masyarakat

Menurut pola bermukimnya, alasan ekonomis menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk bermukim di Kawasan SARBAGITA (55,4 %), selain pertimbangan kelengkapan fasilitas dan utilitas (21,8 %), serta pertimbangan keamanan dan kenyamanan di kawasan tersebut (22,8 %).

Hasil survai menunjukkan bahwa menurut pandangan masyarakat, ketersediaan fasilitas dan utilitas di kawasan ini relatif sudah mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari prosentase masyarakat yang sebagian besar menyatakan ketersediaan fasilitas dan utilitas di daerahnya sudah mencukupi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL III.3  
KETERSEDIAAN FASILITAS DAN UTILITAS DI KAWASAN SARBAGITA  
MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT TAHUN 2002

NO	KETERANGAN	FASILITAS (%)	UTILITAS (%)
1.	Lebih dari Cukup	27,7	17,8
2.	Cukup	63,4	71,3
3.	Kurang	8,9	10,9
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Survai, 2002*

Selain itu, relatif telah tercukupinya fasilitas yang ada di Kawasan SARBAGITA tercermin dari upaya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, dimana rata-rata masyarakat tidak harus pergi ke pusat kota (Kota Denpasar), kecuali untuk kebutuhan non rutin, seperti rumah sakit, bengkel, dan sebagainya (61,4 %). Prosentase masyarakat yang harus melakukan perjalanan ke pusat kota untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti sekolah, pasar, salon, belanja bulanan, dan sebagainya, relatif kecil, yaitu 8,9 %. Bahkan masyarakat yang sama sekali merasa tidak perlu ke pusat kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari cukup besar, yaitu 29,7 %.

Dalam hal keamanan dan kenyamanan, (dari 101 responden) 74,3 % menyatakan bahwa Kawasan SARBAGITA tersebut relatif aman dan nyaman, sekalipun tingkat pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik sangat tinggi dan pesat. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan fisik di kawasan ini selain dapat dilihat dari peta stadia perkembangan lahan terbangun di Kawasan SARBAGITA tahun 1993-2000 yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, juga terbukti dari prosentase persepsi masyarakat yang sebagian besar menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik di kawasan ini sangat tinggi dan pesat (68,3 %).

Dalam hal cara memperoleh tempat tinggalnya, oleh sebagian besar masyarakat di Kawasan SARBAGITA dilakukan dengan membeli tanah dan membangunnya sendiri (46,5 %). Sedangkan masyarakat yang membeli tanah dan rumah jadi secara tunai baik dari individu maupun developer/pengembang sangat kecil (5,9 %). Demikian pula halnya dengan cara menyewa, hanya 7,9 %. Terkait dengan pembangunan perumahan oleh developer/pengembang, 25,7 % masyarakat di kawasan ini memanfaatkan hal tersebut dalam perolehan tempat tinggalnya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel III.4.

TABEL III.4  
CARA MEMPEROLEH TEMPAT TINGGAL  
BAGI MASYARAKAT DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 2002

NO	CARA MEMPEROLEH RUMAH	FREKWENSI	PERSENTASE (%)
1.	Membeli tanah dan membangunnya sendiri	47	46,5
2.	Membeli tanah Kapling Siap Bangun (KSB) dan membangunnya sendiri	14	13,9
3.	Membeli tanah dan rumah jadi secara tunai dari individu/developer	6	5,9
4.	Membeli tanah dan rumah jadi secara kredit dari individu/developer	26	25,7
5.	Menyewa	8	7,9
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Survei, 2002

Beranjak dari pertimbangan ekonomis, kelengkapan fasilitas dan utilitas, serta keamanan dan kenyamanan dalam kawasan, tanpa disadari masyarakat sebagian besar juga mempunyai pertimbangan atau alasan yang terkait dengan budaya dalam menentukan lokasi bermukim/tempat tinggalnya. Hal ini terbukti dari 101 responden yang disurvei, 59,4 % menyatakan bahwa dalam menentukan lokasi bermukimnya, mereka juga mempertimbangkan lokasi yang berorientasi ke rumah asal/relatif dekat dengan rumah asal. Maksudnya adalah bahwa apabila mereka berasal dari Tabanan, Jembrana, dan Singaraja (sebelah barat Denpasar), maka mereka akan memilih lokasi bermukim di wilayah pinggiran bagian barat dari Kota Denpasar. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang berasal dari Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem (sebelah timur Kota Denpasar), kiblat mereka akan memilih lokasi bermukim di bagian timur atau utara Kota Denpasar.

Pertimbangan lokasi bermukim yang berorientasi pada rumah asal tersebut pada dasarnya terkait dengan frekwensi pulang ke rumah asal, alasan pulang, tanggung jawab di rumah asal, dan status keanggotaannya dalam desa adat. Menurut frekwensi pulang ke rumah asal, sebagian besar masyarakat menyatakan tidak tentu, tergantung keperluannya (54,5 %), yang menyatakan sering adalah 19,8 % dan yang menyatakan jarang 25,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa 74,3 % masyarakat memiliki mobilisasi yang tinggi terkait dengan rumah asalnya. Tingginya mobilisasi akibat ikatan budaya tersebut tampak dari alasan mereka pulang ke rumah asal, dimana sebagian besar masyarakat (76,2 %) memiliki alasan yang terkait dengan kegiatan adat istiadat/budaya, seperti upacara agama (*Dewa Yadnya/Piodalan*), upacara adat (*Butha Yadnya*), suka-duka (*Pitra Yadnya* dan *Manusa Yadnya*), serta gotong royong (*ngayahin banjar*) ataupun pertemuan *banjar* (*sangkep*).

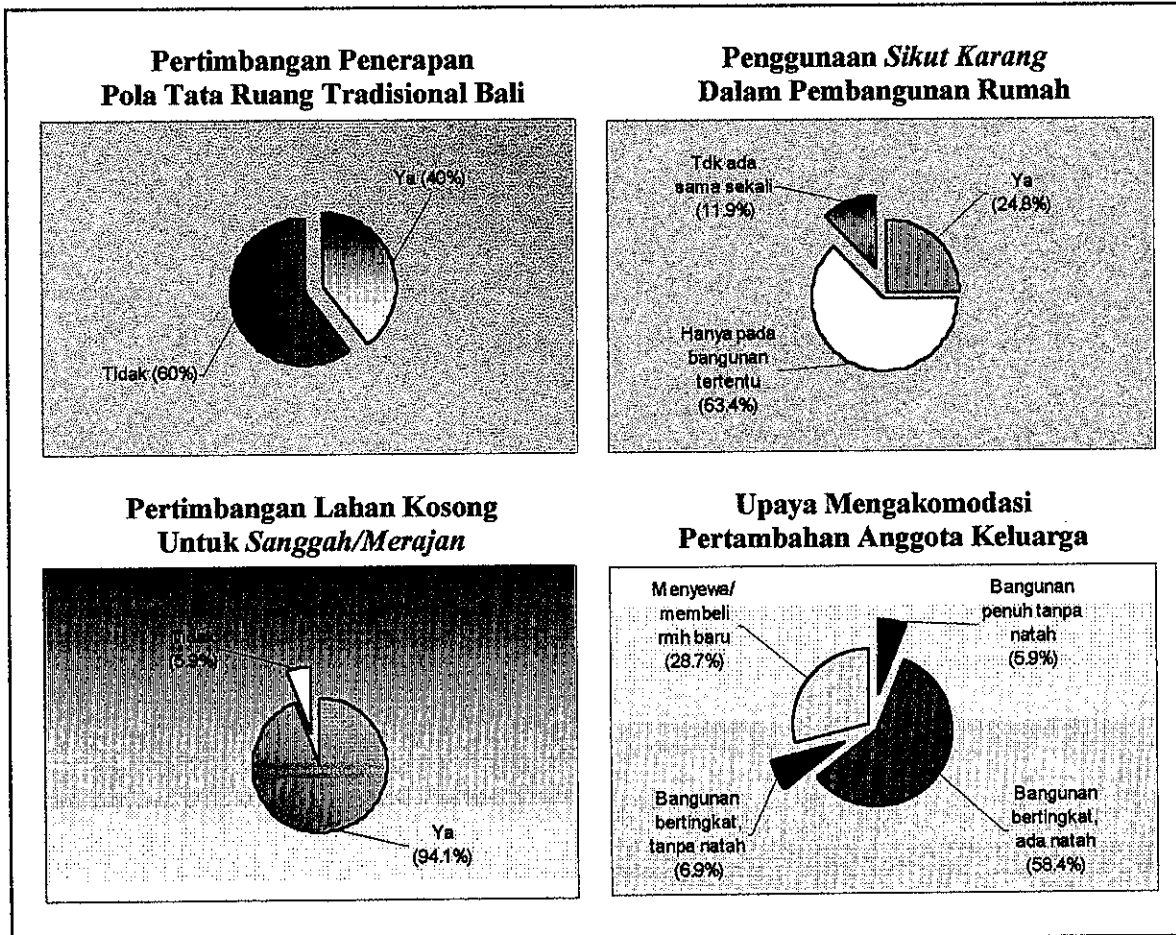
Selain itu, tanggung jawab ataupun kewajiban khusus di rumah asal yang terkait dengan budaya, seperti sebagai perangkat desa adat, *pengayah pengarep*, *pengayah penyada*, *pengayah pengele*, pemuka agama (*sulinggih/pemangku*), dan memenuhi kewajiban suka duka (karena mereka merupakan anggota desa adat di desa asalnya), juga menyebabkan tingginya mobilisasi mereka ke rumah asal. Hal ini terlihat dari 62,4 % responden yang menyatakan memiliki tanggung jawab atau kewajiban khusus terkait dengan budaya di rumah asalnya.

Sedangkan alternatif pemilihan lokasi bermukim yang cenderung berada di wilayah pinggiran Kota Denpasar disebabkan karena tingginya harga lahan (faktor ekonomi). Tingginya harga lahan tersebut disebabkan oleh langkanya lahan akibat keterbatasan ketersediaannya, sedangkan permintaan akan lahan perkotaan tersebut sangat tinggi. Keterbatasan lahan tersebut lebih dipicu oleh faktor budaya, seperti :

1. Adanya pembatasan ketinggian bangunan (83,2 % masyarakat menyatakan setuju).
2. Adanya batasan budaya dalam pemanfaatan ruang bawah tanah (18,8 % masyarakat yang setuju).
3. Adanya larangan pembangunan jalan layang atau jembatan penyeberangan/*fly over* (73,3 % masyarakat setuju dengan larangan tersebut).
4. Adanya kawasan-kawasan *self conservation* dalam konteks budaya yang sangat sulit digusur ataupun dialih-fungsikan, sekalipun sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan kota. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya : Pura *Sad Kahyangan*, Pura *Dang Kahyangan*, Pura *Kahyangan Tiga* (100 % masyarakat menyatakan bahwa pura tersebut tidak dapat digusur ataupun dialih-fungsikan), Pura *Paibon/Panti* (86,1 %), Pura *Dadia* (84, 2), *Sanggah/merajan* (52,5 %), Pura *Subak* (51,5 %), Rumah asal seperti *Criya*, *Puri*, *Jero*, dan *Umah Tua* (61,4 %), serta kuburan/*setra* (72,3 %).

Di lain pihak, pemilihan lokasi bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar juga disebabkan oleh pertimbangan untuk menerapkan pola tata ruang tradisional Bali pada penataan rumahnya. Sekalipun sebagian besar masyarakat di Kawasan SARBAGITA ini menyatakan bahwa tidak mempertimbangkan hal itu (60,4 %), namun yang mempertimbangkannya juga relatif tinggi (39,6 %). Besarnya prosentase masyarakat yang menyatakan tidak mempertibangkan penerapan pola tata ruang tradisional Bali ini kemungkinan besar disebabkan karena kurangnya pemahaman akan pola tata ruang tradisional Bali itu sendiri, sehingga pembangunan rumah yang sebenarnya secara tidak langsung sudah mengadopsi pola tersebut, dianggap tidak. Inkonsistensi ini tampak dari hasil survai yang menunjukkan bahwa 88,1 % masyarakat menggunakan *sikut karang* (ukuran-ukuran tradisional Bali) dalam pembangunan rumahnya, sekalipun tidak pada semua bangunan atau pada bangunan-bangunan tertentu saja, misalnya tempat suci (*sangah merajan*), pagar (*tembok penyengker*), dan pintu gerbang. Selain itu, 94,1 % masyarakat mempertimbangkan tempat kosong untuk membangun tempat suci. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat (58,4 %) yang tetap mempertahankan keberadaan *natah* (halaman), sekalipun terjadi penambahan jumlah anggota keluarga, yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan lahan dengan membangun rumah secara bertingkat, namun tetap menyediakan lahan untuk *natah* (halaman). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini.

GAMBAR 3.9.  
 PERBANDINGAN PERSEPSI MASYARAKAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN  
 PENERAPAN POLA TATA RUANG TRADISIONAL BALI  
 DI KAWASAN SARBAGITA TAHUN 2002



Sumber : Hasil Survei, 2002

## **BAB IV**

### **ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI DALAM FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA**

#### **4.1 Analisis dan Identifikasi Perwujudan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Kota Denpasar**

Pemahaman terhadap budaya masyarakat Bali dalam kaitannya dengan keruangan dan perkembangan kota, haruslah ditinjau dari sudut yang lebih luas, yaitu kebudayaan dan keagamaan. Kedua hal ini telah saling terintegrasi satu sama lain dan merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat Bali pada umumnya dan Kota Denpasar khususnya. Secara garis besar pemahaman ini akan dapat dilihat dari perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali tersebut dalam : (a) pola tata ruangnya, (b) sistem kemasyarakatannya, dan (c) sistem religi, upacara agama dan upacara adatnya.

##### **4.1.1 Perwujudan Budaya dalam Pola Tata Ruang Tradisional Bali**

Perwujudan budaya masyarakat Bali dalam pola tata ruang tradisional Bali ini, baik dalam arah orientasi ruang, lingkungan desa dan kota, pekarangan, serta dalam tata bangunan, akan membentuk konsep-konsep ruang yang secara runtut dari skala makro sampai pada komponen-komponen terkecil. Perwujudannya dalam arah orientasi ruang adalah bahwa dalam pandangan masyarakat Bali pada umumnya, arah orientasi utara-selatan (*kaja-kelod*), suci-tidak suci, hulu-hilir (*luan-teben*), *utama-nista*, berpedoman pada posisi gunung dan lautan. Arah gunung disebut *kaja*, suci, *luan*, *utama*, dan arah laut disebut *kelod*, tidak suci, *teben*, *nista*. Orientasi ini selalu dijadikan pedoman dalam sistem keruangan masyarakat Bali mulai dari wujud terkecil (seperti kamar tidur, pengaturan

ruang dalam rumah, dan pekarangan) sampai wujud makro (seperti tata ruang unit lingkungan, desa, dan bahkan kota) (Parimin, 1986; Meganada, 1990; Putra, 1991; RTRW Kota Denpasar, 1998; Kaler, tanpa tahun; Geriya, 2002).

Dengan tetap mengacu pada arah orientasi ruang tersebut, perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali dalam pola keruangan yang membentuk pola tata ruang tradisional Bali, seperti yang dinyatakan oleh para pakar/cendekiawan Hindu diantaranya adalah Wiana; Gunadha; Gunadi; Raka Klaci; Sugira; Musna; Rumawan; Gelebet; Geriya; Sura; Triguna; Suija; Sarjana; Jadnja; dan Sukayasa (2002), akan menimbulkan :

1. Adanya pola-pola permukiman yang khas dalam masyarakat Bali seperti adanya *Pura Kahyangan Tiga* berikut radius kesuciannya, adanya bangunan umum seperti *bale banjar*, adanya ruang-ruang terbuka seperti alun-alun/lapangan, *campuhan* dan mata air, pura dan daerah *kekeran*-nya (lahan dalam radius kesucian pura), *pempatan agung*, dan *setra* (kuburan), serta atribut kemasyarakatan, morfologi, fungsional, dan simbolis.
2. Adanya aturan-aturan dan pantangan-pantangan dalam hal perletakan lahan peruntukan, dimensi dasar bangunan, dan jarak antara dua fungsi, sehingga penempatan dan penataan suatu fungsi kegiatan tidak dapat dilakukan hanya dengan pertimbangan ekonomis, lokasi yang strategis, dan sebagainya.
3. Adanya konsepsi-konsepsi yang mengatur zonasi dan fungsi peruntukannya (seperti *Tri Hita Karana*, *Tri Mandala*, *Sanga Mandala*, *Luan-Teben*) sehingga penempatan serta penataan zonasi dan fungsi peruntukan harus mengikuti konsepsi-konsepsi tersebut, baik dalam lingkup mikro (pekarangan) maupun makro (desa dan kota).
4. Adanya aturan-aturan dalam pengukuran petak pekarangan dan pengukuran perletakan bangunan (*Hasta Kosala Kosali* dan *Hasta Bumi*), maka secara tidak langsung akan menuntut kebutuhan lahan yang relatif luas untuk bangunan rumah tinggalnya.

Terkait dengan perkembangan Kota Denpasar yang sangat pesat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup, dimana pengaruh dari perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali dalam pola tata ruang tradisional Bali tersebut akan mengurangi kemampuan kapasitas/daya tampung optimal Kota Denpasar, menyebabkan terjadinya ekstensifikasi perkembangan kota. Kecenderungan ini merupakan suatu fenomena terjadinya proses suburbanisasi, dimana fenomena tersebut pada gilirannya akan menyatukan ruang-ruang antar kota (aglomerasi kota-kota).

Selanjutnya, dengan mengacu pada kajian teoritis dan pernyataan beberapa pakar/cendekiawan Hindu, maka perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali dalam pola tata ruang tradisional Bali yang terkait dengan perkembangan Kota Denpasar, dapat diklasifikasikan dan diinterpretasikan karena adanya :

#### **A. Pertimbangan Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali**

Budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sudah mengakar dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya (*living culture*), sehingga eksistensi budaya tersebut dalam pola keruangan cenderung akan tetap terjaga, sekalipun ada pergeseran-pergeseran, namun hanya bersifat penyesuaian dan tidak akan keluar dari norma dasarnya. Ikatan-ikatan budaya yang tetap eksis tersebut menyebabkan kecenderungan masyarakat Hindu Bali untuk melaksanakan pembangunan rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali. Pembangunan rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali ini terkait dengan luas lahan yang dibutuhkan, dimana luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut relatif luas. Hal ini akan memberikan konsekuensi pergerakan permukiman ke arah luar atau pinggiran Kota Denpasar, karena harga lahan di dalam kota sangat tinggi. Ikatan-ikatan budaya yang menyebabkan

kecenderungan masyarakat Hindu Bali untuk melaksanakan pembangunan rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali antara lain disebabkan karena :

1. Budaya masyarakat Bali itu dijiwai oleh Agama Hindu, dan Agama Hindu itu sendiri memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Hindu Bali serta sifatnya sangat fleksibel, sehingga dengan sendirinya akan menjadi tetap eksis dan langgeng (Wiana, 2002; Rumawan, 2002; Gelebet, 2002; Geriya, 2002).
2. Konsepsi budaya masyarakat Bali dapat memberikan keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya, dan penerapannya dapat dilakukan berdasarkan tempat, waktu, dan situasi/kondisi (*desa, kala, patra*). Selain itu orang selalu mencari sesuatu yang unik dan menarik, sehingga lebih banyak kembali ke pola-pola tradisional (Gunadha, 2002; Gunadi, 2002).
3. Adanya keterikatan yang besar dari masyarakat Bali terhadap nilai-nilai budaya Bali dan Agama Hindu (Sugira, 2002).
4. Hal ini bersifat kontekstual, bahwa orang berkeinginan untuk merasionalkannya tapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu tersebut. Pergeseran memang terjadi, namun hal-hal prinsip dalam bentuk nilai dan norma tidak mungkin diabaikan (Triguna, 2002).
5. Unsur religius dalam masyarakat Hindu Bali tidak akan lekang dimakan usia atau langgeng sepanjang masa, karena ajaran Agama Hindu bukan sebatas teori saja namun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ajaran itu akan hilang, apabila masyarakatnya juga hilang (Sarjana, 2002).
6. Agama Hindu menjadi jiwa adat dan budaya Bali, sehingga eksistensi penerapan konsepsi budaya masyarakat Bali dalam seluruh segi kehidupan masyarakat Bali akan tetap terpelihara (Sukayasa, 2002).

## B. Kebutuhan Lahan untuk Rumah bagi Masyarakat Hindu Bali Relatif Luas

Seperti yang telah disinggung di depan, bahwa masyarakat Hindu Bali cenderung melaksanakan pembangunan rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali. Kecenderungan tersebut menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan rumahnya relatif luas. Beberapa ahli memberikan pernyataan yang bervariasi terkait dengan luas minimal lahan ini. Beragamnya pernyataan ahli tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV.1  
PERNYATAAN PAKAR TERKAIT DENGAN LUAS MINIMAL LAHAN  
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT HINDU BALI

NO	PAKAR	LUAS MINIMAL LAHAN (m <sup>2</sup> )
1.	WIANA	Relatif
2.	GUNADHA	400
3.	GUNADI	150 – 300
4.	RAKA KLACI	Relatif
5.	SUGIRA	400
6.	MUSNA	500
7.	GELEBET	300
8.	GERIYA	Relatif
9.	SURA	900
10.	TRIGUNA	Relatif dan Fleksibel
11.	SUIJA	Tidak ada ketentuan
12.	SARJANA	Tidak ada ketentuan
13.	JADNJA	Tidak ada ketentuan
14.	SUKAYASA	250 – 300

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa luas minimal lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Hindu Bali dalam membangun rumah (di luar *umah tua*-nya) relatif besar, yaitu antara 150 m<sup>2</sup> sampai 900 m<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena masih dipergunakannya atau dipedomaninya ukuran-ukuran tata ruang tradisional Bali (*sikut karang*) tertentu yang mengatur pembangunan rumah tersebut, dimana diyakini bahwa apabila *sikut karang*

tersebut diterapkan akan dapat mendatangkan keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, serta akan terhindar dari segala bentuk kesengsaraan kehidupan. Oleh karenanya masyarakat Hindu Bali cenderung berusaha memenuhi aturan-aturan tersebut (Wiana; Gunadha; Gunadi; Raka Klaci; Sugira; Musna; Gelebet; Geriya; Sura; Triguna; Suija; Sarjana; Jadnja; dan Sukayasa, 2002). Namun pada kenyataannya hal ini terbentur dengan terbatasnya dan tingginya harga lahan di pusat Kota Denpasar, sehingga untuk dapat menerapkan pola tata ruang tradisional Bali itu, mereka akan mencari lahan di luar pusat kota. Maka dari itu, pengembangan permukiman akan bergeser ke arah pinggiran kota atau di wilayah-wilayah *hinterland* yang terdekat dengan Kota Denpasar (mobilisasi permukiman).

### C. Pembatasan Ketinggian Bangunan

Adanya pengaruh budaya masyarakat Bali dalam hal pembatasan ketinggian bangunan yang ditentukan tidak lebih tinggi dari pohon kelapa (15 m atau 3-4 lantai), menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan ruang di Kota Denpasar, atau dengan kata lain pembangunan di Kota Denpasar tidak dapat dilakukan secara intensif padahal ketersediaan lahan untuk kegiatan perkotaan semakin terbatas dan langka (Rumawan, 2002). Pengaruh budaya dalam pembatasan ketinggian bangunan ini antara lain berkaitan dengan :

1. Tataran penghormatan kepada Tuhan dan leluhur yang disucikan. Artinya kalau rumah kita akan dibuat tinggi, maka seharusnya rumah Tuhan dan leluhur itu lebih tinggi lagi. Kalau sekarang diberikan membuat bangunan setinggi 20 m misalnya, maka pura yang jumlahnya ribuan itu juga harus dibuat lebih tinggi dari 20 m. Sedangkan dalam pembangunan pura, ada ketentuan yang mengharuskan untuk dibangun bersentuhan

dengan tanah. Jadi tidak mungkin pura dibangun tidak bersentuhan dengan tanah. Jangan sampai bangunan-bangunan yang bersifat madya dan *nista* melebihi ketinggian pura dan tempat suci yang bersifat suci dan agung (Wiana, 2002; Gunadha, 2002; Raka Klaci, 2002; Sarjana, 2002).

2. Pertimbangan Konsepsi *Tri Hita Karana* : tiga hal yang menyebabkan keserasian/harmonisasi yaitu harmonisasi manusia dengan Tuhannya (dalam wujud *parhyangan*), manusia dengan sesamanya (dalam wujud *pawongan*), dan manusia dengan lingkungan alam (dalam wujud *palemahan*). Maka, pembatasan ketinggian bangunan tersebut semata-mata adalah wujud dari keharmonisan tersebut, sehingga dapat tetap menjaga keseimbangan alam, kelestarian tata ruang Bali secara keseluruhan, kesucian dan religiusitas Bali, serta dapat mewujudkan Bali yang berbudaya dan manusiawi. Selain itu juga karena adanya Konsep *Segara-Gumung*, dimana yang paling suci dan letaknya tertinggi adalah gunung dan yang paling kotor/*nista* adalah *segara* (laut) (Gunadi, 2002; Sugira, 2002; Sura, 2002; Triguna, 2002; Sujja, 2002; Jadnja, 2002; Sukayasa, 2002).
3. Terkait dengan atmosfir alam Bali, dimana pembangunan yang dilakukan tidak mengganggu atmosfir daratan. Selain itu kalau dilihat dari atas seolah-olah Bali itu diselimuti oleh pohon kelapa sehingga terlihat hijau dan *skyline* yang terbentuk adalah *skyline* alami. Konsep hijau itu sebenarnya adalah perwujudan dari rasa penghargaan dengan alam. Pada prinsipnya masyarakat Bali ingin hidup bersatu dengan alam (alami), karena pohon yang dipandang ideal dan mendominasi pohon-pohon di Bali adalah pohon kelapa, maka orientasinya adalah pohon kelapa, sehingga apabila ketinggian bangunan melebihi pohon kelapa, maka keserasian alam dan bangunan akan berkurang dan bahkan hilang sama sekali (Musna, 2002; Gelebet, 2002; Triguna, 2002).

4. Ketinggian pohon kelapa itu memberi makna bahwa skala manusia masih dalam tataran filosofi *Tri Hita Karana*, artinya dengan batasan ketinggian tersebut, manusia itu masih merasa dihargai sebagai manusia (*humanis*) (Rumawan, 2002).
5. Unsur spiritual dan unsur budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu. Unsur spiritualnya adalah orang Bali itu sampai sekarang masih berorientasi pada *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan Jagat*. Bangunan induk yang tertinggi di dalam kedua *Kahyangan* tersebut adalah *candi kurung/kori agung* yang tingginya rasanya masih di bawah pohon kelapa, jadi bangunan lain di luar kedua *kahyangan* tersebut supaya jangan lebih atau melampaui ketinggian itu. Sehingga suasana magis religius dan spiritualitasnya tetap terjaga. Sedangkan kaitannya dengan unsur budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu adalah nilai naturalis yaitu harmonis, seimbang, serasi, dan keutuhan estetika publik (Geriya, 2002).

Kondisi ini menjadi semakin dilematis karena menurut beberapa pakar, selain faktor budaya masyarakat Bali tersebut memberi batasan dalam pembangunan secara vertikal ke udara, juga memberikan batasan dalam pemanfaatan ruang secara vertikal ke bawah tanah. Batasan-batasan budaya tersebut adalah berkaitan dengan :

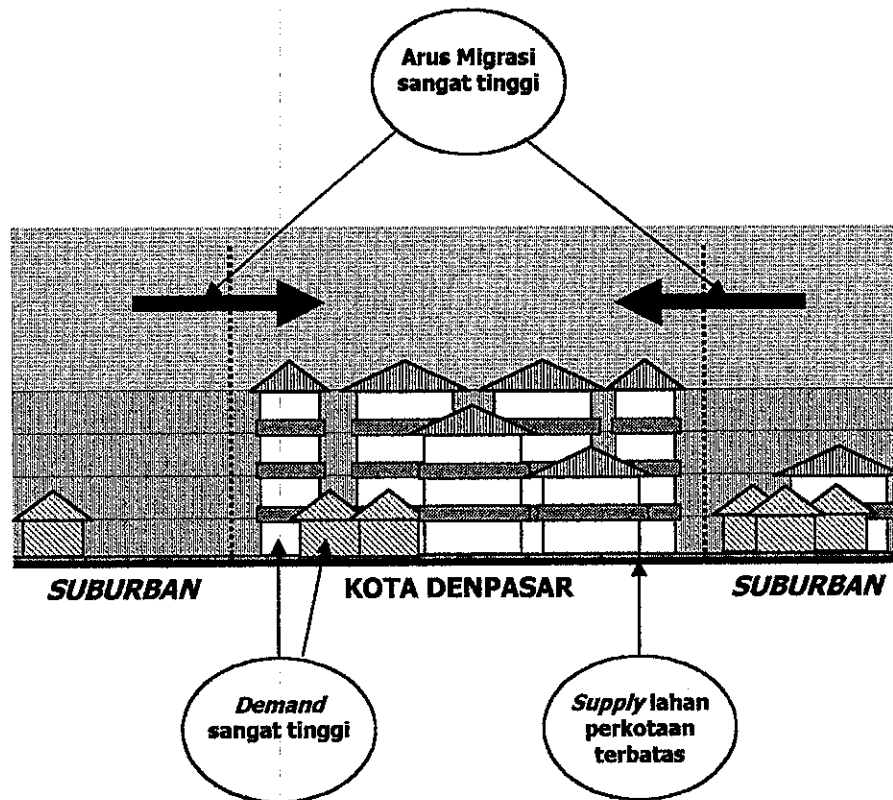
1. Konsep filosofis dan logika Agama Hindu, dimana alam ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu alam *swah loka* (ruang angkasa/alam Tuhan), alam *Bhuah Loka* (bumi/alam manusia), dan alam *Bhur Loka* (alam bawah tanah/alam *bhuta/sarwa prani*). Sehingga kalau kita membangun ke bawah berarti kita berada pada alam *bhuta/sarwa prani*. Selain itu, hal ini dapat dijelaskan dengan Konsep *Bhuta Hita*, bahwa alam bawah tanah pun ada yang menjaga kesejahteraannya, seperti air bawah tanah, dan sebagainya. Oleh karenanya, pembangunan ke bawah itu harus disiasati dengan teknologi yang ada agar

tidak mengganggu *Bhuta Hita* tersebut. Karena kalau sampai terganggu, maka alam akan berbalik mengganggu kita. Prinsipnya adalah agar tercipta suatu keharmonisan dan keseimbangan (Wiana, 2002; Gunadha, 2002; Gunadi, 2002, Sukayasa, 2002).

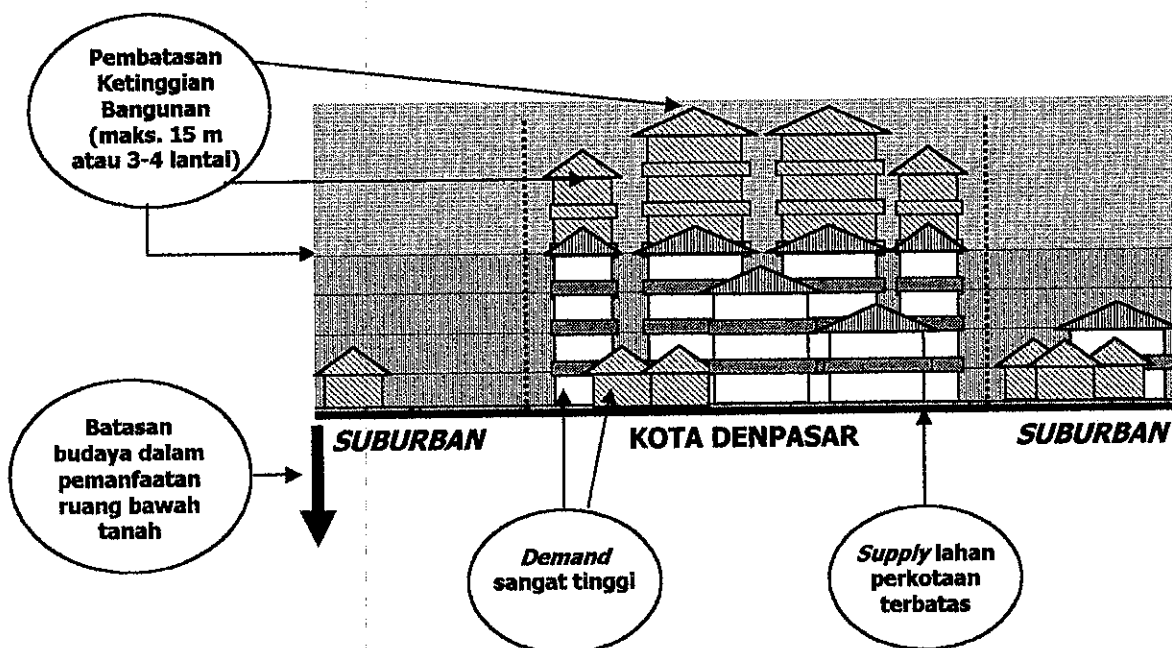
2. Adanya ikatan masyarakat Bali yang kuat dengan tanah seperti : penanaman *puspa sarira* dari arwah leluhur yang diperabukan, penanaman *pedagingan*, menanam *caru*, menanam ari-ari bayi, memasang *penjor*, dan lain-lain. Sehingga apabila pembangunan rumah dilakukan secara vertikal ke bawah tanah, tentu saja prosesi yang mengikat tersebut akan sulit dilakukan (Musna, 2002).
3. *Anantaboga*, yaitu bahwa alam bawah sudah ada yang menempati, sehingga kalau kita mengekspansinya maka alam bawah tersebut akan mengalami ketergangguan dan praktis akan mengganggu keseimbangan alam. Manusia dalam Agama Hindu sudah diatur untuk menempati alam *Bhuah Loka*, dan tidak *nyulubin* (berada di bawah tanah, karena dianggap kotor/*nista*/profan) (Gelebet, 2002).
4. Pemanfaatan ruang bawah tanah secara budaya dapat dibenarkan, namun tetap berpegang pada hukum naturalis. Maksudnya adalah karena ketinggian bangunan mengacu pada pohon kelapa, maka tinggi pohon kelapa yang 15 m tersebut tidak mungkin akarnya akan 15 m juga, jadi rasionya mungkin yang dilihat, apakah 2 berbanding 1 atau 3 berbanding 1, dan tidak mungkin 1 berbanding 1 (Geriya, 2002).

Berdasarkan perwujudan budaya dalam pola tata ruang tradisional Bali yang terkait dengan adanya pertimbangan penerapan pola tata ruang tradisional Bali, kebutuhan lahan untuk rumah bagi masyarakat Hindu Bali yang relatif luas, dan pembatasan ketinggian bangunan, maka secara hipotetis dapat digambarkan melalui sketsa seperti pada gambar 4.1 sampai gambar 4.3 di bawah ini.

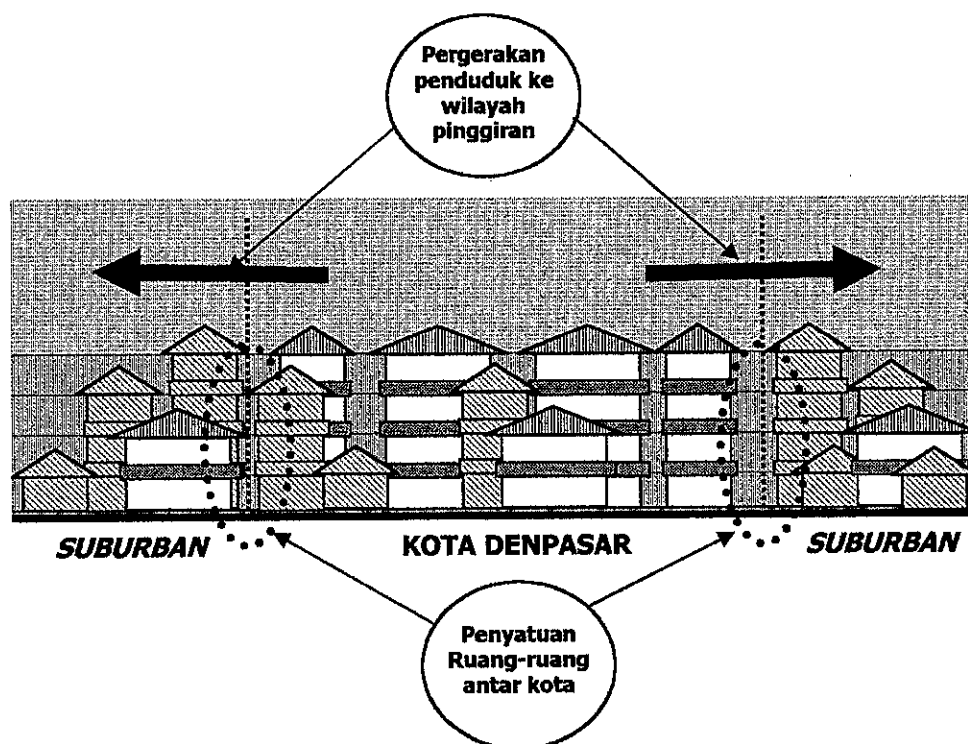
GAMBAR 4.1  
AWAL PERKEMBANGAN KAWASAN SARBAGITA



GAMBAR 4.2  
PENGARUH BUDAYA DALAM PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN



GAMBAR 4.3.  
FENOMENA SUBURBANISASI DI KAWASAN SARBAGITA



#### 4.1.2 Perwujudan Budaya dalam Sistem Kemasyarakatan

Bagus (1970) mengungkapkan bahwa sistem kemasyarakatan di Bali pada dasarnya digolongkan menjadi dua yaitu :

##### A. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan merupakan pendekatan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang terbentuk menurut adat yang berlaku dan dipengaruhi oleh adanya ikatan-ikatan dalam bentuk-bentuk kekerabatan (*nyama, braya, soroh, warga*) dan bentuk-bentuk ikatan kekeluargaan lainnya yang membentuk unit kesatuan kemasyarakatan yang merupakan ikatan keturunan. Ikatan-ikatan upacara adat dalam satuan keturunan sebagai bentuk sistem kemasyarakatan terutama adalah kehadiran bersama dalam upacara-upacara

*Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya* dan *Dewa Yadnya* dalam batas-batas tertentu (Sudarna, 1995 : 15). Selanjutnya bentuk-bentuk kekerabatan tersebut akan membentuk klen-klen keluarga, seperti : kelompok kekerabatan yang disebut *Dadia* (keturunan) dan *Pekurenan* (kelompok kekerabatan yang terbentuk akibat adanya perkawinan dari anak-anak yang berasal dari suatu keluarga inti). *Pekurenan* terbentuk sebagai akibat dari adanya perkawinan dan merupakan unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan di Bali. Sebagai unit kesatuan masyarakat yang terkecil, *pekurenan* ini akan membangun atau mendirikan tempat pemujaan di rumahnya yang disebut *kemulan taksu/turus lumbung (sanggah/merajan)*. Kemudian apabila *pekurenan* ini sudah bertambah banyak jumlahnya, maka anggota kerabatnya akan membentuk keluarga yang lebih besar yang disebut *tunggal dadia* (klen kecil) dan akan mendirikan *Pura Dadia*. Selanjutnya, apabila kelompok kerabat *tunggal dadia* yang jumlahnya lebih dari satu atau merupakan kumpulan dari sejumlah *tunggal dadia*, memuja leluhur yang sama, akan membentuk *soroh* (klen besar) dan akan mendirikan *Pura Panti/Paibon* (Bagus, 1970 : 10-11).

Bagi Kota Denpasar yang menghadapi ketebatasan lahan, tentu saja hal tersebut menjadi masalah, karena pertambahan jumlah *pekurenan*/keluarga, *tunggal dadia*, dan *soroh* tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah permintaan ruang dan lahan untuk bangunan pura. Namun hampir seluruh pakar menyatakan bahwa secara kontekstual hal ini tidak otomatis memiliki arti bahwa pertambahan jumlah *pekurenan*/keluarga, *tunggal dadia*, dan *soroh* akan meningkatkan jumlah permintaan ruang dan lahan untuk bangunan pura, kecuali lahan untuk tempat suci (*sanggah/merajan*) bagi masing-masing keluarga yang akan membangun rumah baru. Lahan untuk tempat suci (*sanggah/merajan*) ini identik dengan kebutuhan lahan untuk perumahan bagi masyarakat. Kaitan budaya masyarakat Bali dalam hal ini adalah :

1. Adanya kepercayaan dalam masyarakat Hindu Bali bahwa Tuhan ada di mana-mana, sehingga harus diberikan tempat (*disthanakan*) dalam setiap ruang kehidupan (Jadnja, 2002). Selain itu, pada dasarnya manusia tidak akan mungkin dapat hidup tanpa jiwa/roh (*atman* yang bersumber dari Tuhan), tanpa adanya manusia lain dan tanpa dukungan lingkungan. Oleh karenanya, maka dalam setiap rumah wajib dibangun *sanggah/merajan* sebagai perwujudan taqwa, hormat, cinta kasih dan niat mendekatkan diri dengan Tuhan (Sukayasa, 2002).
2. Rumah itu identik dengan manusia. Kalau manusia sebagai mikro kosmos, maka rumah adalah makro kosmosnya. Sehingga rumah itupun memiliki kepala, badan, dan kaki. Kepala adalah tempat suci (*sanggah/merajan*), badannya adalah rumah tinggal, dan kaki adalah halaman belakang. Disamping itu di dalam Kitab *Manawa Darma Sastra* disebutkan bahwa rumah tinggal kita itu adalah untuk yang telah meninggal (leluhur, dalam wujud tempat suci), untuk yang masih hidup (dalam wujud rumah), dan yang akan lahir (dalam wujud halaman/ruang kosong sebagai cadangan lahan bagi anak cucu) (Wiana, 2002; Triguna, 2002). Dalam *Lontar Ciwa Gama* disebutkan bahwa : setiap 1 *pekurenan*, harus ada 1 *Kemulan (sanggah/merajan)*, setiap 10 *pekurenan* harus ada 1 *Pertiwi*, setiap 20 *pekurenan* harus ada 1 *Pura Ibu*, setiap 20 *Ibu* harus ada 1 *Pura Dadia*, setiap 40 *Ibu* harus ada 1 *Pura Panti*, dan setiap 40 *Panti* harus ada 1 *Pura Pedarman*. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa pada tingkat *Pertiwi* ke atas *Pura Ibu* sampai *Pura Pedarman*, tidak memerlukan pengembangan pura lagi, hanya statusnya yang berubah/meningkat (Wiana, 2002; Raka Klaci, 2002).
3. Ajaran agama Hindu tentang kewajiban menyembah leluhurnya yang *disthanakan* di *sanggah/merajan*-nya masing-masing (Gunadha, 2002; Musna, 2002; Gelebet, 2002). Terkait dengan peningkatan jumlah permintaan ruang atau lahan untuk bangunan pura,

sesungguhnya hal tersebut bukannya akan menyebabkan terjadinya pengembangan pura baru, karena masing-masing *tunggal dadia* dan *soroh*, sudah memiliki *Pura Dadia* maupun *Pura Panti*, sehingga anggota *tunggal dadia* dan *soroh* baru yang bertambah akibat bertambahnya *pekurenan*, cenderung akan memuja/*menyungsung* *Pura Dadia* maupun *Pura Panti* yang sudah diwariskan tersebut (Gunadha, 2002; Sugira, 2002; Musna, 2002; Sura, 2002; Triguna, 2002; Suija, 2002, Jadnja, 2002; Sukayasa, 2002).

4. Terkait erat dengan Konsep *Tri Hita Karana*. Bahwasanya hal tersebut merupakan perwujudan hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*). Apabila hal ini tidak ditaati, biasanya terkait dengan nilai-nilai rasa (*niskala/nir-rupa*) yang diyakini merupakan penyebab segala gangguan rumah tangga dan kesengsaraan (Gunadi, 2002; Raka Kiaci, 2002; Sugira, 2002, Sura, 2002; Suija, 2002; Sarjana, 2002). Sedangkan peningkatan jumlah ruang/lahan untuk pembangunan pura akibat pertambahan jumlah *pekurenan/keluarga*, *tunggal dadia*, dan *soroh*, dapat dijelaskan bahwa secara kualitas pura tersebut memang harus ditingkatkan, namun secara kuantitas tidak akan bertambah. Apabila jumlah warga/*penyungsung*-nya bertambah banyak maka diatur mekanisme upacaranya, misalnya waktu upacara (*nyejer*) lebih lama (Gunadi, 2002; Gelebet, 2002).
5. Dalam budaya Hindu, ada sesuatu yang bisa dirubah dan ada sesuatu yang kontinuiti, berlanjut dalam permukiman orang Bali. Yang berlanjut antara lain adalah suci dan profan (*luan-teben*) atau yang berkaitan dengan tata nilai, dan wujud dari suci itu adalah tempat pemujaan kepada Tuhan/leluhur (*sanggah/merajan*). Namun pertambahan jumlah *pekurenan/keluarga*, tidak akan menambah jenis *tunggal dadia* dan *soroh*. Sehingga tidak akan meningkatkan jumlah permintaan ruang dan lahan untuk bangunan pura, yang bertambah adalah jumlah permintaan lahan atau ruang untuk perumahan.

Jumlah *pekurenan*/keluarga memang akan selalu bertambah karena adanya perkawinan/*grahasta*, namun *tunggal dadia* maupun *soroh* tidak akan bertambah jenisnya, artinya anggotanya saja yang akan bertambah, jenisnya tetap. Sehingga dapat disebutkan bahwa bertambahnya jumlah *pekurenan*/keluarga apabila dia keluar dir rumah orang tuanya dan membangun rumah baru, praktis dia akan mendirikan *sanggah/merajan kemulan* dan *taksu*, tapi Pura *Dadia* dan Pura *Panti* akan tetap jumlahnya karena keluarga yang baru terbentuk itu akan mengikuti *tunggal dadia* atau *soroh* yang sudah ada dan biasanya mengikuti garis *purusa*/laki-laki, yang wanita akan berubah *tunggal dadia* maupun *soroh*-nya mengikuti suaminya, kecuali yang laki-laki *nyentana* (yang dianggap *purusa* pihak wanita, agar keturunannya keluarganya tidak terputus karena tidak memiliki anak laki-laki) (Geriya, 2002).

## **B. Desa Pekraman**

Dalam hal ini, sistem kemasyarakatan membentuk kesatuan-kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah/teritorial, wilayah administrasi dan atau kesatuan wilayah adat. Desa/kelurahan secara tradisional adalah wilayah desa adat, dan wilayah desa adat ini terbagi lagi menjadi satu kesatuan sosial yang lebih kecil yang disebut *banjar* yang berfungsi dan berperan dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan, adat dan kegiatan masyarakat lainnya (*Desa Pekraman*).

Dalam *Desa Pekraman* ini terdapat ikatan-ikatan yang menentukan hak dan kewajiban anggota keluarga, baik di *banjar* maupun di desa adat. Ikatan-ikatan dalam persekutuan *banjar* ataupun desa adat tersebut diantaranya adalah :

1. Status *Pengayah Pengarep* (warga wajib utama), mereka yang berstatus sebagai kepala keluarga inti senior garis laki-laki yang menetap dan menempati rumah atau pekarangan leluhur keluarga tersebut dengan hak dan kewajiban penuh.
2. Status *Pengayah Penyade* (warga wajib pendamping), adalah saudara atau adik laki-laki dari keluarga inti senior, warga ini bisa mewakili *Pengayah Pengarep* dan bisa tetap tinggal di keluarga inti senior dan berstatus sebagai pewaris sah secara patrilineal.
3. Status *Pengayah Pengele* (warga pendatang), adalah mereka yang berstatus anggota persekutuan *banjar*, karena secara teritorial berada di sekitar atau di wilayah *banjar*.

Sistem kemasyarakatan dalam *Desa Pekraman* ini akan menyebabkan terjadinya ikatan-ikatan dalam masyarakat Hindu Bali dengan desa asalnya dimana rumah asal/*umah tua*-nya berada, karena biasanya mereka akan tetap menjadi warga desa adat di desa asalnya atau cenderung enggan untuk pindah dari keanggotaan desa adat di tempat mereka bergabung semula, sekalipun tempat tinggalnya saat ini berada jauh di luar wilayah desa adat tersebut, dan akan lebih efektif apabila mereka bergabung dengan desa adat yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Padahal dalam sistem kemasyarakatan dengan pola menetap di Bali, anggota masyarakat Hindu Bali boleh keluar dari keanggotaan satu desa adat dan bergabung dengan desa adat yang lain, walaupun tempat tinggalnya tetap berada di wilayah desa adat yang pertama. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Ikatan *kawitan*/asal muasal, sehingga orang takut akan dikucilkan oleh masyarakat di desa asalnya kalau dia tidak menjadi warga desa adat di sana (Wiana, 2002).
2. Lekatnya nilai-nilai rasa emosional keagamaan, adanya ikatan rasa kekerabatan yang mendalam dengan anggota desa adat di desa asalnya, adanya ikatan leluhur di desa adat

asalnya (spiritual psikologis), kuburan (*setra*) yang sudah diatur dan dikapling sesuai dengan *soroh*-nya, berpindah desa adat sama artinya dengan pindah kuburan dan pindah kuburan itu sangat sulit prakteknya (Gunadi, 2002; Raka Klaci, 2002; Sugira, 2002; Sura, 2002; Suija, 2002).

3. Ikatan leluhur dan tempat pemujaan nenek moyangnya masih berada di rumah asal yang berada desa asal. Sehingga dalam kepercayaan masyarakat Bali, arwah nenek moyangnya tersebut tunduk pada desa adat dimana rumah asal itu berada. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan kegiatan upacara di tempat yang lain, maka mereka akan terikat secara *niskala* (nir rupa) pada *tirta* (air suci) dari *Pemerajan Agung* dimana mereka berasal, dan *Pemerajan Agung* ini tunduk pada adat dimana *Pemerajan Agung* tersebut didirikan (Musna, 2002).
4. Adanya solidaritas sosial yang tinggi dalam masyarakat Bali. Solidaritas itu terjadi karena adanya ikatan-ikatan emosional yang terbina selama puluhan tahun secara turun temurun, sehingga membentuk suatu hubungan kekerabatan ataupun *desa pekraman*. Selain itu ada ikatan yang kuat antara masyarakat Bali dengan tanah di desa tempat asal/kelahirannya (*sangkan paraning numadi*). Karena dalam budaya Bali, budaya tersebut mengakar pada tanah tempat kelahirannya (Gelebet, 2002; Triguna, 2002; Sarjana, 2002; Sukayasa, 2002).
5. Pertimbangan secara agama, itu tidak dilarang namun yang menyebabkan adalah adanya ikatan budaya/adat istiadat dengan tanah kelahiran (*ued-nya*) atau yang disebut *pekraman*. Orang Bali itu terikat pada Agama, *Pekraman*, *Soroh*, dan Profesi. Keempat hal inilah yang menyebabkan orang Bali itu sebagian besar tidak mau keluar dari desa adat di tanah kelahirannya (Gunadha, 2002; Geriya, 2002).

Adanya ikatan-ikatan dengan rumah asal tersebut menyebabkan terjadinya kecenderungan untuk memilih lokasi bermukim yang selalu berorientasi pada rumah asalnya (selain pertimbangan ekonomis, kelengkapan fasilitas dan utilitas, serta keamanan dan kenyamanan), karena frekwensi mereka untuk melakukan kegiatan budaya di tempat asal tersebut (yang mengharuskan mereka pulang kampung) relatif tinggi. Sehingga hal tersebut menyebabkan kecenderungan bagi para migran untuk memilih lokasi tempat tinggal di wilayah pinggiran kota, karena selain dekat ke pusat kota (alasan ekonomis), juga dekat dengan rumah asalnya (alasan budaya). Dalam kaitannya dengan perkembangan Kota Denpasar, hal ini akan mendorong cepatnya perkembangan kota secara ekstensif dan meningkatkan perluasan kawasan perkotaan (*extended urban area*).

#### **4.1.3 Perwujudan Budaya dalam Sistem Religi, Upacara Agama, dan Upacara Adat**

Seluruh pakar yang diwawancarai menyatakan bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan upacara agama dan upacara adat *Panca Maha Yadnya* (*Dewa Yadnya*, *Resi Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusia Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya*), sudah barang tentu akan menemukan permasalahan dari pemanfaatan ruang Kota Denpasar, karena ruang-ruang untuk kebutuhan upacara tersebut harus dipertahankan, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk pembangunan, perbaikan dan penataan sarana serta prasarana upacara. Ruang-ruang yang harus dipertahankan keberadaannya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan upacara agama dan upacara adat, sekalipun ruang/lahan itu bernilai ekonomis tinggi apabila dijual, adalah (dirumuskan dari pendapat pakar, 2002) : (1) *pempatan agung* sebagai tempat *mecaru* dan memutar *wadah*, (2) pesisir pantai, (3) sumber-sumber air (*beji*, *pancoran*, *campuhan*, air bawah tanah, danau, waduk), (4) alun-alun atau lapangan, (5) wilayah batas kesucian pura sesuai dengan jenis puranya (*daerah kekeran*).

Perwujudan budaya masyarakat Bali dalam sistem religi dan upacara ini juga mempengaruhi pertimbangan tidak diperbolehkannya pembangunan jalan layang dan jembatan penyeberangan (*fly over*) sebagai alternatif pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar. Sehingga konsekwensinya adalah terjadinya peningkatan ratio kemacetan dan menurunnya tingkat keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. Dengan demikian, hal ini akan menjadi salah satu faktor pendorong percepatan proses ekstensifikasi perkembangan kota ke wilayah pinggiran. Nilai-nilai budaya yang mempengaruhinya antara lain karena :

1. Banyak kegiatan keagamaan dimana ada keharusan menghadirkan Tuhan dalam manifestasi dewa-dewa untuk mengelilingi wilayahnya (*ngelawang*) dalam waktu-waktu tertentu atau menyucikan sarana upacara ke laut (*melis*) atau harus dikumpulkan di suatu tempat (*paruman dewa*). Pada saat-saat seperti itu tidak boleh berjalan lewat bawah jalan layang/jembatan penyeberangan tersebut karena dapat berakibat hilangnya kesucian (*leteh*) (Gunadha, 2002; Raka Klaci, 2002; Sugira, 2002; Sura, 2002)
2. Faktor religius (kesucian) akan sangat terganggu apabila prosesi (terutama acara *melasti* dan beberapa prosesi keagamaan lain seperti *ngaben*, *ngelawang*, dan sebagainya) harus *nyulubin* (berjalan di bawah jalan/jembatan). Hal ini merupakan wujud dari peradaban spiritual. Terkait dengan hal tersebut, maka akan sangat sulit membangun jalan/jembatan layang karena hampir di seluruh ruas jalan di Kota Denpasar dilalui oleh prosesi tersebut (Gunadi, 2002; Gelebet, 2002; Suija, 2002; Geriya, 2002; Jadnja, 2002).
3. Agama Hindu sangat mengagungkan *sor* (bawah, kaki) dan *singgih* (atas, kepala), sangat rikuh rasanya apabila kepala seseorang dilangkahi oleh orang lain, demikian pula halnya dengan dewa-dewa yang dipuja sebagai sesuatu yang suci/sakral/utama dan sangat dihormati oleh masyarakat Bali (*penyungsungnya*) (Musna, 2002).

Perwujudan falsafah budaya masyarakat Bali dalam sistem religi, upacara agama, dan upacara adat ini secara tidak langsung juga akan menimbulkan adanya ikatan-ikatan budaya yang mengakibatkan terwujudnya kawasan-kawasan *self conservation* seperti : rumah tradisional Bali (*Umah, Griya, Puri, Jero* termasuk *sanggah/merajan, telajakan, lebu*, dan *natah-nya*), tempat suci (pura) dan kawasan suci berikut radius kesuciannya, ruang-ruang terbuka untuk kegiatan upacara, dan sebagainya. Kuatnya eksistensi budaya menyebabkan kawasan-kawasan yang merupakan warisan turun temurun tersebut, sangat sulit atau kecil kemungkinannya untuk dipindahkan (digusur) ataupun dialih-fungsikan. Norma ini sangat ditaati oleh masyarakat Bali pada umumnya sebagai bagian dari kehidupannya (*living culture*).

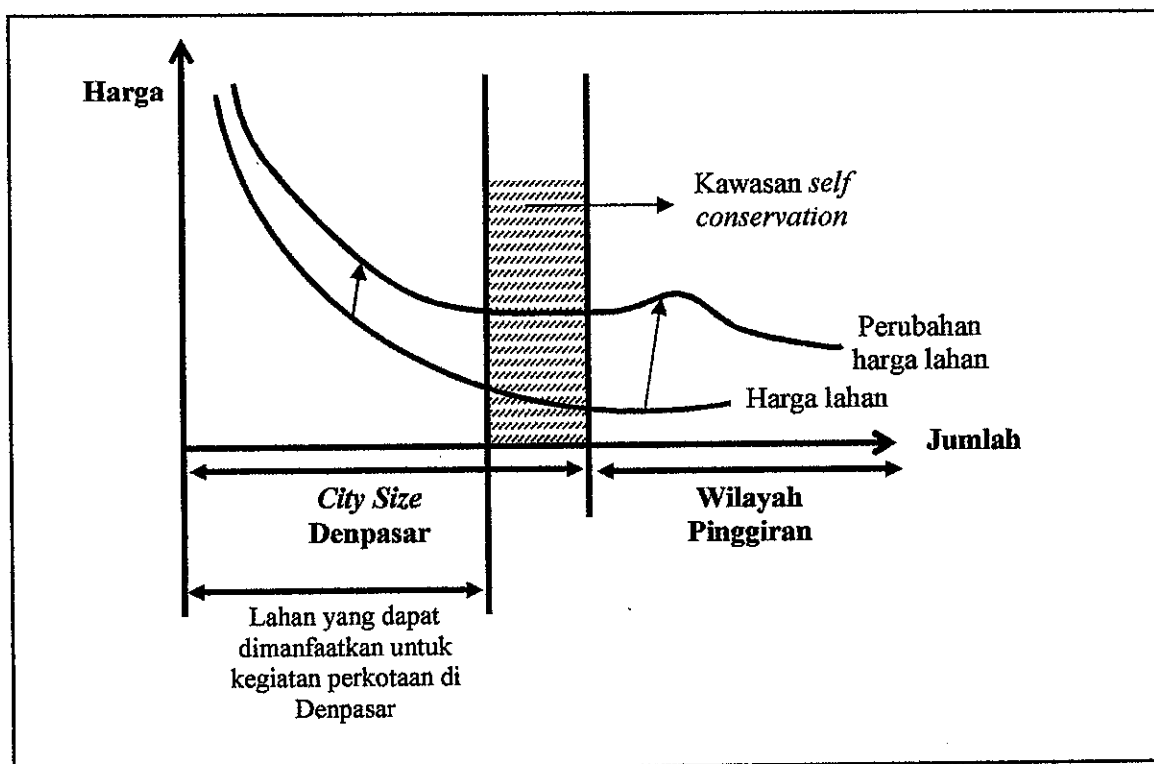
Seluruh ahli yang diwawancarai mengungkapkan bahwa terkait dengan aspek budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu, bangunan yang tidak dapat dipindahkan ataupun dialih-fungsikan, sekalipun pemindahannya sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan bagi masyarakat luas adalah : Pura *Sad Kahyangan*, Pura *Dang Kahyangan*, Pura *Kahyangan Tiga*, berikut radius kesuciannya masing-masing. Hal ini terkait dengan *Padma Kertih*, yang mengajarkan kita untuk memelihara tempat suci dan kegiatan suci. Sehingga pada dasarnya semua kegiatan dan tempat suci harus dipelihara dan dipertahankan keberadaannya, jangan dipindah-pindah karena menentukan lokasi dan pemberian "jiwa"-nya membutuhkan perenungan serta tapa brata yang tidak mudah. Bangunan-bangunan di luar ketiga pura tersebut dapat saja dipindahkan, namun harus melalui suatu rangkaian *upacara* (Wiana, 2002).

Dalam kaitannya dengan rumah tradisional Bali yang merupakan rumah asal (*Umah, Griya, Puri, Jero* termasuk *sanggah/merajan, telajakan, lebu*, dan *natah-nya*) sebagai salah satu kawasan *self conservation*, dimana rumah asal tersebut sangat sulit atau

5. Secara *sekala* (nyata) adalah pandangan masyarakat, dimana seseorang yang sampai menjual rumah tuanya karena alasan ekonomi, memiliki predikat yang tidak baik/rendah di mata masyarakat. Sedangkan secara *niskala* (nir-rupa) adalah karena adanya ikatan turun temurun dalam keluarga besar, adanya ikatan terhadap leluhur, faktor historis tentang asal usul kita, dan kepercayaan terhadap *Hukum Karmapala*, bahwa leluhur kita akan menghukum apabila kita sampai menjual rumah asal kita (Suija, 2002).
6. Rumah asal memiliki nilai pemersatu dalam kekerabatan masyarakat Bali, karena sebagian besar kegiatan upacara dilakukan di rumah asal tersebut mulai dari lahir sampai mati. Jadi kecil kemungkinan masyarakat Bali akan menjual rumah asalnya, dan apabila hal itu terjadi pasti bukan karena persoalan ekonomi, namun lebih kepada persoalan *niskala* (nir rupa) seperti adanya gangguan kesakitan yang berulang, *putung*, dan sebagainya (Jadnja, 2002; Sukayasa, 2002).
7. Adanya ikatan hukum budaya dalam masyarakat Bali yaitu : (a) Hukum agama, norma agama. Kalau ini dilanggar dosa dalam diri, rasa bersalah pada diri bahkan pada roh leluhurnya, (b) Hukum budaya/adat istiadat, norma budaya. Kalau itu dilanggar akan menimbulkan perasaan malu pada masyarakat, rasa rendah diri dan terkucilkan, dan (c) Hukum legal, dari hukum adat sampai hukum formal. Kalau itu dilanggar akan terkena sangsi, baik sangsi adat maupun sangsi formal. Dalam kaitannya dengan penjualan *umah tua* sebagai satu kesatuan dengan *sanggah/merajan*-nya, maka masyarakat Bali yang melakukannya akan menerima ganjaran dari Hukum Agama dan Hukum Budaya (adat istiadat). Kalau dikaitkan dengan kondisi meso, *umah-umah tua* yang ada di Denpasar itu akan cenderung dikonservasi oleh penghuninya/pemilikinya, dengan demikian dapat disebutkan akan dikonservasi oleh masyarakat Bali secara keseluruhan (Geriya, 2002).

Terwujudnya kawasan-kawasan *self conservation* ini memiliki konsekwensi logis terhadap berkurangnya ketersediaan lahan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan Kota Denpasar. Sehingga ketersediaan lahan perkotaan yang sudah terbatas, menjadi semakin terbatas (Rumawan, 2002). Apabila hal ini dikaitkan dengan harga lahan, maka secara hipotetis dapat digambarkan dalam kurva seperti gambar 4.4.

GAMBAR 4.4  
KURVA PENINGKATAN HARGA LAHAN AKIBAT PENGARUH BUDAYA



Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi, 2002

Berdasarkan keseluruhan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Denpasar, dapat ditabulasikan dan dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV.2  
RANGKUMAN PAKAR YANG MENDUKUNG  
PENGARUH BUDAYA DALAM LINGKUP KERUANGAN TERHADAP  
PERKEMBANGAN KOTA DENPASAR

NO	Perwujudan Pengaruh Budaya Masyarakat Bali Terhadap Perkembangan Kota Denpasar	Perwujudan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Bali dalam Lingkup Keruangan	Pakar yang Mendukung
1.	Kecenderungan masyarakat Hindu Bali membangun rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali	<i>Tri Hita Karana, Tri Mandala, Hasta Kosala Kosali dan Hasta Bumi (Sikut Karang), desa-kala-patra, Rwa Bhineda, Tri Masa,</i>	Wiana, Gunadha, Gunadi, Sugira, Rumawan, Gelebet, Geriya, Triguna, Sarjana, Sukayasa
2.	Kebutuhan lahan perumahan bagi masyarakat Hindu Bali relatif luas	<i>Tri Hita Karana, Tri Mandala, Hasta Kosala Kosali dan Hasta Bumi (Sikut Karang)</i>	Gunadha, Gunadi, Sugira, Musna, Gelebet, Sura, Sukayasa
3.	Pembatasan ketinggian bangunan dan batasan budaya dalam pemanfaatan ruang bawah tanah	<i>Tri Hita Karana, Tri Angga, Sor-Singgih, Luan, Teben, Rwa Bhineda, hukum naturalis Agama Hindu</i>	Wiana, Gunadha, Gunadi, Raka Klaci, Sugira, Musna, Gelebet, Geriya, Sura, Triguna, Suija, Sarjana, Jadjnja, Sukayasa
4.	Pertambahan jumlah pura ( <i>Pura Dadia dan Pura Panti</i> ), akibat pertambahan jumlah keluarga/ <i>pekurenan</i> .	Sistem kekerabatan ( <i>nyama, braya, tunggal dadia, soroh</i> )	Sukayasa
5.	Kecenderungan bermukim selalu berorientasi pada rumah asalnya (selain pertimbangan ekonomis), sehingga pemilihan lokasi bermukim di wilayah pinggiran kota yang relatif dekat dengan rumah asal	<i>Desa Pekraman (adat istiadat), ikatan spiritual psikologis, ikatan leluhur dan tanah kelahirannya (sangkan paraning numadi)</i>	Wiana, Gunadha, Gunadi, Raka Klaci, Sugira, Musna, Gelebet, Geriya, Sura, Triguna, Suija, Sarjana, Sukayasa
6.	Terwujudnya kawasan-kawasan <i>self conservation</i>	<i>Tri Rna, Panca Maha Yadhya, Padma Kertih, Tri Hita Karana, Sangkan Paraning Numadi, dan ikatan spiritual psikologis</i>	Wiana, Gunadha, Gunadi, Raka Klaci, Sugira, Musna, Rumawan, Gelebet, Geriya, Sura, Triguna, Suija, Sarjana, Jadjnja, Sukayasa
7.	Tidak diperbolehkannya pembangunan jalan layang dan jembatan penyeberangan ( <i>fly over</i> ) sebagai alternatif pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar	<i>Tri Hita Karana, Tri Angga, Sor-Singgih, Luan, Teben, Rwa Bhineda, hukum naturalis Agama Hindu, Tri Rna, Panca Maha Yadhya, Padma Kertih, Tri Hita Karana, dan ikatan spiritual psikologis</i>	Gunadha, Gunadi, Raka Klaci, Sugira, Musna, Gelebet, Geriya, Sura, Suija, Jadjnja

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Tabel di atas menunjukkan bahwa perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali yang mempengaruhi perkembangan kota menurut para pakar adalah :

1. Kecenderungan masyarakat Hindu Bali membangun rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali.
2. Adanya pembatasan ketinggian bangunan dan batasan budaya dalam pemanfaatan ruang bawah tanah.
3. Kecenderungan bermukim selalu berorientasi pada rumah asal-nya (selain pertimbangan ekonomis), sehingga pemilihan lokasi bermukim di wilayah pinggiran kota yang relatif dekat dengan rumah asal.
4. Terbentuknya kawasan-kawasan *self conservation*.
5. Tidak diperbolehkannya pembangunan jalan layang dan jembatan penyeberangan (*fly over*) sebagai alternatif pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar.

#### **4.2 Analisis Keterkaitan antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Fenomena Suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA**

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif melalui Metode Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabulation*). Data-data yang akan dikaji dan dianalisis adalah data tentang keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan dengan preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar (sebagai perwujudan dari fenomena suburbanisasi), yang diperoleh dari kuisisioner. Aspek budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan sebagai variabel pengaruh/variabel bebas (*independen variable*), sedangkan preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar itu sendiri sebagai variabel tetap/terikatnya (*dependen variable*).

Penggunaan Metode Analisis *Crosstabulation* ini adalah untuk mentabulasikan dan mengolah data dari hasil kuisisioner yang disebarkan. Metoda ini diharapkan dapat

menentukan ada tidaknya keterkaitan dari *independen variable* dengan *dependen variable* yang telah dituangkan ke dalam kuisioner.

Untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel, maka dilakukan Uji *Chi Square*, dengan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), dimana dengan alat uji tersebut akan dihasilkan suatu angka tertentu dengan asumsi (Santoso, 2001 : 185-192) :

1.  $H_0$  = Tidak ada hubungan antara baris dan kolom
2.  $H_i$  = Ada hubungan antara baris dan kolom
3. Berdasarkan perbandingan antara *Chi-Square* Uji dan *Chi-Square* Tabel :
  - a. Jika *Chi-Square* Hitung < *Chi-Square* Tabel, maka  $H_0$  diterima (tidak ada hubungan)
  - b. Jika *Chi-Square* Hitung > *Chi-Square* Tabel, maka  $H_0$  ditolak (ada hubungan)
4. Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ) = 10 % (0,1)
5. Berdasarkan Probabilitas (*Asymp. Sig*) :
  - a. Jika probabilitas (*Asymp. Sig*) > 0,1, maka  $H_0$  diterima (tidak ada hubungan)
  - b. Jika probabilitas (*Asymp. Sig*) < 0,1, maka  $H_0$  ditolak (ada hubungan)
6. Berdasarkan Uji Kontingensi (*Symmetric Measures*) :
  - a. Jika *contingency coefficient* > 0,5, maka hubungan yang terjadi kuat
  - b. Jika *contingency coefficient* < 0,5, maka hubungan yang terjadi lemah

#### **4.2.1 Keterkaitan antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Preferensi Bermukim Masyarakat di Kawasan SARBAGITA**

Berdasarkan tahapan analisis dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan preferensi bermukim masyarakat di Kawasan SARBAGITA dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini dan lampiran B.3.

TABEL IV.4  
HASIL TABULASI SILANG ANTARA ASPEK BUDAYA MASYARAKAT BALI  
DENGAN PREFERENSI BERMUKIM DI KAWASAN SARBAGITA

Aspek Budaya Masyarakat Bali	Preferensi Bermukim di Kawasan SARBAGITA			
	<i>Crosstab</i> $X^2$ (hitung) dengan $X^2$ (tabel)	Signifikan	Koefisien Kontingensi	Keterangan (Ada/Tidak Keterkaitan)
Lokasi dekat Rumah Asal	10,379 > 4,6052	0,006	0,305	Ada/Lemah
Frekwensi ke Rumah Asal	1,169 < 7,7794	0,883	0,107	Tidak/Lemah
Alasan ke Rumah Asal	0,713 < 4,6052	0,700	0,084	Tidak/Lemah
Kewajiban di Rumah Asal	0,404 < 4,6052	0,817	0,063	Tidak/Lemah
Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali	1,791 < 4,6052	0,408	0,132	Tidak/Lemah
Penggunaan <i>Sikut Karang</i>	5,348 < 7,7794	0,253	0,224	Tidak/Lemah
Tempat kosong untuk <i>sanggah/merajan</i>	0,529 < 4,6052	0,767	0,072	Tidak/Lemah
Luas Minimum Lahan	8,281 < 19,8119	0,763	0,275	Tidak/Lemah
Luas Ideal Lahan	6,633 < 13,3616	0,577	0,248	Tidak/Lemah
Upaya mengakomodasi penambahan keluarga	8,007 < 10,6446	0,238	0,271	Tidak/Lemah
Pembatasan Ketinggian Bangunan	2,469 < 4,6052	0,291	0,154	Tidak/Lemah
Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah	5,308 > 4,6052	0,070	0,223	Ada/Lemah
Larangan Pembangunan Jalan Layang	1,421 < 4,6052	0,492	0,118	Tidak/Lemah
Ruang-ruang terbuka untuk upacara	9,218 < 10,6446	0,162	0,289	Tidak/Lemah
Keanggotaan Desa Adat	3,497 < 4,6052	0,174	0,183	Tidak/Lemah
Eksistensi Budaya	15,996 > 7,7794	0,003	0,370	Ada/Lemah
<i>Pura Paibon/Panti</i>	0,444 < 4,6052	0,801	0,066	Tidak/Lemah
<i>Pura Dadia</i>	1,019 < 4,6052	0,601	0,100	Tidak/Lemah
<i>Sanggah/Merajan</i>	0,622 < 4,6052	0,733	0,078	Tidak/Lemah
Rumah Asal	0,841 < 4,6052	0,657	0,091	Tidak/Lemah
<i>Bale Banjar</i>	1,241 < 4,6052	0,536	0,110	Tidak/Lemah
Pasar Tradisional ( <i>Peken</i> )	0,124 < 4,6052	0,940	0,035	Tidak/Lemah
Kuburan ( <i>Setra</i> )	2,065 < 4,6052	0,356	0,142	Tidak/Lemah

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Hasil analisis tabulasi silang (*crosstabulation*) dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh aspek budaya masyarakat Bali yang ditinjau, hanya (a) pertimbangan lokasi bermukim yang dekat dengan rumah asal, (b) batasan budaya dalam pemanfaatan ruang secara vertikal ke bawah tanah, dan (c) eksistensi penerapan konsepsi budaya, yang memiliki hubungan/keterkaitan dengan preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar. Bahkan hubungan yang terjadi relatif lemah. Namun demikian, dapat disebutkan bahwa dilihat dari aspek budaya masyarakat Bali, preferensi masyarakat bermukim di wilayah pinggiran Kota Denpasar (sebagai perwujudan terjadinya fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA), ditentukan oleh pertimbangan lokasi bermukim yang dekat dengan rumah asal, batasan budaya dalam pemanfaatan ruang secara vertikal ke bawah tanah, dan eksistensi penerapan konsepsi budaya.

Selain ketiga hal dari aspek budaya yang secara riil mempengaruhi atau memiliki keterkaitan dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA tersebut, ruang-ruang terbuka untuk upacara agama dan upacara adat serta keanggotaan Desa Adat, relatif memiliki kecenderungan membentuk suatu keterkaitan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas atau tingkat signifikansinya yang mendekati nilai 0,1 (0,162 dan 0,174).

#### **4.2.2 Keterkaitan antara Aspek Budaya Masyarakat Bali dengan Pertimbangan Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali**

Dari keseluruhan aspek budaya masyarakat Bali, yang ditinjau untuk dicari keterkaitannya dengan pertimbangan penerapan pola tata ruang tradisional Bali adalah pengukuran pada semua bangunan menggunakan *sikut karang*, pertimbangan penyediaan tempat kosong untuk membangun *sanggah/merajan*, luas minimum lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, luas ideal lahan, upaya mengakomodasi penambahan anggota keluarga, dan eksistensi penerapan konsepsi budaya.

Hasil analisis *crosstabulation* antara aspek budaya masyarakat Bali dengan pertimbangan penerapan pola tata ruang tradisional Bali dapat dilihat pada tabel berikut dan pada lampiran B.3.

TABEL IV.5  
HASIL TABULASI SILANG ANTARA ASPEK BUDAYA  
MASYARAKAT BALI DENGAN PERTIMBANGAN PENERAPAN  
POLA TATA RUANG TRADISIONAL BALI

Aspek Budaya Masyarakat Bali	Pertimbangan Penerapan Pola Tata Ruang Tradisional Bali			
	<i>Crosstab</i> X <sup>2</sup> (hitung) dengan X <sup>2</sup> (tabel)	Signifikan	Koefisien Kontingensi	Keterangan (Ada/Tidak Keterkaitan)
Penggunaan <i>Sikut Karang</i>	5,568 > 4,6052	0,062	0,229	Ada/Lemah
Tempat kosong untuk <i>sanggah/merajan</i>	4,183 > 2,7055	0,041	0,199	Ada/Lemah
Luas Minimum Lahan	12,224 > 10,6446	0,057	0,329	Ada/Lemah
Luas Ideal Lahan	5,851 < 7,7794	0,211	0,234	Tidak/Lemah
Upaya mengakomodasi penambahan keluarga	0,192 < 6,2514	0,979	0,044	Tidak/Lemah
Eksistensi Budaya	2,654 < 4,6052	0,265	0,160	Tidak/Lemah

Sumber : Hasil Analisis, 2002

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pada semua bangunan menggunakan *sikut karang*, pertimbangan penyediaan tempat kosong untuk membangun *sanggah/merajan*, dan luas minimum lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah mempunyai keterkaitan dengan pertimbangan penerapan pola tata ruang tradisional Bali, walaupun hubungannya masih lemah.

Aspek budaya lainnya yang berkaitan dengan luas ideal lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah, upaya mengakomodasi penambahan anggota keluarga, dan eksistensi penerapan konsepsi budaya, sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan pertimbangan penerapan pola tata ruang tradisional Bali. Bahkan nilai probabilitasnya atau tingkat signifikansinya jauh di atas nilai 0,1 (0,21; 0,979; dan 0,265).

### 4.3 Temuan Studi

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi perwujudan nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan serta pengaruhnya terhadap perkembangan Kota Denpasar, beberapa hal yang menjadi temuan studi adalah bahwa wujud konkret nilai-nilai budaya masyarakat Bali dalam lingkup keruangan yang mempengaruhi perkembangan Kota Denpasar adalah :

1. Adanya eksistensi penerapan budaya, dimana budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sudah mengakar dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya (*living culture*), sekalipun ada pergeseran-pergeseran, namun bersifat penyesuaian dan tidak akan keluar dari norma dasarnya. Ikatan-ikatan budaya yang tetap eksis tersebut menyebabkan kecenderungan masyarakat Hindu Bali untuk melaksanakan pembangunan rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali. Pembangunan rumah berdasarkan konsep ruang tradisional Bali ini terkait dengan luas lahan yang dibutuhkan, sehingga memberikan konsekwensi pergerakan permukiman ke arah luar atau pinggiran Kota Denpasar, karena harga lahan di dalam kota sangat tinggi.
2. Pengaruh budaya masyarakat Bali dalam pembatasan ketinggian bangunan yang ditentukan maksimal setinggi pohon kelapa (15 m atau 3-4 lantai), sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan ruang. Akibatnya pembangunan tidak dapat dilakukan secara intensif. Kondisi ini menjadi lebih dilematis karena adanya batasan budaya juga dalam pemanfaatan ruang secara vertikal ke bawah tanah.
3. Adanya ikatan-ikatan dengan rumah asal , yang menyebabkan terjadinya kecenderungan untuk memilih lokasi bermukim yang selalu berorientasi pada rumah asalnya (selain pertimbangan ekonomis, kelengkapan fasilitas dan utilitas, serta keamanan dan kenyamanan), karena frekwensi mereka untuk melakukan kegiatan di tempat asal

tersebut relatif tinggi. Sehingga hal tersebut menyebabkan kecenderungan bagi para migran untuk memilih lokasi tempat tinggal di wilayah pinggiran kota, karena selain dekat ke pusat kota (alasan ekonomis), juga dekat dengan rumah asal-nya (alasan budaya). Dalam konteks perkembangan Kota Denpasar, hal ini akan mendorong cepatnya perkembangan kota secara ekstensif dan meningkatkan perluasan kawasan perkotaan (*extended urban area*).

4. Adanya ikatan-ikatan budaya yang mengakibatkan terwujudnya kawasan-kawasan *self conservation* seperti : rumah tradisional Bali (*Umah, Griya, Puri, Jero* termasuk *sanggah/merajan, telajakan, lebu, dan natah-nya*), tempat suci (pura) dan kawasan suci berikut radius kesuciannya, ruang-ruang terbuka untuk kegiatan upacara, dan sebagainya. Kuatnya eksistensi budaya menyebabkan kawasan-kawasan tersebut, sangat sulit atau kecil kemungkinannya untuk dipindahkan (digusur) ataupun dialih-fungsikan. Norma ini sangat ditaati oleh masyarakat Bali pada umumnya sebagai bagian dari kehidupannya (*living culture*). Terbentuknya kawasan-kawasan *self conservation* ini memiliki konsekwensi logis terhadap berkurangnya ketersediaan lahan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan Kota Denpasar. Sehingga ketersediaan lahan perkotaan yang sudah terbatas, menjadi semakin terbatas.
5. Adanya pertimbangan budaya dalam pelarangan pembangunan jalan layang dan jembatan penyeberangan (*fly over*) sebagai alternatif pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar. Maka konsekwensinya adalah terjadinya peningkatan ratio kemacetan dan menurunnya tingkat keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di Kota Denpasar. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong percepatan proses ekstensi perkembangan kota ke wilayah pinggiran dan wilayah lain disekitarnya.

Sedangkan dari hasil analisis keterkaitan antara aspek budaya masyarakat Bali dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA, ternyata dari seluruh aspek budaya masyarakat Bali yang ditinjau, hanya pertimbangan lokasi bermukim yang dekat dengan rumah asal, batasan budaya dalam pemanfaatan ruang secara vertikal ke bawah tanah, dan eksistensi penerapan konsepsi budaya, yang memiliki keterkaitan dengan fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA. Bahkan hubungan tersebut masih lemah. Sedangkan aspek budaya yang memiliki kecenderungan membentuk suatu keterkaitan dengan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA, antara lain adalah adanya ruang-ruang terbuka untuk upacara agama dan upacara adat serta keanggotaan Desa Adat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Fenomena suburbanisasi yang telah dan sedang terjadi di Kawasan SARBAGITA secara umum menunjukkan gejala yang sama dengan kota/wilayah lainnya, dimana fenomena ini terjadi karena terbatasnya kemampuan kota untuk menampung pertumbuhan penduduk berikut aktivitasnya, sehingga terjadi pergerakan ke arah pinggiran kota. Namun ternyata proses suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh aspek budaya masyarakat Bali yang memberikan batasan-batasan dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Aspek tersebut mempengaruhi perkembangan Kota Denpasar melalui perwujudannya dalam pola tata ruang tradisional Bali, sistem kemasyarakatan/adat istiadat, serta sistem religi, upacara agama dan upacara adat. Pengaruh nilai-nilai budaya ini akan mengurangi kapasitas/daya tampung optimal Kota Denpasar dan menyebabkan terjadinya kecenderungan ekstensifikasi perkembangan kota. Fenomena suburbanisasi ini menjadi berbeda dengan yang terjadi di Amerika (adanya peningkatan pelayanan transportasi/motorisasi), ataupun dengan yang terjadi di Jakarta (faktor pendorongnya adalah adanya gerakan pendirian bangunan pada masyarakat yang dibantu oleh pemerintah) (Leaf, 1994 : 343-353)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aspek budaya masyarakat Bali tersebut tidak memberi pengaruh langsung terhadap fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA, namun sebagai dampak dari ekstensifikasi perkembangan Kota Denpasar. Oleh karenanya, maka aspek budaya tersebut memiliki keterkaitan yang relatif lemah dengan fenomena suburbanisasi yang terjadi di Kawasan SARBAGITA.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan temuan studi yang menunjukkan adanya pengaruh budaya terhadap perkembangan Kota Denpasar dan fenomena suburbanisasi di Kawasan SARBAGITA, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah :

1. Membuat suatu deliniasi atau limitasi kawasan-kawasan *self conservation* di Kota Denpasar yang tidak dapat digusur atau dialih-fungsikan, sehingga akan dapat diketahui seberapa besar cadangan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan.
2. Pembangunan kawasan pengembangan baru di luar Kota Denpasar yang mandiri (*self contained*), misalnya di wilayah Kabupaten Badung (Dalung, Sempidi, Lukluk, Kapal, Mengwitani, Darmasaba, dan Sibangede), Kabupaten Gianyar (Batubulan dan Blahbatuh), ataupun di wilayah Kabupaten Tabanan (Abiantuwung, Kediri, dan Banjar Anyar), sehingga pertumbuhan dan perkembangan penduduk tidak memusat di Kota Denpasar.
3. Mempertahankan peraturan-peraturan pembatasan ketinggian bangunan serta larangan pembangunan jalan dan jembatan layang, sehingga akan membentuk identitas Kota Denpasar dan Kawasan SARBAGITA (*locus solus*).
4. Membentuk wadah koordinasi perkotaan dalam lingkup Kawasan SARBAGITA karena penyatuan ruang perkotaan di kawasan ini berlangsung sangat cepat dan pesat, sehingga penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan dapat berlangsung secara efektif, efisien, terintegrasi, dan komprehensif.
5. Penyusunan rencana tata ruang Kota ataupun Kawasan SARBAGITA agar menekankan pada aspek budaya masyarakat Bali, agar tersusun suatu rencana tata ruang yang berwawasan identitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### KELOMPOK BUKU LITERATUR ILMIAH

- Bourne, Larry S. dan James W. Simmons. 1982. *Defining The Area of Interest : Definitions of The City, Metropolitan Areas, and Extended Urban Region*. New York : Oxford University Press.
- Balchin, Paul N. dan Jeffery L. Kieve. 1982. *Urban Land Economics*. Second Edition. London : The Macmilan Press Ltd.
- Budihardjo, Eko. 1985. *Architecture Conservation in Bali*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Penerbit ALUMNI Bandung.
- Friedmann, John dan William Alonso. 1964. *Regional Development and Planning*. Massachusset : The Mit Press.
- Gilbert, Frederick. 1959. *Town Design*. New York : A Praeger Inc.
- Gilbert, Alan dan Gugler Josef. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Terjemahan Anshori. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Ginarsa, Ktut. 1967. *Darmaning Hasta Kosala-Kosali*. Singaraja : Direktorat Djendral Kebudayaan, Propinsi Bali di Singaraja.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung : Jurusan Teknik Planologi – ITB.
- Lynch, Kevin. 1987. *Good City Form*. Cambridge : The MIT Press.
- McGee, T.G (eds.). 1991. *The Extended Metropolis : Settlement Trasition in Asia*. McGee, (The Emergence of Desakota Regions in Asia : Expanding a Hypothesis). Honolulu : University of Hawaii Press.
- Marbun, BN. 1994. *Kota Indonesia Masa Depan : Masalah dan Prospek*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketigabelas. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Richardson, Harry W. 1969. *Regional Economics : Location Theory, Urban Structure, and Regional Change*. New York : Praeger Publishers.
- \_\_\_\_\_. 1971. *Urban Economics*. London : Penguin Books.
- Sudarma, I Wayan. 1995. *Konsepsi Tri Hita Karana Dalam Pelestarian Eksistensi di Desa Adat*. Denpasar : Penerbit Bali Post (BP).
- Sinulingga, Budi D. 1999. *Pembangunan Kota : Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi 10 : Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Whyne-Hammond, Charles. 1979. *Elemen of Human Geography*. London : Allen & Unwin.
- Warpani, Suwardjoko, 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Wiana, I Ketut. 1995. *Yajnya dan Bakti : Dari Sudut Pandang Hindu*. Denpasar : Penerbit PT. Pustaka Manikgeni.
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

#### KELOMPOK ARTIKEL DAN JURNAL

- Dharmapatni, Ida Ayu Indira. 1993. "Fenomena Mega-Urban dan Tantangan Pengelolaannya : Kasus Jabotabek dan Metropolitan Bandung." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Edisi Khusus, Februari, hal. 26-43.
- Firman, Tommy. 1991. "Pengembangan Kota-kota Menengah dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, No. 2 Triwulan 1, April.
- \_\_\_\_\_. 1996 "Urbanisasi, Persebaran Penduduk, dan Tata Ruang di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, No. 21, Mei.
- Kusbiantoro, BS. 1993. "Manajemen Perkotaan Indonesia." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Edisi Khusus, Februari, hal. 3-10.

- Leaf, Michael. 1994. "The Suburbanisation of Jakarta : A Concurrence of Economics and Ideology." *Canada : TWPR*. 16 (4), pp. 341-356.
- Prabatmodjo, Hastu. 2000. "Perkotaan Indonesia Pada Abad Ke-21 : Menuju Urbanisasi Menyebar ?" *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 11 No. 1, Maret, hal. 30-40.
- Sujarto, Djoko. 1990. "Aspek Kepranataan Pembangunan Kota Baru." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, No. 1 Triwulan 1, Januari.

#### **KELOMPOK SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Meganada, I Wayan. 1990. "Pola Tata Ruang Arsitektur Tradisional dalam Perumahan KPR-BTN di Bali." Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Teknik Arsitektur, Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Mawardi, Moh. 1998. "Studi Alternatif Bentuk Lembaga Pemerintahan Kota untuk Pembinaan dan Pengelolaan Kota Raba-Bima." Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Bidang Khusus Perencanaan Kabupaten, Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Parimin, Ardi P. 1986. "Fundamental Study on Spasial Faormation of Island Village : Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept in Bali." Unpublished Ph.D. Dissertation, Osaka University, Japan.
- Putra, Anindya. 1991. "Kajian ke Arah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali Dalam Penataan Ruang Kota dan Penelusuran Syarat-syarat Ruang dari Masyarakat sebagai Landasan Perwujudan Ruang Kota Berwawasan Identitas : Studi Kasus Kota Gianyar." Tesis tidak diterbitkan, Program Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Salija, Juswadi. 1975. "Spasial Concept in Balinese Tradistional Architecture its Possibilities for Further Development." Unpublished Master of Architecture, University of Hawaii, Hawaii.

#### **KELOMPOK HASIL PENELITIAN**

- Ardana, I Gusti Gde et. al. 1982. *Agama Hindu dan lingkungan Hidup*. Denpasar : Proyek Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu.
- Ardana, I Gusti Gde. 2000. *Pura Kahyangan Tiga*. Denpasar : Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama Tersebar di Sembilan Kabupaten/Kota.

Auهران Dj, Eka. 2000. *Ruang dan Kelembagaan Metropolitanisasi di Indonesia*. Ekadj@usa.com.

Bagus, I Gusti Ngurah. 1970. *Sistem Pola Menetap Masyarakat Bali*. Denpasar : Universitas Udayana.

Kaler, Anak Agung Made. Tanpa Tahun. *Tradisional Bali Dalam Wujud Rupa Gambar*. Denpasar : Kumpulan Materi dari Berbagai Sumber.

Pudja, I Gde. 1978. *Pelaksanaan P4 Bagi Umat Hindu Dharma*. Jakarta : Dirjen Bimas Hindu dan Budha, Departemen Agama.

Punyatmadja, Ida Bagus Oka. 1984. *Panca Sradha*. Denpasar : Proyek Penyuluhan dan Penerbitan Buku Agama Pemerintah Daerah Propinsi Bali.

Sura, I Gde. 1985. *Pengendalian Diri dan Etika dalam Ajaran Agama Hindu*. Jakarta : Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Hindu dan Budha.

#### **KELOMPOK MAKALAH SEMINAR/LOKAKARYA/PERTEMUAN ILMIAH**

Hanafie, Jahja. 1996. "Pranata Sosial dalam Pembangunan Perkotaan." Jakarta : Makalah dalam Konvensi Nasional Penguatan Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan. CIDES – IAP Jakarta.

Karyoedi, Mochtarrram. 1987. "Faktor dan Dasar Pertimbangan Perkembangan Kota." Manado : Makalah Seminar Perencanaan Pengembangan Kota di Manado.

Sujarto, Djoko dan Benedictus Kombaitan. 1971. "Konsepsi Pedoman Perencanaan dan Perancangan Kota Baru di Indonesia." Tsukaba : Makalah disampaikan pada Seminar Strategi Perumahan Perkotaan di Tsukaba-Jepang.

Soetomo, Sugiono. 1995. "Planologi Masa Depan : Tantangan Penataan Ruang Dalam Menghadapi Isu Penting Dalam Pembangunan Jangka Panjang II." Semarang : Pidato Dies Natalis disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro.

#### **KELOMPOK BUKU DATA/LAPORAN**

*Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan Dalam Angka Tahun 1996-2000*. Kantor Statistik Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, 1996-2000.

*Data Bali Membangun Tahun 2000*. Bappeda Propinsi Bali, 2000.

*Kuta, Mengwi, Abiansemal, Sukawati, Blahbatuh, Ubud, Gianyar, Tabanan, dan Kediri Dalam Angka Tahun 1996-2000.* Kantor Statistik Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan, 1996-2000.

*Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bali.* Bappeda Propinsi Bali, 1996.

*Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar.* Bappeda Kota Denpasar, 1999.

*Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Bali.* Buku Rencana. Bappeda Propinsi Bali, 1995.

*Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar.* Buku Fakta dan Analisa serta Buku Rencana. Bappeda Kota Denpasar, 1998.

*Sabha Arsitektur Tradisional Bali Tahun 1984.* Denpasar : Rumusan Arsitektur Bali, 1984.